



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2029







KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, hidayah dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan baik.

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun dari 2025-2029, yang merupakan penjabaran dan bentuk dukungan terhadap Renstra Kementerian Agama Tahun 2025-2029. Isi dari Renstra ini menjelaskan hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 serta memuat visi, misi, dukungan terhadap tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, target kinerja dan anggaran selama 5 tahun kedepan.



Dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan dalam periode tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini juga mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sumatera Barat untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstranya masing masing

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk bersinergi dalam peningkatan kualitas layanan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berbasis Renstra ini. Semoga pelaksanaan layanan yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT dan memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin

Padang, 18 Desember 2025
Kepala



Mustafa





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 690 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114)





8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 558 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tentang Tim Penyusun Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan pedoman bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung program Kementerian Agama dan melaksanakan kegiatan selama periode lima tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, tercantum dalam Lampiran I;
- b. Matriks Kinerja dan Pendanaan dalam Lampiran II;
- c. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga dalam Lampiran III; dan
- d. Matriks Metadata Indikator Kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se Sumatera Barat dan Satuan Kerja dalam melakukan :

- a. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;





- c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- d. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- e. Penyusunan Pohon Kinerja Organisasi;
- f. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- g. Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Kebijakan lainnya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 18 Desember 2025

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT



Mustafa



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xvi
Daftar Grafik	xvi
Daftar Singkatan	xvii
BAB I	18
PENDAHULUAN	18
A. Kondisi Umum	18
A.1 Kondisi Umum Bidang Agama	20
A.1.1 Mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial (Tujuan 1)	20
A.1.1.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SK-1)	20
A.1.2 Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)	23
A.1.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama (SK-2)	23
A.1.2.2 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa (SK-3)	28
A.1.2.3 Menguatnya peran FKUB (SK-4)	31
A.1.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama (SK-5)	34
A.1.2.5 Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama (SK-6)	35
A.1.2.6 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran (SK-7)	36
A.1.2.7 Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik (SK-8)	38
A.1.2.8 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama (SK-9)	40
A.1.2.9 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembang kan moderasi beragama Islam (SK-10)	43
A.1.2.10 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya (SK-11)	43
A.1.2.11 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat (SK-12)	44



A.1.2.12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama (SK-13)	46
A.1.2.13	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama (SK-14)	48
A.1.3	Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan-3)	49
A.1.3.1	Meningkatnya kualitas sarana pendukung keagamaan (SK-15)	49
A.1.3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam) (SK-16)	52
A.1.3.3	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga (SK-17)	59
A.1.3.4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan PIH khusus (SK-18)	61
A.1.3.5	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji (SK-19)	62
A.1.3.6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji (SK-20)	64
A.1.3.7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji (SK-21)	65
A.1.3.8	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu (SK-22)	66
A.1.3.9	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat (SK-23)	67
A.1.3.10	Meningkatnya pengelolaan asset wakaf (SK-24)	74
A.2	Kondisi Umum Bidang Pendidikan	76
A.2.1	Mendukung peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bermutu (Tujuan-4)	77
A.2.1.1	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif (SK-25)	77
A.2.1.2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan (SK-26)	84
A.2.1.3	Meningkatnya kualitas sarana dan prarana pendidikan (SK-27)	86
A.2.1.4	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat (SK-28)	90
A.2.1.5	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (SK-29)	91
A.2.1.6	Menguatnya pelayanan 1 Tahun pra sekolah (SK-30)	92
A.2.1.7	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK-31)	94
A.2.1.8	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi (SK-32)	95
A.2.1.9	Meningkatnya kualitas pendidik profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik (SK-33)	96



A.2.1.10	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK-34)	98
A.2.1.11	Meningkatnya budaya mutu pendidikan (SK-35)	99
A.2.1.12	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK-36)	101
A.2.1.13	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan (SK-37)	102
A.3	Kondisi Umum Bidang Tata Kelola	103
A.3.1	Mendukung peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive (Tujuan-5)	103
A.3.1.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum (SK-38)	103
A.3.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri (SK-39)	105
A.3.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (SK-40)	106
A.3.1.4	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan (SK-41)	107
A.3.1.5	Meningkatnya pengelolaan BMN (SK-42)	108
A.3.1.6	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi (SK-43)	109
A.3.1.7	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi (SK-44)	109
A.3.1.8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran (SK-45)	110
A.3.1.9	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran (SK-46)	111
A.3.1.10	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor (SK-47)	112
A.3.1.11	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan barang jasa (SK-48)	113
A.3.1.12	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga (SK-49)	113
A.3.1.13	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi (SK-50)	114
A.3.1.14	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi (SK-51)	115
B.	POTENSI DAN PERMASALAHAN	115
B.1	Potensi dan permasalahan bidang agama	115
B.1.1	Mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial (Tujuan-1)	115
B.1.2	Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)	117
B.1.3	Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan-3)	118



	B.2	Potensi dan permasalahan bidang pendidikan Mendukung peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Tujuan-4)	120
	B.3	Potensi dan permasalahan bidang tata kelola Mendukung peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive (Tujuan-5)	124
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAGEMEN RESIKO PEMBANGUNAN NASIONAL		127
	A.	VISI DAN MISI	127
	B.	TUJUAN	130
	C.	SASARAN	130
	D.	DUKUNGAN TERHADAP ASTA PROTAS MENTERI AGAMA	138
	E.	MANAGEMEN RESIKO PEMBANGUNAN NASIONAL	141
BAB III	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		176
	A.	TARGET KINERJA	176
	B.	KERANGKA PENDANAAN	188
BAB IV	PENUTUP		190
DAFTAR LAMPIRAN			
Lampiran I	Narasi BAB I – BAB IV		
Lampiran II	Matrik Kinerja dan Pendanaan APBN 4 Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		192
Lampiran III	Matrik Kinerja dan Pendanaan Non APBN 4 Program Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029		229
Lampiran IV	Metadata Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		231



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	IKSK meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	20
Tabel 1.2	Pengukuran kinerja penyuluh	21
Tabel 1.3	Jumlah penduduk, jumlah penyuluh agama dan rasio penyuluh agama dengan penduduk menurut agama di Sumatera Barat, 2024	21
Tabel 1.4	Pembinaan penyuluh agama	22
Tabel 1.5	Kelompok sasaran penyuluh agama	23
Tabel 1.6	IKSK meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	23
Tabel 1.7	Insiden / Kasus Sosial Keagamaan di Sumatera Barat	24
Tabel 1.8	Indeks KUB 2020-2024	25
Tabel 1.9	Jumlah aktor kerukunan	25
Tabel 1.10	Desa kerukunan di Sumatera Barat	27
Tabel 1.11	Kampung Moderasi Beragama di Sumatera Barat	28
Tabel 1.12	IKSK penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	29
Tabel 1.13	Jumlah lembaga agama dan organisasi sosial keagamaan	30
Tabel 1.14	Kegiatan dialog antar umat beragama	30
Tabel 1.15	IKSK penguatan peran FKUB	32
Tabel 1.16	Jumlah lembaga FKUB di Sumatera Barat	32
Tabel 1.17	Pembinaan moderasi beragama di Sumatera Barat	33
Tabel 1.18	IKSK peningkatan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	35
Tabel 1.19	IKSK peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluh agama	36
Tabel 1.20	IKSK peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	36
Tabel 1.21	Jumlah masjid ramah musafir	37
Tabel 1.22	IKSK peningkatan kegiatan penyiaran agama di ruang publik	39
Tabel 1.23	Jenis siaran keagamaan, jumlah penyiar agama serta materi siaran.	39
Tabel 1.24	IKSK penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	40
Tabel 1.25	Penguatan moderasi beragama	41
Tabel 1.26	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler moderasi beragama di madrasah/ sekolah umum tahun 2024	42
Tabel 1.27	IKSK penguatan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	43
Tabel 1.28	IKSK penguatan dialog lintas agama dan budaya	43
Tabel 1.29	IKSK peningkatan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	44
Tabel 1.30	IKSK peningkatan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	47
Tabel 1.31	Peserta dan Audiens MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat	47
Tabel 1.32	Event kegiatan keagamaan	47



Tabel 1.33	IKSK peningkatan kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	48
Tabel 1.34	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	49
Tabel 1.35	IKSK peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	49
Tabel 1.36	Jumlah tempat peribadatan di Sumatera Barat 2020-2024	50
Tabel 1.37	Jumlah Rumah Ibadah yang Menerima Hibah dan Besaran Dana Hibah yang Disalurkan (Rp. Juta) dari Pemda Provinsi Sumatera Barat	50
Tabel 1.38	Jumlah Ktab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan dan jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci/ buku keagamaan	51
Tabel 1.39	Jenis dan Jumlah Layanan Syariah	52
Tabel 1.40	Jumlah masjid dan mushalla yang telah lakukan pengukuran arah kiblat	52
Tabel 1.41	IKSK peningkatan kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam)	53
Tabel 1.42	Revitalisasi KUA Kecamatan di Sumatera Barat	53
Tabel 1.43	Indeks KUA Revitalisasi se Sumatera Barat	53
Tabel 1.44	Inovasi Layanan pada KUA Revitalisasi	54
Tabel 1.45	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	56
Tabel 1.46	Jumlah putusan Isbat Nikah, 2024	56
Tabel 1.47	Jumlah Peristiwa Nikah di Sumatera Barat, 2020-2024	57
Tabel 1.48	PNBP dari Peristiwa Nikah di Sumatera Barat, 2020-2024	57
Tabel 1.49	Jumlah Madrasah/ Sekolah Sasaran BRUS 2024	58
Tabel 1.50	Jumlah Sertifikasi Halal yang diterbitkan, 2022-2024	59
Tabel 1.51	Pengawasan Halal	59
Tabel 1.52	IKSK meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	60
Tabel 1.53	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/sukinah/hitta sukhaya, 2023-2024	60
Tabel 1.54	IKSK meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah (PIU) dan PIH khusus	61
Tabel 1.55	Jumlah lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A), 2020-2024	62
Tabel 1.56	IKSK meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	62
Tabel 1.57	Inovasi Pelayanan Gedung PLHUT	63
Tabel 1.58	Jumlah jamaah yang diberangkatkan	64
Tabel 1.59	IKSK meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	64
Tabel 1.60	IKSK meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	65
Tabel 1.61	Jumlah petugas haji tersertifikat	66
Tabel 1.62	IKSK meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	66
Tabel 1.63	Jumlah jamaah yang mendaftar	67
Tabel 1.64	IKSK meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	67
Tabel 1.65	Jumlah pengumpulan zakat, 2024	68
Tabel 1.66	Pertumbuhan muzaki 2023-2024	68
Tabel 1.67	Pertumbuhan pendistribusian dan pendayagunaan 2023-2024	69



Tabel 1.68	Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan 2024	69
Tabel 1.69	Realisasi pendistribusian dan pemanfaatan berdasarkan asnaf	69
Tabel 1.70	Pertumbuhan Mustahik	70
Tabel 1.71	Pengelolaan Dana Zakat pada UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	70
Tabel 1.72	Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan	70
Tabel 1.73	Jumlah RTLH penerima dana Stimulan Program BERANI	71
Tabel 1.74	Kampung Zakat	71
Tabel 1.75	Jumlah Amil berdasarkan status, 2024	74
Tabel 1.76	IKSK meningkatnya pengelolaan aset wakaf	74
Tabel 1.77	Jumlah tanah wakaf	75
Tabel 1.78	Jumlah akta ikrar wakaf	75
Tabel 1.79	Jumlah lembaga, guru, siswa dan rasio guru terhadap siswa	76
Tabel 1.80	IKSK meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	78
Tabel 1.81	Jmlah madrasah yang menerapkan pembelajaran inovatif	78
Tabel 1.82	Jumlah inovasi pembelajaran berbasis keagamaan	79
Tabel 1.83	Jumlah Pondok Pesantren Penerima Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren 2021-2023	79
Tabel 1.84	Sebaran Pondok Pesantren Penerima Bantuan Inkubasi Bisnis Berdasarkan Kabupaten / Kota	79
Tabel 1.85	Peserta Kemandirian Pesantren Expo Tahun 2023	80
Tabel 1.86	Madrasah Program Keagamaan di Sumatera Barat, 2024	81
Tabel 1.87	Madrasah keterampilan/ kejuruan di Sumatera Barat	82
Tabel 1.88	Madrasah Penyelenggara Riset Jenjang MTs	82
Tabel 1.89	IKSK meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	84
Tabel 1.90	Hasil AKG Madrasah	85
Tabel 1.91	Hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah	85
Tabel 1.92	Jumlah kegiatan penguatan kompetensi oleh AKG, KKG, dan MGMP	86
Tabel 1.93	Jumlah kegiatan pendampingan mutu oleh pengawas, 2024	86
Tabel 1.94	IKSK meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	86
Tabel 1.95	Kondisi bangunan madrasah	87
Tabel 1.96	Jumlah RA, MI/Ula, MTs/ Wustha, MA/Ulya dan PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana	88
Tabel 1.97	Revitalisasi Madrasah. 2020-2024	88
Tabel 1.98	Madrasah penerima bantuan rehab berat	89
Tabel 1.99	Madrasah penerima bantuan PUPR	89
Tabel 1.100	Madrasah penerima bantuan kinerja dan afirmasi madrasah	89
Tabel 1.101	IKSK meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	90



Tabel 1.102	Jumlah Siswa/ Santri Penerima BOS dan PIP	90
Tabel 1.103	IKSK meningkatnya kualitas penanganan ATS	92
Tabel 1.104	Jumlah ATS yang mengikuti dan menyelesaikan PKPPS	92
Tabel 1.105	Menguatnya pelayanan 1 Tahun pra sekolah	93
Tabel 1.106	Jumlah PAUD dan PAUD- HI Se Sumatera Barat	93
Tabel 1.107	Jumlah siswa Kelas I MI/ Ula yang mengikuti pendidikan pada PAUD	94
Tabel 1.108	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	94
Tabel 1.109	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi	95
Tabel 1.110	Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan, 2024	95
Tabel 1.111	IKSK meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	96
Tabel 1.112	Jumlah Guru Madrasah dan GPAI yang sudah/ belum mengikuti PPG	97
Tabel 1.113	Jumlah Guru Madrasah dan Guru PAI pada Sekolah Umum tersertifikasi	97
Tabel 1.114	Jumlah tenaga pendidik lainnya pada madrasah bersertifikat kompetensi	98
Tabel 1.115	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	98
Tabel 1.116	Akreditasi Madrasah	98
Tabel 1.117	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	99
Tabel 1.118	Jumlah siswa berprestasi (talent pool), 2024	99
Tabel 1.119	Animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam	100
Tabel 1.120	Penyelenggaraan asesmen kompetisi siswa	100
Tabel 1.121	Rapor Pendidikan Madrasah Sumatera Barat	101
Tabel 1.122	IKSK meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	101
Tabel 1.123	Madrasah ramah anak/ramah layanan dan inklusi	102
Tabel 1.124	IKSK meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	102
Tabel 1.125	IKSK meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	103
Tabel 1.126	Daftar MOU Dengan Pihak Kedua	104
Tabel 1.127	IKSK meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	105
Tabel 1.128	IKSK meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	106
Tabel 1.129	Jumlah pegawai berdasarkan jabatannya	106
Tabel 1.130	IKSK meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	108
Tabel 1.131	Meningkatnya pengelolaan BMN akuntabel	109
Tabel 1.132	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	109
Tabel 1.133	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	110
Tabel 1.134	Nilai Pembangunan Zona Integritas, 2020-2024	110
Tabel 1.135	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	110
Tabel 1.136	Nilai IKPA 2020-2024	111
Tabel 1.137	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	112



Tabel 1.138	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	112
Tabel 1.139	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	113
Tabel 1.140	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	113
Tabel 1.141	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	114
Tabel 1.142	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	114
Tabel 1.143	Jumlah publikasi capaian kinerja	114
Tabel 1.144	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	115
Tabel 1.145	Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT Mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial (Tujuan 1)	116
Tabel 1.146	Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)	117
Tabel 1.147	Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan-3)	118
Tabel 1.148	Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT Mendukung peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (Tujuan-4)	120
Tabel 1.149	Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT Mendukung peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive (Tujuan-5)	124
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 1	131
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 2	131
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 3	133
Tabel 2.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 4	134
Tabel 2.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 5	136
Tabel 2.6	Rincian Kegiatan Mendukung Asta Protas Menteri Agama	138
Tabel 2.7	Managemen Resiko Pembangunan Nasional	141
Tabel 3.1	Target Kinerja di Tahun 2029	182
Tabel 3.2	Indikasi Kerangka Pendanaan Menurut Program dan Kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	188



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pembinaan Aktor Kerukunan di Sumatera Barat	25
Gambar 1.2	Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama	26
Gambar 1.3	Media Gathering KUB 2023	26
Gambar 1.4	Dialog antar umat beragama di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	31
Gambar 1.5	Kegiatan budaya berbasis agama	46
Gambar 1.6	Bimtek Petugas Kloter	66
Gambar 1.7	Penandatanganan Kerjasama Wakaf Madrasah dan Wakaf Jemaah Haji – Umrah	76
Gambar 1.8	Padang Kota Wakaf 2024	76
Gambar 1.9	Penandatanganan MOU Penanganan Masalah Hukum Bidang perdata dan Tata Usaha Negara	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Layanan Konsultasi Halal	58
------------	---------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BIM	: Bandara Internasional Minangkabau
BRUS	: Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
Daerah 3T	: Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKSK	: Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
KUA	: Kantor Urusan Agama
MRPN	: Manajemen Resiko Pembangunan Nasional
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Renstra-KL	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SATKER	: Satuan Kerja
SK	: Sasaran Kegiatan
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ZI	: Zona Integritas



Lampiran I : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025
Tentang
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian pembangunan bidang agama, pendidikan dan tata kelola sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024. Selain capaian-capaian kinerja, disadari bahwa dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir dan berbagai Focuss Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi pada periode Renstra 2020-2024 dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra 2025-2029

A. KONDISI UMUM

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020-2024, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil Nomor 428a Tahun 2020, merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, arah dan kebijakan strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sama dengan visi Kementerian Agama, yaitu :

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.





Makna dari visi ini adalah:

1. **Kementerian Agama yang profesional dan andal.** Kementerian Agama didukung oleh Aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.
2. **Membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.** Adalah produk, berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.
3. **Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.** Adalah masyarakat yang memberikan kontribusi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Untuk menyelaraskan dan mempertajam tugas dan fungsinya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan lima misi Kementerian Agama, yaitu

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan KUB;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; dan
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dan mendukung pencapaian 5 tujuan strategis Kementerian Agama, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (KUB);
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; dan
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra tahun 2020 – 2024, menetapkan 51 Sasaran Kegiatan (SK) dan 114 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) mendukung pencapaian Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020–2024. Berikut dijelaskan evaluasi, potensi dan permasalahan yang dibagi atas bidang agama, bidang pendidikan dan bidang tata kelola pemerintahan



A.1 Kondisi umum bidang agama

Dalam bidang agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan 3 tujuan Kementerian Agama, yaitu : Tujuan 1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; dan tujuan 2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB; dan tujuan 3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan

A.1.1 Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial

Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial

A.1.1.1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SK-1)

Peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial yang beragam. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berfokus pada penguatan kapasitas penyuluh agama, pembinaan dan pemberdayaan kelompok binaan, pembinaan dan bimbingan terhadap penyiar agama.

Tabel 1.1 : IKSK meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Nilai kinerja penyuluh agama	82	82	100
2	Persentase penyuluh agama yang dibina	70	70	100
3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensinya	40	40	100
4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	50	50	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Terdapat 4 IKSK yang menjadi ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

1. Nilai kinerja penyuluh agama

Penyuluh agama,, berperan sebagai pembimbing, pendidik, konsultan dan mediator di tengah masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ritual dan sosial. Ibadah ritual mencakup pelaksanaan tata cara peribadatan yang benar sesuai syariat, sementara ibadah sosial termanifestasi dalam perilaku etis, moral, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Rata rata nilai kinerja penyuluh agama (Islam Kristen, Hindu dan Buddha) tahun 2024 mencapai 85. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi e_PAJ (Penyuluh Agama Islam, aplikasi SIMPAKRIS (Penyuluh Agama Kristen), aplikasi SIM2KAT (Penyuluh Agama Katolik) dan aplikasi SUPENAA BUDDHA (Penyuluh Agama Buddha) pada



Kementerian Agama. Sedangkan Penyuluh Agama Hindu berdasarkan SE Dirjen Bimas Hindu Nomor 3 Tahun 2024, menggunakan eKinerja BKN.

Walaupun aplikasi untuk penilaian kinerja penyuluh belum dapat digunakan secara optimal, penilaian kinerja penyuluh agama (PNS dan P3K) menggunakan aplikasi eKinerja BKN, sama dengan PNS dan P3K lainnya

Tabel 1.2 : Pengukuran Kinerja Penyuluh

Jumlah Penyuluh (PNS, P3K) dan Non PNS		Menggunakan Aplikasi e PAI		Menggunakan Aplikasi SIMPAKRIS		Menggunakan Aplikasi SIM2KAT		e-Kinerja BKN (SE Dirjen Bimas Hindu Nomor 3 Tahun 2024)	Aplikasi SIPENA BUDDHA	
		S	B	S	B	S	B		S	B
Islam	1.480	-	1.480	-	-	-	-	-	-	-
Kristen	57	-	-	-	57	-	-	-	-	-
Katolik	63	-	-	-	-	60	3	-	-	-
Hindu	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Buddha	12	-	-	-	-	-	-	-	7	5

Keterangan : S = Sudah B = Belum

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Nilai kinerja penyuluh agama dipengaruhi juga oleh rasio penyuluh dengan jumlah penduduk. Keseimbangan jumlah penyuluh dengan jumlah penduduk mempengaruhi efektivitas kinerja penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan. Rasio yang ideal dapat meningkatkan kualitas bimbingan dan pencapaian target kinerja, karena memungkinkan penyuluh untuk fokus memberikan penyuluhan secara mendalam dan teratur kepada lebih sedikit sasaran. Sementara rasio yang tidak proporsional, akan menyulitkan pencapaian target bahkan dapat menurunkan nilai kinerja karena keterbatasan waktu dan sumber daya.

Tabel 1.3 : Jumlah penduduk, jumlah penyuluh agama dan rasio penyuluh agama dengan penduduk menurut agama di Sumatera Barat, 2024

No	Penduduk Menurut Agama *)		Penyuluh Agama (PNS, P3K) dan Non PNS **)	Rasio
1	Islam	5.678.121	1.480	1 : 3.837
2	Kristen	89.637	57	1 : 1.573
3	Katolik	48.995	63	1 : 1.485
4	Hindu	85	3	1 : 28
5	Buddha	3.231	12	1 : 269
6	Khonghuchu	7	-	-
7	Kepercayaan	283	-	-
Jumlah		5.820.359	1.615	1 : 3.603

Sumber : *) Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, halaman 395

**) Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Rasio penyuluh agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) dibandingkan jumlah umat beragama (penduduk) Sumatera Barat. 1 : 3.672, dimana rasio penyuluh agama Islam 1 : 3.837, Kristen 1 : 1.573, Katolik 1 : 1.485, Hindu 1 : 28, dan Buddha 1 : 269. Rasio ideal penyuluh dan umat beragama adalah 1:300,



Sedangkan pada umat khonghuchu, tidak ada penyuluh agama, penyiur agama dan kelompok sasaran penyuluh agama

Di tahun 2020–2024, pembinaan terhadap penyuluh agama diarahkan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh, memperluas cakupan sasaran secara inklusif, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat sinergi dengan program moderasi beragama. Pembinaan penyuluh agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) dilakukan pada 410 orang, bertujuan meningkatkan kinerja, kompetensi, dan wawasan mereka dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan pembinaan terhadap penyuluh agama

Tabel 1.4 : Pembinaan penyuluh agama

No	Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Penguatan Moderasi Beragama	130
2	Pembinaan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)	60
3	Pembinaan Penyuluh Agama Katolik	30
4	Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	30
5	Pembinaan Penyuluh Agama Islam (ASN, PPPK, dan Non-ASN)	80
6	Evaluasi Kinerja dan Serap Aspirasi Penyuluh Agama Islam se Sumatera Barat	80

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Pada Penganugerahan Penyuluh Agama Islam (PAI) Award yang diselenggarakan setiap tahunnya sebagai apresiasi Kementerian Agama terhadap kompetensi penyuluh, prestasi penyuluh agama Sumatera Barat :

- 1) Pada tahun 2023, Rapiun S.Ag (Penyuluh Agama Ahli Muda Kantor Kementerian Agama Kota Padang) berhasil masuk dalam 10 besar nominasi terbaik tingkat nasional.

<https://harianhaluan.id/baca/82816/rapiun-s-ag-penyuluh-agama-dengan-sederet-prestasi>

- 2) Pada Tahun 2024, Sumatera Barat berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus. Rusman Edi dari Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam kategori Pendampingan Kelompok Rentan dan Fitria Rahmi dari Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam kategori Penegakan Hukum.

- <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/bangga-dua-penyuluh-agama-islam-sumbar-raih-penghargaan-nasional> dan
- <https://infopublik.id/kategori/nusantara/863227/dua-penyuluh-agama-sumbar-raih-penghargaan-nasional-di-pai-award2024>

2. Kelompok sasaran penyuluh agama

Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama dan jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan tahun 2021-2024



Tabel 1.5 : Kelompok sasaran penyuluh agama

Tahun	Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama					Jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
2021	12.688	120	47	3	22	634	120	47	3	3
2022	12.644	100	32	3	23	633	100	32	3	3
2023	12.304	90	33	3	24	613	90	33	3	3
2024	11.804	310	33	3	25	592	310	33	3	3

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Persentase jumlah kelompok sasaran penyuluh agama yang diberdayakan ditahun 2024 sebesar 7,92%.

3. Pembinaan penyiar agama

Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI) di tahun 2024 diikuti 80 orang peserta yang terdiri dari penyiar dan influencer. Pada kegiatan tersebut, Rani Zuwe penyiar LPP RRI Padang terpilih menjadi Moderat Milineal Agent (MMA) Provinsi Sumatera Barat 2024

[https://rri.co.id/daerah/837228/penyiar-rri-padang-terpilih-sebagaimakemenag#:~:text=KBRN%2C%20Padang:%20Penyiar%20LPP%20RRI,I8/7/2024\).&text=Kata%20Kunci](https://rri.co.id/daerah/837228/penyiar-rri-padang-terpilih-sebagaimakemenag#:~:text=KBRN%2C%20Padang:%20Penyiar%20LPP%20RRI,I8/7/2024).&text=Kata%20Kunci)

A.1.2 Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)

Untuk mendukung tujuan 2: penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB, terdapat 13 SK (SK-2 sampai dengan SK-14) yang menjadi sasaran kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dengan penjelasan sebagai berikut :

A.1.2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama (SK-2)

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya kualitas perlindungan umat beragama dengan 3 IKS di Sumatera Barat dihadapkan pada **tantangan spesifik terkait isu kebebasan beragama dan insiden intoleransi**

<https://crs.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/73/download-manager-files/KBB-SUMBAR.pdf>

Tabel 1.6 : IKS meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti	100	100	100
2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	250	250	100
3	Jumlah desa/ kampung sadar kerukunan yang dibina	2	2	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



1. Kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti

Kasus pelanggaran hak beragama secara spesifik tidak pernah terjadi di Sumatera Barat yang berdampak pada kerukunan umat beragama. Insiden / kasus yang terjadi berupa :

Tabel 1.7 : Insiden / Kasus Sosial Keagamaan di Sumatera Barat

Tahun	Insiden/ Kasus	Penyelesaian
2021	Kasus jilbab siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, menjadi sorotan banyak kalangan, lokal maupun banyak pihak pada skala nasional hingga keluarnya SKB Tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama), Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. https://news.detik.com/berita/d5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf	Mediasi dan penyelesaian masalah, melalui forum dialog yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sumatera Barat, dihadiri FKUB Sumatera Barat, FKUB Kota Padang, Ombudsmad Sumatera Barat
2022	Pembubaran ibadah umat Kristen, di Banuaran, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Insiden dipicu penggunaan rumah kontrakan untuk kegiatan ibadah jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Solagracia Kampung Nias 3 Kota Padang https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdlg75exgkdo	FKUB Provinsi Sumatera Barat, mendorong penyelesaian kasus ini dilakukan dengan musyawarah dan dialog karena tidak ada unsur pelanggaran hak beragama yang terjadi
2024	Pembongkaran paksa Gereja Bethel di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh Kaabupaten Dharmasraya oleh PT. SAK. Informasi berita media massa, pembongkaran dilakukan oleh warga. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya, mengklarifikasi bahwa pembongkaran bukan dilakukan warga, melainkan dibongkar perusahaan (PT. SAK). Pihak perusahaan mengaku sama sekali tidak tahu keberadaan gereja tersebut. Para pihak yang membangun gereja ditanah perusahaan, sama sekali tidak meminta izin kepada perusahaan. Perusahaan kemudian memberikan teguran dan minta bangunan tersebut dirubuhkan, Karena teguran tidak mendapat respon, perusahaan mengambil tindakan melakukan pembongkaran paksa https://sumbarkita.id/terungkap-kronologi-pembongkaran-tempat-ibadah-di-dharmasraya/	Penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, karyawan, wali nagari, wali jorong dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya, Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya, Pihak perusahaan memfasilitasi transportasi karyawan untuk melakukan ibadah ke gereja terdekat



2. Pembinaan aktor kerukunan

Nilai indeks KUB Sumatera Barat dari tahun 2021-2024 yang dihasilkan melalui survei Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, menunjukkan tren peningkatan, walaupun jika dibandingkan dengan nilai indeks KUB nasional, masih berada di bawah rata rata.

Tabel 1.8 : Indeks KUB 2020-2024

Indeks KUB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Barat	-*)	67,87	63,42	71,58	70,87
Nasional	67,46	72,39	73,09	76,02	76,47

Sumber : https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

Berbagai kegiatan dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama sekaligus mendorong peningkatan nilai indeks KUB. Bersama pemerintah daerah, FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menyelenggarakan:

a. Pembinaan aktor kerukunan

Pembinaan terhadap aktor aktor kerukunan yang terdiri dari pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan dalam kegiatan kerukunan di Sumatera Barat sampai tahun 2024 berjumlah 250 orang

Tabel 1.9 : Jumlah Aktor Kerukunan

Keterangan	Tokoh Agama					Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat/ tokoh adat (aktor kerukunan) yang berperan dalam pembinaan kerukunan	127	41	27	3	7	45

Sumber : Tim Kerja KUB

Gambar 1.1 : Pembinaan Aktor Kerukunan di Sumatera Barat



Sumber : Tim Kerja KUB



b. Pembentukan Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama

Keanggotaan Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama berjumlah 1.585 orang terdiri dari penyuluh agama Islam, Kristen,, Katolik, Hindu dan Buddha di Sumatera Barat

Gambar 1.2 : Forum Pokja Penyuluh Lintas Agama



Sumber : Tim Kerja KUB

c. Cegah konflik-menjalin kebersamaan.

1) Jalan Sehat Kerukunan

<https://www.metrokini.com/2025/08/18/jalan-sehat-kerukunan-di-padang-satu-kan-ribuan-peserta-lintas-agama/>

2) Permbinaan Toleransi Beragama Lintas Suku di Padang Pariaman

<https://www.youtube.com/watch?v=LM2OoXVITH0>

3) Pembinaan kerukunan bagi umat Kristiani.

<https://www.klikislar.com/kemenag-dan-pgi-sinergi-perkuat-kerukunan-di-sumatera-barat/>

d. Media Gathering KUB 2023

Media masa dan insan jurnalis, memainkan peran penting dalam merawat KUB di Sumatera Barat. Media massa dengan cepat memviralkan terjadinya peristiwa intoleransi dan sekaligus mencounter isu isu/ peristiwa yang tidak sesuai kebenarannya

Gambar 1.3 : Media Gathering KUB 2023



Sumber : Tim Kerja Hukmas



Media Gathering KUB 2023, sebagai wadah penyampaian informasi berbagai isu strategis dan berbagai rekomendasi kebijakan atas pentingnya merawat KUB di Sumatera Barat

<https://klikpositif.com/kepala-pusat-kerukunan-umat-beragama-minta-jurnalis-sumbar-hadirkan-berita-menyejukkan/>

3. Desa kerukunan

Desa kerukunan adalah sebuah desa yang menjadi percontohan dalam menjaga toleransi dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam, baik dalam hal agama, adat, tradisi, maupun budaya. Konsep ini mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam kegiatan pembangunan, dengan tetap berpegang pada prinsip kebersamaan.

Di tahun 2024, ditetapkan **lima lokasi** yang telah diidentifikasi dan dibina sebagai Desa Sadar Kerukunan di Sumatera Barat

Tabel 1.10. : Desa Kerukunan di Sumatera Barat

Tahun	Nama Desa Kerukunan	Dasar Penetapan
2020	1. Desa Mahakarya di Kabupaten Pasaman Barat	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 550 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020)
	2. Desa Sikabau Kabupaten Dharmasraya	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 553 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020
	3. Desa Purwajaya di Kabupaten Limapuluh Kota	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 554 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020
2023	4. Nagari Sungai Buluh Barat Kabupaten Padang Pariaman	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 816 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023
2024	5. Kelurahan Belakang Pondok di Kota Padang	SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 156 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024

Sumber : Tim Kerja KUB

Perbedaan agama dan keragaman suku penduduk di lima lokasi desa kerukunan tidak menjadi pembeda, tetapi justru memperkaya komunitas diantara mereka. Gotong royong dan saling menghormati telah menjadi ciri khas masyarakat. Saling membantu antar tetangga, terlepas dari keyakinan atau latar belakang mereka. Bahwa, perbedaan menyatukan daripada memisahkan mereka.

4. Kampung Moderasi Beragama (KMB)

Salah satu strategi implementasi moderasi beragama adalah melalui pembentukan dan pengembangan KMB. **39 lokasi KMB di Sumatera Barat**



Tabel 1.11 : Kampung Moderasi Beragama di Sumatera Barat

No	Nama Desa/Nagari/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	Nagari Balal Gurah	Ampek Angkek	Kabupaten Agam
3	Nagari Sikabau	Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
4	Nagari Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	Kabupaten Dharmasraya
5	Desa Talkako	Sikakap	Kabupaten Kep. Mentawai
6	Desa Sido Makmur	Sipora Utara	Kabupaten Kep. Mentawai
7	Nagari Gunuang Malintang	Pangkalan Koto Baru	Kabupaten Lima Puluh Kota
8	Nagari Tanjung Bungo	Suliki	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Nagari Sungai Buluah Barat	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
10	Nagari Koto Tinggi	Enam Lingkung	Kabupaten Padang Pariaman
11	Jorong Sentosa	Padang Gelugur	Kabupaten Pasaman
12	Jorong Cengkeh	Panti	Kabupaten Pasaman
13	Kampung Teluk Kasai, Koto Nan 2 Koto Hilia	Batang Kapas	Kabupaten Pesisir Selatan
14	Kampung Lereng Bukit, Gurun Panjang	Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan
15	Jorong Kandang Harimau, Nagari Sijunjung	Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
16	Jorong Pandam, Nagari Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	Kabupaten Sijunjung
17	Nagari Bukit Tandang	Bukit Sundi	Kabupaten Solok
18	Jorong Slangal-Anggai, Alahan Tigo	Hiliran Gumanti	Kabupaten Solok
19	Nagari Pakan Rabaa Timur	KPGD	Kabupaten Solok Selatan
20	Nagari Pasir Talang Selatan	Sungai Pagu	Kabupaten Solok Selatan
21	Nagari Andaleh	Batipuh	Kabupaten Tanah Datar
22	Nagari Simawang	Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
23	Nagari Padang Canduh	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
24	Kampung 2 Mahakarya, Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
25	Kelurahan Belakang Balok	Aur Birugo Tigo Baleh	Kota Bukittinggi
26	Kelurahan Kubu Gulai Bancah	MKS	Kota Bukittinggi
27	Kelurahan Kampung Olo	Nanggalo	Kota Padang
28	Kelurahan Jati Baru	Padang Timur	Kota Padang
29	Kelurahan Tanah Pak Lambik	Padang Panjang Timur	Kota Padang Panjang
30	Kelurahan Tanah Hitam	Padang Panjang Barat	Kota Padang Panjang
31	Cimparuh	Pariaman Tengah	Kota Pariaman
32	Kampung Baru	Pariaman Tengah	Kota Pariaman
33	Desa Bungo Tanjung	Pariaman Timur	Kota Pariaman
34	Kelurahan Tanah Lapang	Lembah Segar	Kota Sawahlunto
35	Desa Sikalang	Talawi	Kota Sawahlunto
36	Kelurahan VI Suku	Lubuk Sikarah	Kota Solok
37	Kelurahan Kampung Jawa	Tanjung Harapan	Kota Solok
38	Kelurahan Koto Tangah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
39	Kelurahan Ompang Tanah Sirah	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh

Sumber: Lampiran IV-Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 604 Tahun 2024

A.1.2.2 Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa (SK-3)

Terdapat 2 IKS K untuk mengukur keberhasilan menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu IKS K Jumlah lembaga agama, organisasi sosial



keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi dan IKS jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan. Selama tahun 2020-2024 telah menunjukkan pencapaian yang baik.

Tabel 1.12 : IKS penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi	45	45	100
2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	55	55	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Berbagai upaya fasilitasi lembaga agama dan organisasi sosial keagamaan dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat peran kelembagaan dalam membangun harmoni sosial. Fasilitasi melalui dukungan kelembagaan, pendampingan administrasi, pelatihan manajemen organisasi, dan dialog lintas iman di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan Forum Dialog Antar Umat Beragama (FAUB) juga dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Forum ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, pimpinan ormas, FKUB, dan tokoh masyarakat guna membahas isu toleransi, moderasi beragama, serta resolusi konflik berbasis adat dan nilai lokal.

Selain itu, dilakukan penguatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui pembinaan yang menjangkau seluruh kabupaten/kota. Kegiatan berfokus pada penguatan kapasitas tokoh agama dalam menyebarkan nilai moderasi beragama, pemberdayaan perempuan dan pemuda lintas iman, serta pelatihan mediator konflik sosial—keagamaan yang melibatkan tokoh agama dan adat. Kolaborasi strategis dengan Pemerintah Daerah dan FKUB diwujudkan melalui dialog moderasi dan kebangsaan, serta workshop revitalisasi peran tokoh agama dalam pencegahan konflik sosial, mencerminkan pendekatan *whole-of-society*. Upaya publikasi dan edukasi moderasi beragama juga diperkuat melalui media sosial dan portal berita resmi, menampilkan berbagai pesan yang menekankan pentingnya sinergi tokoh agama, ormas, dan FKUB dalam memperkokoh kerukunan serta kohesi sosial masyarakat Sumatera Barat

Tabel 1.13 menunjukkan bahwa fasilitasi terhadap lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat berjalan optimal, ditandai dengan realisasi 100% pada dukungan kelembagaan serta peningkatan signifikan pada pelaksanaan forum dialog antar umat beragama yang mencapai 100% dari target. Dampak langsung dari capaian ini terlihat pada semakin kuatnya peran aktor-aktor keagamaan dalam membangun harmoni sosial, memperluas ruang dialog lintas iman, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah sosial-keagamaan secara kolaboratif.

Selain itu, inovasi yang muncul meliputi penguatan model pendampingan kelembagaan berbasis kolaborasi, peningkatan frekuensi dialog melalui pendekatan tematik yang relevan dengan isu lokal, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan



pemuka agama, pemuda, dan perempuan, sehingga menghasilkan sinergi multipihak dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Lembaga agama/ organisasi sosial keagamaan

Berbagai kegiatan dilakukan kepada lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Pada tahun 2024, sebagai bentuk fasilitasi terhadap lembaga agama dan sosial keagamaan, disalurkan BOP pada BWI Sumatera Barat sebesar Rp, 100 Juta,-

Tabel 1.13 : Jumlah lembaga agama dan organisasi sosial keagamaan

Agama	Lembaga Keagamaan	Organisasi Sosial Keagamaan	Jumlah
Islam	5	38	43
Kristen	5	4	9
Katolik	1	5	6
Hindu	1	1	2
Buddha	4	5	9

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Tim Kerja KUB dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

2. Penyelenggaraan forum dialog antar umat beragama

Tabel 1.14 : Kegiatan dialog antar umat beragama

Kegiatan	Tahun/ Tempat Kegiatan	
	2023	2024
Dialog lintas agama yang diselenggarakan	- Provinsi Sumatera Barat - Kota Padang - Kota Solok - Kota Payakumbuh - Kabupaten Dharmasraya - Kabupaten Sijunjung - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Pasaman	- Provinsi Sumatera Barat - Kota Padang - Kota Bukittinggi - Kota Pariaman - Kota Payakumbuh - Kota Padang Panjang - Kabupaten Dharmasraya - Kabupaten Sijunjung - Kabupaten Solok - Kabupaten Lima Puluh Kota - Kabupaten Pasaman Barat - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Pasaman

Sumber : Tim Kerja KUB

- a. Dialog antar pemuka agama di Bukittinggi, diikuti 80 orang peserta

<https://rri.co.id/daerah/1875069/fkub-bukittinggi-gelar-dialog-tokoh-antar-umat-beragama>

- b. Dialog lintas agama di Padang Panjang, diikuti 60 orang peserta

<https://www.fajar.sumbar.com/2024/09/fkub-padang-panjang-lakukan-dialog.html>



- c. Dialog antar umat beragama di Padang Pariaman, diikuti 60 orang peserta lintas iman

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/dialog-kub>

Gambar 1.4 : Dialog antar umat beragama di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Tim Kerja Hukmas

- d. Dialog kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tanah Datar, diikuti 60 orang peserta

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/637385/fkub-kabupaten-toba-gelar-dialog-kerukunan-antar-umat-beragama?video=>

- e. Kegiatan Silaturahmi Daerah (Silatda) Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Provinsi Sumatera Barat yang difokuskan pada Penguatan Kerukunan Beragama, salah satu bentuk fasilitasi terhadap lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah dilakukan

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/silatda-tokoh-agama-dan-lembaga-keagamaan>

A.1.2.3 Menguatnya peran FKUB (SK-4)

Berbagai upaya fasilitasi dan penguatan Sekretariat Bersama (Sekber) FKUB terus dilakukan, melalui dukungan operasional, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas SDM. Sejak tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 18 FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan Bantuan Operasional (BOP) secara konsisten, mencakup dukungan peralatan kantor, ATK, kegiatan dialog lintas iman, mediasi, advokasi kasus keagamaan, serta penguatan penyusunan laporan BOP

Seluruh FKUB tercatat telah memperoleh peningkatan layanan secara penuh (100%). Penguatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan dan workshop berkelanjutan, seperti Pelatihan Pengelolaan Konflik Sosial Berbasis Moderasi Beragama (2021–2022), Workshop Penguatan FKUB dalam Pencegahan Konflik Sosial (2023), serta Rapat Koordinasi FKUB yang berfokus pada efektivitas penggunaan BOP.



Tabel 1.15 : IKS K penguatan peran FKUB

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	20	18	90

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

FKUB di Sumatera Barat berjumlah 18 lembaga. 1 di tingkat provinsi dan 17 pada Kabupaten/ Kota

Tabel 1.16 : Jumlah Lembaga FKUB di Sumatera Barat

No	FKUB
1	FKUB Provinsi Sumatera Barat
2	FKUB Kota Padang
3	FKUB Kota Padang Panjang
4	FKUB Kota Bukittinggi
5	FKUB Kota Payakumbuh
6	FKUB Kota Solok
7	FKUB Kota Sawahlunto
8	FKUB Kota Pariaman
9	FKUB Kabupaten Padang Pariaman
10	FKUB Kabupaten Solok
11	FKUB Kabupaten Sijunjung
12	FKUB Kabupaten Solok Selatan
13	FKUB Kabupaten Lima Puluh Kota
14	FKUB Kabupaten Pasaman
15	FKUB Kepulauan Pasaman Barat
16	FKUB Kabupaten Solok Selatan
17	FKUB Kabupaten Dharmasraya
18	FKUB Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber : Tim Kerja KUB

Di tahun 2024, telah disalurkan BOP pada 18 FKUB, untuk FKUB Provinsi dan 17 FKUB Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Sedangkan FKUB pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar belum terbentuk dan menjadi target pembentukan ditahun mendatang

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/kapus-kub-dorong-sumbar-percepat-pembentukan-fkub-tanah-datar-dan-pesisir-selatan>

Melalui BOP telah meningkatkan kinerja FKUB dalam menjaga kerukunan beragama di Sumatera Barat. BOP memungkinkan Sekber berfungsi lebih optimal dalam melaksanakan program-programnya.



Berbagai peran FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/ Kota

1. Pembinaan/ sosialisasi moderasi beragama

Bersama FKUB Provinsi Sumatera Barat dan FKUB Kabupaten/ Kota, mensosialisasi kan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama untuk membentengi generasi muda dari ancaman radikalisme dan memperkuat toleransi.

a. Kegiatan bersama FKUB Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.17 : Pembinaan Moderasi Beragama di Sumatera Barat

No	Tema Kegiatan	Jumlah Peserta	Sasaran Kegiatan
1	Penguatan Moderasi Beragama	180	Tokoh agama, masyarakat, pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat dan pengurus FKUB Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
2	Bimbingan teknis moderasi beragama bagi penghulu	90	Kepala KUA dan penghulu perwakilan kabupaten kota
3	Penguatan Moderasi Beragama pada Lembaga Keagamaan Buddha	55	Ketua dan pengurus lembaga Keagamaan Buddha
4	Pembinaan Moderasi Beragama bagi siswa pendidikan agama Buddha	120	Siswa-siswa beragama Buddha
5	Dialog Moderasi intern umat Kristen	120	Pimpinan gereja

Sumber : Tim Kerja KUB

b. Diantara kegiatan bersama FKUB Kabupaten / Kota

1) Penguatan Moderasi Beragama di Sawahlunto

<https://putraindonesia.com/nusantara/suara-daerah/hadirkan-ketua-fkub-sumbar-kemenag-gelar-penguatan-moderasi-beragama/>

2) Sosialisasi Moderasi Beragama di Kabupaten Solok

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/jelang-pilkada-2024-fkub-kabupaten-solok-gelar-sosialisasi-mode-rasi-beragama>

2. Pencegahan konflik

Sebagai mediator, fasilitator dialog, dan koordinator yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Dialog pencegahan konflik tahun 2023 di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam.. Di tahun 2024 dialog pencegahan konflik dilakukan FKUB Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar

3. Mediator konflik

Sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan potensi perselisihan atau konflik antar umat beragama, sering kali dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.



<https://seputarsumbar.com/fkub-padang-mediiasi-wujudkan-kesepakatan-damai-warga-padang-sarai/>

4. Respons terhadap isu kekinian

FKUB cepat tanggap terhadap dinamika sosial politik dan isu-isu kekinian, mengimbau masyarakat untuk tetap bijak, menjaga persatuan, dan menyampaikan aspirasi secara elegan.

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/edy-oktafiandi-kupas-tuntas-moderasi-beragama-pada-dialog-tokoh-fungsional-antar-lintas-agama-kota-padang-tahun-2024>

SETARA Institut merilis **Indeks Kota Toleran (IKT) 2024**. Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, termasuk salah satu kota yang dalam beberapa episode IKT sebelumnya, menduduki peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah. Favoritisme kebijakan menjadi salah satu pekerjaan rumah, beserta ekspresi yang mengarah kepada mayoritarianisme masyarakat. Namun, perlahan tapak kaki menuju ekosistem toleransi mulai terlihat. Di antaranya FKUB Kota Padang membangun berbagai ruang dialog dan perjumpaan lintas agama, serta studi banding ke kota-kota yang dianggap relevan dengan isu toleransi beragama. Pemerintah Kota, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakilnya, juga menaruh perhatian yang serius dalam hal ini, termasuk dengan mengapresiasi FKUB dengan acara temu lintas umat beragama. Elemen masyarakat sipil juga memberikan pengaruh signifikan dalam pemajuan toleransi di Kota Padang. Bahkan kerap menjadi penghubung atau jembatan dialog-dialog pemerintah kota dengan berbagai kalangan masyarakat terkait itu toleransi

Misalnya yang dilakukan Pelita Padang dengan menggandeng FKUB Kota Padang, menyelenggarakan “Dialog Tokoh Pemuda Lintas Agama: Menuju Padang Kota Moderasi Beragama” pada 16 Oktober 2024. Lalu menjelang Pemilu 2024, para calon legislatif (Caleg) berbincang-bincang dengan Pelita Padang, komunitas-komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat. Dalam konteks ekosistem toleransi, hal ini menunjukkan kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership) yang promotif terhadap pembenahan toleransi di Kota Padang

Sumber : Indeks Kota Toleran 2024, halaman 42, Setara Institute

A.1.2.4 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama (SK-5)

Pembinaan kerukunan intra umat beragama di Sumatera Barat merupakan proses berkelanjutan yang mengedepankan kolaborasi, dialog, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama untuk menciptakan harmoni sosial yang langgeng dengan IKSKnya persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dan jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan



Tabel 1.18 : IKSK peningkatan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	70	70	100
2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	5	5	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Pembinaan kerukunan intra umat beragama terhadap lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat

- a. Pembinaan kerukunan. Salah satu kegiatan pembinaan yang pernah diadakan dan melahirkan "Deklarasi Cinta Kerukunan" yang melibatkan 1.500 tokoh dan umat beragama se-Sumatera Barat. Acara semacam ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kerukunan

<https://sumbar.antaranews.com/berita/548349/tokoh-lintas-agama-sumbar-deklarsi-damai-umat-beragama>

- b. Penyuluhan dan pembinaan internal. Tokoh agama dan ASN di lingkungan Kementerian Agama, diberikan pembinaan secara internal untuk memperkuat iman masing-masing umat, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kerukunan yang lebih luas.

2. Dialog intra umat beragama

Bersama FKUB Provinsi menyelenggarakan dialog dengan pemuka dan tokoh masyarakat dari berbagai agama, untuk memberikan pemahaman, menampung aspirasi, dan menyelesaikan potensi konflik di tingkat awal.

A.1.2.5 Meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama (SK-6)

Peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluh agama dilakukan untuk memperkuat peran penyuluh sebagai garda terdepan pembina umat. Upaya ini diarahkan untuk menumbuhkan sikap keberagamaan yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui berbagai program pelatihan, bimtek, dan forum dialog lintas agama, para penyuluh agama dibekali dengan wawasan kebangsaan, keterampilan komunikasi, serta pendekatan dakwah yang inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan masing-masing.

Selain penguatan kapasitas individu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga mendorong inovasi dalam pelaksanaan penyuluhan berbasis komunitas dan digital. Pemanfaatan media sosial, konten edukatif, serta kolaborasi dengan tokoh lintas agama dan lembaga sosial menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan dampak pesan moderasi beragama. Langkah ini tidak hanya memperkuat citra positif Kementerian Agama sebagai lembaga pembina kerukunan umat, tetapi juga



menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial dan kehidupan beragama yang damai, rukun, serta berkeadilan di Sumatera Barat

Tabel 1.19 : IKS K peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluh agama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	65	65	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Berbagai pembinaan, bimbingan dan sosialisasi untuk memastikan penyuluh menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama telah dilakukan

1. Pembinaan di tingkat kabupaten/ kota

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh, secara rutin mengadakan pembinaan bagi penyuluh agama (baik PNS maupun non-PNS). Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat peran penyuluh sebagai garda terdepan dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang moderat, menjaga harmoni, dan merawat kerukunan umat beragama di tengah masyarakat multikultural.

2. Peningkatan kompetensi dan wawasan

Menyelenggarakan pembinaan khusus untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan moderasi beragama bagi kelompok penyuluh agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

A.1.2.6 Meningkatkan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran (SK-7)

Rumah ibadah tidak hanya diposisikan sebagai tempat ritual keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan umat yang menanamkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Melalui program pembinaan pengurus rumah ibadah, fasilitasi dialog lintas agama, serta penguatan peran tokoh agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berupaya memastikan bahwa rumah ibadah mampu menjadi contoh nyata praktik moderasi beragama di tengah masyarakat yang multikultural.

Tabel 1.20 : IKS K peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase rumah ibadah yang ramah	37,50	37,50	100
2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	71,75	71,75	100
3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkat kan mutunya	90,00	90,00	100
4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	28,00	28,00	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



Pengelolaan rumah ibadah juga diarahkan agar lebih profesional, transparan, dan inklusif melalui penerapan manajemen berbasis partisipasi dan akuntabilitas. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mendorong inovasi dalam pemanfaatan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan yang terbuka bagi semua kalangan. Inisiatif seperti pelatihan manajemen rumah ibadah, digitalisasi administrasi, serta kolaborasi lintas komunitas menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi rumah ibadah sebagai simpul persatuan dan harmoni sosial di Sumatera Barat

Peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran menunjukkan dampak yang sangat positif, dibuktikan dengan tercapainya 100% realisasi pada kedua indikator—rumah ibadah yang ramah serta pengelola rumah ibadah yang dibina. Dampak nyata dari capaian ini terlihat pada meningkatnya lingkungan rumah ibadah yang inklusif, aman, dan responsif terhadap keberagaman, sehingga rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat ritual, tetapi juga ruang edukasi sosial, penguatan toleransi, dan pengembangan harmoni antarkomunitas. Selain itu, pembinaan yang merata kepada seluruh pengelola rumah ibadah memperkuat kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pelayanan keagamaan, serta penanganan potensi gesekan sosial secara preventif.

Inovasi program tercermin dari pendekatan pembinaan yang semakin adaptif, terstruktur, dan berbasis kebutuhan lapangan. Program berhasil mengintegrasikan pelatihan moderasi beragama, peningkatan literasi toleransi, serta penguatan manajemen rumah ibadah melalui metode bimbingan langsung, lokakarya tematik, dan sinergi dengan organisasi keagamaan lokal. Inovasi lainnya adalah pemanfaatan instrumen monitoring-evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, sehingga upaya pembinaan dapat dipastikan berjalan konsisten sesuai standar pelayanan minimal. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengelola rumah ibadah, dan tokoh agama turut menjadi kunci keberhasilan transformasi rumah ibadah menjadi pusat syiar yang menyejukkan dan mendorong penguatan nilai toleransi di masyarakat.

Dari tahun 2020-2024 pencapaian kinerja pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran menunjukan kinerja yang baik

1. Rumah ibadah ramah

Gerakan rumah ibadah yang ramah, tidak hanya mencakup keramahan secara spiritual, tetapi juga keramahan dalam aspek fisik dan sosial, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Terdapat 304 masjid yang disiapkan sebagai "Masjid Ramah" di tahun 2024 dengan sebarannya terdapat di 10 Kabupaten/ Kota

Tabel 1.21 : Jumlah masjid ramah musafir

Lokasi Masjid		Jumlah
1	Kota Padang	29
2	Kota Bukittinggi	20
3	Kota Payakumbuh	32
4	Kabupaten Dharmasraya	12
5	Kabupaten Sijunjung	8



Lokasi Masjid		Jumlah
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	28
8	Kabupaten Pasaman Barat	18
9	Kabupaten Pasaman	71
10	Kabupaten Agam	86

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

Di Kota Padang, inisiatif menjadikan seluruh Masjid dan Mushala Ramah Anak didorong oleh pemerintah daerah dan pengurus masjid yang memandang masjid sebagai tempat strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang ramah anak, bebas dari unsur kekerasan, dan menyediakan ruang yang aman untuk tumbuh kembang mereka.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/528245/pengurus-masjid-di-padang-sepakati-terwujudnya-masjid-ramah-anak>

Di ajang **Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (Ampera)** yang digelar di Solo, Jawa Tengah 2024, tiga masjid dari Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan tingkat nasional

- Masjid Raya Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat (peringkat 3 nasional, kategori Masjid Raya Percontohan)
- Masjid Akbar Galo Gandang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar (peringkat 2 nasional, kategori Masjid Keragaman)
- Masjid Al Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang (peringkat 2 nasional, kategori Masjid Publik)

<https://sumbar.antaranews.com/berita/628239/sepuluh-masjid-di-sumbar-raih-ampera-award>

2. Pembinaan terhadap Imam dan Takmir Masjid

- Pembinaan terhadap pengelola imam masjid di Sumatera Barat dilakukan untuk memastikan imam memahami fikih shalat, mampu membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tartil, serta memiliki wawasan keagamaan yang mendalam. Jumlah peserta 45 orang
- Pembinaan terhadap takmir masjid, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kanwil dan FKUB, difokuskan pada **penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan manajemen rumah ibadah, dan pemahaman regulasi terkait pendirian tempat ibadah**. Jumlah peserta 45 orang

<https://radarsumbar.com/baca/62786/kemenag-sumbar-minta-imam-dan-takmir-masjid-ikut-berperan-bangun-kekuatan-moderasi-beragama/>

A.1.2.7 Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik (SK-8)

Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik di Sumatera Barat menggambarkan sebuah lanskap keagamaan yang aktif dan dinamis, di mana berbagai pihak, dari pemerintah hingga komunitas lokal, berupaya mengartikulasikan nilai-nilai



keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sambil tetap menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Target dan realisasi jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media masa dan ruang publik tercantum pada tabel 1.22

Tabel 1.22 : IKSK peningkatan kegiatan penyiaran agama di ruang publik

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	19	19	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Aktivitas penyiaran atau ekspresi keagamaan di ruang publik, baik melalui media massa konvensional maupun platform digital menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakan lagi. Hal ini bertujuan untuk menangkalkan konten negatif dan radikalisme, sekaligus meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat yang berwawasan moderat.

Menjadi target kinerja bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025-2029, untuk mendorong lembaga pendidikan keagamaan, KUA Kecamatan dan penyuluh agama, untuk aktif mengisi ruang media sosial. Penyuluh dan penyiar agama, muballigh, ustadz sebagai ujung tombak syiar agama aktif mengisi platform digital dengan kegiatan-kegiatan kepenyuluhan sosial-keagamaan. Pemanfaatan platform digital dalam mendukung penyiaran agama di ruang publik telah dilakukan sejak tahun 2021

Tabel 1.23 : Jenis siaran keagamaan, jumlah penyiar agama serta materi siaran.

Agama	Siaran keagamaan		Jumlah Penyiar	Materi siaran
	Platform digital	Jenis		
Islam	1. Youtube Don't Podcast Too Much Episode-9 (https://youtube/JgUfr3DelY)	Talkshow	3	Beda Boleh, Damai Harus (Moderasi Beragama)
	2. Youtube Kanwil Kemenag Sumbar (https://youtube/rT6SLpz41cQ?s=oKqA6bLo2Isa-Utd)	Liputan religi	12	Sumatera Barat, Beragam Suku dan Agama : Toleransi Sudah Pakaian Membudaya Kehidupan Bermasyarakat
		Liputan	6	• Jalan Sehat Kerukunan • Arena arena MTQ Nasional 2020 di Sumatera Barat
		Film pendek	5	• Manigo Hari (Moderasi Beragama)
			5	• Baralek Khitan (Moderasi Beragama)
		Ceramah	90	90 Episode Ceramah Ramadhan (2022-2024)
	1. TVRI Padang	Talkshow Liputan religi Dokumenter Ceramah	14	• Bincang Moderasi Beragama • Bincang Haji, Bincang Potensi Dana Umat dan Ceramah Ramadhan



Agama	Siaran keagamaan		Jumlah Penyiarnya	Materi siaran
	Platform digital	Jenis		
	2. Padang TV	Talkshow Liputan religi Dokumenter Ceramah	9	• Liputan Kegiatan Santri • Bincang Moderasi Beragama • Bincang Haji
	3. RRI Padang	Ceramah, Liputan Religi, Dialog	25	Moderat Milineal
Buddha	Tiktok (https://www.tiktok.com/@pate7?_r=1&_t=ZS91lq3Ewfse)	Ceramah	12	Penyuluhan Agama Buddha

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa, Tim Kerja Hukmas dan Bimas Buddha

A.1.2.8 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama (SK-9)

Penerapan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran agama di madrasah, sekolah umum, dan sekolah keagamaan dilaksanakan untuk memastikan peserta didik memahami ajaran agama secara proporsional dan kontekstual, mengembangkan sikap toleran, cinta tanah air, serta menghargai perbedaan, sehingga mampu menjadi agen harmoni sosial baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Program ini dilakukan secara sistematis melalui tiga pilar utama, yakni penguatan kapasitas guru dan pengawas pendidikan agama melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi pedagogik; integrasi muatan moderasi beragama dalam kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran, dan metode penyampaian materi; serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan karakter moderat, seperti dialog lintas iman, proyek kolaboratif, dan kegiatan pembinaan karakter berbasis toleransi di madrasah maupun sekolah umum.

Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama, tidak hanya sebagai tambahan materi, melainkan sebagai inti dari proses pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik yang moderat. Kurikulum pendidikan agama didorong untuk mengintegrasikan empat indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Integrasi ini dilakukan baik secara eksplisit melalui materi pelajaran maupun melalui hidden curriculum dalam bentuk pembiasaan dan budaya sekolah yang inklusif.

Tabel 1.24 : IKSK penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	85,00	85,00	100
2	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	30,25	30,25	100



INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
3	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	14,50	14,50	100
4	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	32,50	32,50	100
5	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	22,59	22,59	100
6	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	24,41	24,41	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama

Siswa baru di madrasah, dibekali pengetahuan moderasi beragama, karakter bangsa, dan literasi digital sejak masa orientasi (MATSAMA). Tujuannya agar siswa madrasah memahami bahwa perbedaan keyakinan adalah keniscayaan yang harus disikapi dengan saling menghargai, bukan saling mengunggulkan

2. Pembinaan dan penguatan Moderasi Beragama kepada Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas

Pembinaan moderasi beragama kepada Kepala Madrasah, Guru, dan Pengawas bertujuan untuk membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam dan komitmen terhadap nilai-nilai toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan anti-kekerasan.

Melalui pembinaan, para pendidik dan pengawas memperoleh panduan konkret mengenai cara mengintegrasikan prinsip-prinsip moderasi beragama ke dalam materi Pendidikan Agama Islam (PAI). Pengawas, berperan mengoptimalkan supervisi akademik dan menjadi motivator bagi guru PAI untuk mengembangkan pembelajaran berbasis moderasi beragama. Guru menerapkan metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inklusif (seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan kegiatan sosial) untuk memudahkan siswa memahami ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*.

Tabel 1.25 : Penguatan Moderasi Beragama

No	Keterangan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah siswa madrasah yang mendapatkan penguatan pemahaman Moderasi Beragama melalui kegiatan MATSAMA	52.205	55.023	59.189	59.189
	a. Siswa MTs	38.467	40.543	43.613	44.482
	b. Siswa MA	13.738	14.480	15.576	15.887
2	Jumlah Kepala dan Guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	5.949	6.635	7.165	7.552
	a. MI	948	940	1.051	1.122
	b. MTs	3.085	3.840	4.107	4.267
	c. MA	1.916	1.855	2.007	2.163



No	Keterangan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Pengawas Madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	61	64	96	105
4	Jumlah Guru Pendidikan Agama pada sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	80	80	120	1507

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

3. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di madrasah

a. Diskusi dan kajian keagamaan

Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami perbedaan keyakinan secara sehat dan menumbuhkan toleransi. Sesi diskusi kelompok dengan tema-tema keagamaan dan sosial menjadi sarana efektif untuk membangun dialog dan pemahaman bersama.

b. Kegiatan sosial berbasis kebaikan

Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti mengumpulkan sumbangan dari sisa uang jajan untuk membantu yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan nilai berbagi dan rasa syukur, serta menumbuhkan empati dan kebersamaan di antara mereka.

c. Penanaman nilai melalui kegiatan kreatif

Beberapa madrasah menyelenggarakan kegiatan seperti "Gelar Karya" bertema "Ragam Tradisi di Kampungku" yang menekankan Kebhinekaan Global. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk menghormati budaya lokal dan berbagai tradisi yang ada di sekitarnya.

d. Pembentukan karakter dan kepemimpinan terintegrasi

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti *Habsyi*, *Rebana*, dan *Tahfiz* tidak hanya melatih kemampuan artistik dan keagamaan, tetapi juga membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik, kreatif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/647617/siswi-man-solok-ikuti-inisiator-mu-da-moderasi-beragama-tingkat-nasional>

Tabel 1.26 : Jumlah kegiatan ekstrakurikuler moderasi beragama di madrasah/ sekolah umum tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Kegiatan Ekstrakuler Moderasi Beragama			
	Diskusi dan kajian keagamaan	Kegiatan sosial berbasis kebaikan	Penanaman nilai kebaikan melalui kegiatan kreatif	Pembentukan karakter dan kepemimpinan
Madrasah				
MTs	4	3	10	3
MA	4	3	10	3



Jenjang Pendidikan	Kegiatan Ekstrakurikuler Moderasi Beragama			
	Diskusi dan kajian keagamaan	Kegiatan sosial berbasis kebaikan	Penanaman nilai kebaikan melalui kegiatan kreatif	Pembentukan karakter dan kepemimpinan
Sekolah Umum				
SLTP	-	-	-	-
SLTA	1	1	1	1
Jumlah	9	7	21	7

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

A.1.2.9 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam (SK-10)

Upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai sasaran kegiatan menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam adalah dengan melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala, baik dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan forum-forum yang mengkoordinasi lembaga pendidikan keagamaan seperti BADKO LPQ, Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Sumatera Barat. Capaian realisasi kinerja pada tabel 1.27

Tabel 1.27 : IKS K penguatan peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	61,25	61,25	100
2	Persentase peningkatan pe serta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	51,75	51,75	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan diniyah dan pondok pesantren diharapkan dapat meningkatkan kemampuan santri dalam memahami dan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dengan kemampuan untuk membaaur dan meningkatkan peran di masyarakat.

A.1.2.10 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya (SK-11)

Tabel 1.28 : IKS K penguatan dialog lintas agama dan budaya

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah dialog lintas agama budaya yang diselenggarakan		4	4	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Dialog lintas agama dan budaya merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian Agama, bersama pemerintah daerah, FKUB dan komunitas masyarakat, untuk memperkuat toleransi, mereduksi prasangka, dan mempromosikan moderasi beragama di Sumatera Barat. Capaian SK-11 didukung oleh pencapaian IKS K : Jumlah



dialog lintas budaya yang diselenggarakan. Berbagai kegiatan diselenggarakan bersama Pemerintah Daerah, untuk memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya:

1. Deklarasi Damai Umat Beragama

Para tokoh lintas agama di Sumatera Barat telah mendeklarasikan komitmen untuk menjaga perdamaian dan menolak politisasi tempat ibadah

<https://khazanah.republika.co.id/berita/roijf5320/tokoh-lintas-agama-sumbar-sepakat-hindari-aktivitas-politik-di-rumah-ibadah>

2. Festival adat dan budaya

<https://sumbar.antaranews.com/berita/578484/sumbar-merawat-toleransi-lewat-festival-adat-dan-budaya-nusantara-2023>

3. Praktik toleransi di masyarakat

Di Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat puluhan masyarakat dan pemuda lintas agamaikut berperan dalam pengamanan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah sebagai bentuk toleransi antarumat beragama di daerah.

<https://www.antaranews.com/berita/4054296/pemuda-lintas-agama-bantu-pengamanan-idul-fitri-di-ophir-pasaman-barat>

A.1.2.11 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat (SK-12)

Di Sumatera Barat, pelestarian produk budaya yang berbasis agama, memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan umat dengan adanya daya tarik wisata religi, situs sejarah yang dilestarikan, dan optimalisasi artefak budaya yang memiliki nilai ekonomi serta spiritual, yang pada gilirannya juga menumbuhkan rasa bangga dan penghormatan terhadap warisan budaya lokal.

Tabel 1.29 : IKS K peningkatan pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata Religi, Situs, Artefak)	40	40	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Keberadaan produk budaya berbasis agama, seperti Masjid Raya Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat dan Makam Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan warisan budaya, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan umat, terutama di sektor pariwisata religi dan tumbuhnya UMKM kuliner



1. Masjid Raya Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat

Keunikan arsitekturnya yang modern namun kental dengan ciri khas Minangkabau menjadikannya ikon wisata religi di Kota Padang. Keberadaannya berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, dengan munculnya usaha mikro seperti warung makan, toko suvenir, dan jasa penginapan, yang secara langsung meningkatkan pendapatan. Masjid ini pernah mendapatkan penghargaan **Abdullatif Al Fozan untuk Arsitektur periode 2017-2020** sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia yang bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia

- <https://www.liputan6.com/regional/read/6054677/deretan-masjid-megah-di-kota-padang-ada-yang-berusia-ratusan-tahun?page=2>;
- <https://padek.jawapos.com/opini/2366757611/masjid-raya-syekh-ahmad-khatib-al-minangkabawi-sumbar-tempat-di-mana-islam-budaya-dan-kehidupan-masyarakat-menyatu-dalam-harmoni-tanpa-sekat>

2. Surau-surau tuo dan masjid bersejarah

Banyak surau dan masjid kuno, berfungsi sebagai situs bersejarah yang menarik minat wisatawan dan peneliti. Pelestarian situs-situs ini didukung oleh peran aktif masyarakat lokal, yang pada gilirannya memperkuat identitas budaya dan rasa kepemilikan komunitas.

- https://jadesta.kemenpar.go.id/paket/wisata_religi_situs_cagar_budaya_masjid_raya-bingkudu dan
- https://langgam.id/masjid-raya-teluk-bayur-saksi-peperangan-dan-air-mata-keluarga-untuk-jemaah-calon-haji/#google_vignette

3. Ritual Ziarah ke Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, di Kabupaten Padang Pariaman

Situs ini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang paling banyak dikunjungi di Sumatera Barat, terutama saat peringatan haul (peringatan tahunan wafatnya tokoh). Ribuan peziarah yang datang menciptakan perputaran uang yang signifikan, memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat, mulai dari pedagang kecil hingga penyedia jasa transportasi dan penginapan

https://disbud.sumbarprov.go.id/details/news/479_

4. Tradisi Hoyak Tabuik di Kota Pariaman

Adalah produk budaya berbasis agama Islam yang telah bertransformasi menjadi festival budaya tahunan dan memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan umat melalui **wisata religi, pelestarian situs/artefak, dan peningkatan ekonomi lokal**.

<https://www.antaranews.com/berita/590573/ribuan-wisatawan-saksikan- pesta-pesona-hoyak-tabuik>



Gambar 1.5. : Kegiatan budaya berbasis agama

Ritual Ziarah ke Makam Syech Burhanuddin di Ulakan Padang Pariaman



Festival Tabuik di Padang Pariaman



Sumber : Dinas Pariwisata Sumatera Barat

5. Museum Adityawarman

Museum ini menyimpan berbagai khazanah budaya dan artefak Minangkabau, termasuk yang bernapaskan Islam. Keberadaan artefak dan manuskrip kuno di sini menjadi sumber belajar sejarah lokal dan nasional, memperkaya pengetahuan masyarakat dan pengunjung akan warisan budaya mereka.

6. Klenteng See Hin Kiong di Kota Padang

Klenteng berfungsi sebagai destinasi wisata religi yang menarik pengunjung lokal maupun mancanegara. Hal ini memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, yang berdampak positif pada sektor pariwisata lokal seperti perhotelan, kuliner, dan usaha kecil masyarakat sekitar.

Daya tarik ini berasal dari arsitektur unik dan perayaan hari besar keagamaan yang semarak, seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh

<https://regional.kompas.com/read/2024/01/22/205441378/kelenteng-see-hien-kiong-saksi-perkembangan-akulturasi-budaya-di-kota?page=all>

A.1.2.12 Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama (SK-13)

Kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama, terutama MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), secara rutin diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan bidang agama di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.



Tabel 1.30 : IKS K peningkatan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ Pesparawi, Pesparani, dan Ustawa dll)	2	2	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke 39 Tahun 2021, dilaksanakan di Kota Padang Panjang dan MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke 40 Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan

Tabel 1.31. Peserta dan Audiens MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Lokasi	Peserta (Orang)	Penonton	
			Langsung Datang	Persentase Peningkatan Jumlah Penonton
MTQ Ke-39 2021	Kota Padang Panjang https://www.kabarsumbar.com/berita/1-159-peserta-akan-bertanding-dalam-mtq-tingkat-provinsi-sumbar	1.159	35.000	
MTQ Ke-40 2023	Kabupaten Solok Selatan https://rri.co.id/ipitek/479258/mtq-sumbar-ke-xl-resmi-ditabuh-1149-peserta-siap-berkompetisi	1.156	40.000	14,29

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa

Capaian prestasi Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai nilai agama (MTQ, STQ, Pesparani, Pesparawi, Ustawa dll) ditingkat nasional

Tabel 1.32 : Event kegiatan keagamaan

Tahun	Event Kegiatan	Prestasi
2020	MTQ Nasional ke-28 di Padang https://www.liputan6.com/news/read/4413967/sumatera-2barat-juara-umum-mtq-nasional-2020?	Juara Umum
2021	Sippa Dhamma Samajja Tingkat Nasional di Pekanbaru	Juara Tiga Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA
2022	MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan	Urutan Lima
	MTQ Nasional KORPRI VI di Padang	Juara Umum
	Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta	Medali Emas Kategori Solo Putrid dan Medali Perak Kategori Vocal Grup
2024	MTQ Nasional ke-30 di Kalimantan Timur	Urutan Sebelas
	MTQ Nasional KORPRI VI di Palangkaraya	Juara Umum

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa dan Bimas (Kristen dan Buddha)



A.1.2.13 Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama (SK-14)

Kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama merujuk pada pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan warisan budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Peningkatan kualitas literasi ini penting untuk melestarikan tradisi, memperkaya kehidupan spiritual, serta meningkatkan apresiasi dan toleransi antarbudaya. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan literasi budaya dan agama pada KUA. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah melaksanakan bimtek kepastakaan Masjid, monitoring kepastakaan masjid di Kabupaten/Kota; sosialisasi kepastakaan masjid di Kabupaten/ Kota;

Sasaran ini berupaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menghargai warisan budaya yang dipengaruhi nilai-nilai agama. Aksi yang dilakukan meliputi Bimtek kepastakaan Masjid, Monitoring dan Sosialisasi kepastakaan Masjid, serta Monitoring kepastakaan Gereja. Meskipun narasi menyatakan sasaran tidak tercapai, rata-rata capaian justru mencapai 120% (Sangat Baik). Kendalanya meliputi terbatasnya anggaran untuk bimtek pengelola kemasjidan, belum terbitnya MoU dengan Dinas Kearsipan tentang fasilitasi perpustakaan Masjid/Mushala, serta jumlah literatur kepastakaan masjid yang masih terbatas

Jumlah direktori pustaka yang diinventarisasi, kodefikasi dan didigitalisasi dan jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina, merupakan indikator input dan proses dari upaya Kementerian Agama untuk menyediakan akses dan pengelolaan sumber daya literasi keagamaan yang berkualitas. Kedua faktor ini secara langsung, memberikan kontribusi pada pencapaian output/ hasil berupa meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernapaskan agama di Sumatera Barat. Tabel 1.33 menjelaskan taget dan realisasi kinerja tahun 2020-2024

Tabel 1.33 : IKSK peningkatan kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	23	23	100
2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	23	23	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama telah melakukan kegiatan eksplorasi dan digitalisasi manuskrip keagamaan di Sumatera Barat.

Dalam kegiatan penelusuran yang dilakukan, berhasil ditemukan sekitar 10 naskah klasik keislaman di beberapa daerah seperti di rumah Khuzaimah di Balai Gurah, IV Angkat Candung Kabupaten Agam, termasuk manuskrip Tafsir Al-Qur'an Syekh Biaro dan Matan Minhaj al-Talibin. Hasil digitalisasi ini menjadi bagian dari basis data digital nasional.



2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

Kegiatan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan rumah ibadah diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Tahun 2024 dilakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan rumah ibadah sebanyak 80 orang, dari 19 Kabupaten Kota se Sumatera Barat

Tabel 1.34 : Jumlah perpustakaan rumah ibadah

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Perpustakaan Rumah Ibadah	688	89	134

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

A.1.3 Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan-3)

Untuk mendukung tujuan peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan di Sumatera Barat, dilakukan melalui pencapaian 10 SK (SK-15 sampai dengan SK-25)

A.1.3.1 Meningkatnya kualitas sarana pendukung keagamaan (SK-15)

Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan menjadi penting dilakukan, untuk memastikan pelayanan kehidupan beragama yang inklusif, merata, dan berkualitas. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berkomitmen memfasilitas sarana ibadah yang representatif, memperkuat layanan teknis seperti pengukuran arah kiblat dan bimbingan syariah, serta mendukung pembinaan ahli falakiah agar umat dapat menjalankan ibadah dengan tepat dan nyaman. Upaya ini juga diperkuat melalui pendistribusian kitab suci dan literatur keagamaan yang mendorong pemahaman agama yang moderat, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.

Tabel 1.35 : IKS peningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah sarana dan pra sarana layanan peribadatan yang disediakan	10	10	100
2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan	857	857	100
3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	65	65	100
4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	27	27	100
5	Jumlah masjid/ mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	47	47	100
6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	26	26	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



Berdasarkan hasil LAKIP 2020–2024, strategi pelaksanaannya difokuskan pada 6 IKS, yaitu penguatan sarana dan prasarana rumah ibadah, distribusi kitab suci lintas agama, fasilitasi lembaga dan ormas keagamaan, layanan teknis keagamaan melalui tim ahli, serta pembinaan SDM falakiah yang profesional. Pendekatan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan fasilitas, ketepatan layanan ibadah, dan akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan keagamaan yang berkualitas.

1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan

Peningkatan kualitas sarana pendukung keagamaan di Sumatera Barat merupakan langkah proaktif bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan terwujudnya pelayanan keagamaan yang lebih baik, merata, dan modern, sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, pemahaman nilai-nilai spiritual, serta penguatan harmoni sosial di tengah masyarakat. Tabel 1.36 menjelaskan target dan realisasi 4 IKS mendukung kinerja meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Jumlah sarana peribadatan didominasi oleh masjid dan mushalla. Sarana ibadah bagi umat non-muslim juga tersedia, terutama di daerah perkotaan dan wilayah dengan jumlah umat Kristen dan Katolik yang signifikan seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 1.36 : Jumlah tempat peribadatan di Sumatera Barat 2020-2024

Tahun	Masjid	Mushalla	Gereja Kristen *)	Gereja Katolik *)	Pura	Vihara *)	Klenteng	Jumlah
2020	5.236	11.995	211	133	1	6	-	17.582
2021	5.354	12.306	228	130	1	6	-	18.025
2022	5.478	13.372	245	145	1	6	-	19.247
2023	5.570	13.371	260	148	1	6	-	19.356
2024	5.634	13.632	279	148	1	6	-	19.700

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Catatan : *) Data termasuk Rumah Kebaktian

Ditahun 2024, Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah menyalurkan bantuan hibah perbaikan/ renovasi tempat ibadah di 556 Masjid. 206 Mushalla dan 6 Gereja (Kristen dan Katolik) dengan total anggaran sebesar Rp. 26.116.000.000,- Bantuan Masjid dan Mushalla tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat sedangkan bantuan Gereja (Kristen dan Katolik) di Kota Padang Kabupaten Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai.

Tabel 1.37 : Jumlah Rumah Ibadah yang Menerima Hibah dan Besaran Dana Hibah yang Disalurkan (Rp. Juta) dari Pemda Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Masjid	Jumlah Bantuan (Rp)	Mushalla	Jumlah Bantuan (Rp)	Gereja		Jumlah
						Kristen	Katolik	
Kabupaten								
1	Kepulauan Mentawai	11	470	1	20	2	-	40
2	Pesisir Selatan	58	2.755	21	415	-	-	-



No	Kabupaten/ Kota	Masjid	Jumlah Bantuan (Rp)	Mushalla	Jumlah Bantuan (Rp)	Gereja		Jumlah
						Kristen	Katolik	
3	Solok	45	2.480	32	500	-	-	-
4	Sijunjung	17	665	6	70	-	-	-
5	Tanah Datar	38	1.605	14	310	-	-	-
6	Padang Pariaman	21	790	22	420	-	-	-
7	Agam	49	1.615	22	325	-	-	-
8	Lima Puluh Kota	42	1.595	16	315	-	-	-
9	Pasaman	41	1.250	21	350	-	-	-
10	Solok Selatan	9	370	-	-	-	-	-
11	Dharmasraya	6	250	5	90	-	-	-
12	Pasaman Barat	30	1.135	9	110	-	1	20
Kota								
13	Padang	116	4.075	28	550	1	2	60
14	Solok	11	465	3	60	-	-	-
15	Sawahlunto	10	425	1	20	-	-	-
16	Padang Panjang	16	790.5	2	40	-	-	-
17	Bukittinggi	7	275	-	-	-	-	-
18	Payakumbuh	20	960	3	60	-	-	-
19	Pariaman	9	370	-	-	-	-	-
Jumlah		2024	556	22.341	206	3.655	3	120
		2023	600	17.556	336	5.378	2	80

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka. 2024

2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang didistribusikan

Tabel 1.38 : Jumlah Ktab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan dan jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci/ buku keagamaan

No	Jumlah kitab suci/ buku keagamaan yang didistribusikan					Jumlah keluarga yang tidak memiliki kitab suci / buku keagamaan				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
2020	-	-	100	50	-	-	1.040	6.000	-	-
2021	-	-	100	-	-	-	1.026	5.000	-	-
2022	3.850	-	140	50	-	-	1.900	-	-	-
2023	1.574	-	120	-	-	-	2.000	-	-	-
2024	1.374	750	230	50	-	-	3.000	-	-	-

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Pendistribusian kitab suci dan buku keagamaan bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan literasi dan pemahaman keagamaan masyarakat, untuk memastikan akses terhadap teks suci bagi semua komunitas beragama. Upaya pendistribusian kitab suci didorong oleh kebutuhan spiritual dan keinginan untuk memperkuat tatanan sosial yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Distribusi ditujukan pada rumah ibadah. Masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan



3. Layanan bimbingan layanan syariah yang disediakan

Bimbingan layanan syariah selama tahun 2024

Tabel 1.39 : Jenis dan Jumlah Layanan Syariah

Jenis layanan		2024
1	Layanan rohaniawan dan pembaca doa pendamping sumpah jabatan dan profesi	172
2	Layanan pembaca doa untuk kegiatan hari besar nasional, dan kegiatan lembaga eksternal	11
3	Pembagian Warisan	17
4	Penyedia penterjemah naskah waris arab melayu	8
Jumlah		208

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

4. Fasilitas pengukuran arah kiblat

Fasilitas pengukuran arah kiblat meliputi penyediaan bantuan, bimbingan, atau layanan ahli untuk membantu masyarakat dalam menentukan arah kiblat secara akurat dan diberikan sertifikat pengukuran arah kiblat. Dibandingkan dengan jumlah masjid dan mushalla yang ada di Sumatera Barat, persentase jumlah masjid dan mushalla yang sudah difasilitasi pengukuran arah kiblatnya dan diberikan sertifikat pengukuran arah kiblat, baru mencapai 1,40% (masjid) dan 0,26% (mushalla).

<https://sihat.kemenag.go.id/index.php/data>

Tabel 1.40 : Jumlah masjid dan mushalla yang telah lakukan pengukuran arah kiblat

Tahun	Sarana Ibadah		Fasilitas Umum			
	Masjid	Mushalla	Hotel	Rumah Makan/ Restoran	Fasilitas Pariwisata	Mall
2024	113	89	7	8	1	1

Sumber : <https://sihat.kemenag.go.id/index.php/data>

Sedangkan jumlah tenaga ahli hisab rukyat di Sumatera Barat per 21 Desember 2024 yang terdaftar pada aplikasi Sistem Hisab Rukyat Indone-sia (SIHAT) Kementerian Agama sebanyak 33 orang tersebar di Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat.

A.1.3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam) (SK-16)

Peningkatan kualitas layanan nikah dan rujuk di Sumatera Barat, merupakan inisiatif penting yang dilatarbelakangi oleh peran sentral Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam melayani masyarakat. Layanan ini tidak hanya mencakup aspek administratif pencatatan pernikahan, tetapi juga bimbingan yang bertujuan mengokohkan ketahanan keluarga di tengah dinamika tantangan sosial modern. Terdapat 4 IKSK, yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk di Sumatera Barat



Tabel 1.41 : IKSK peningkatan kualitas pelayanan nikah/ rujuk (Islam)

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	10	10	100
2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasa rana	21	21	100
3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2.263	2.263	100
4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bombingn cegah kawin anak dan seks pra nikah	1.378	1.378	100
5	Jumlah penghulu yang dibina	170	170	100
6	Jumlah KUA yang direvitalisasi	10	10	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Revitalisasi KUA

Sampai tahun 2024, telah direvitalisasi 34 KUA Kecamatan di 15 Kabupaten/ Kota dari 176 KUA Kecamatan yang ada di Sumatera Barat, (=0,2%) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.388.000.000,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Tabel 1.42 : Revitalisasi KUA Kecamatan di Sumatera Barat

Tahun	Jumlah KUA Revitalisasi	Lokasi KUA berdasarkan Kabupaten/ Kota	Total Anggaran (Rp)
2020	13	9	19.398.000.000
2021	5	5	8.840.000.000
2022	6	6	8.520. 000.000
2023	5	5	6.950.000.000
2024	3	3	7.180. 000.000

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi Keagamaan

Hasil pemantauan kinerja layanan KUA yang dilakukan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama 2023 terhadap 12 KUA revitalisasi di Sumatera Barat yang dipantau, menunjukan skor rata rata indeks sebesar 73,3, **lebih tinggi** bila dibandingkan dengan nilai rata rata nasional sebesar 71,7. Indeks tertinggi dicapai KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan indeks 89,0 berada diurutan 2 nasional. Indeks terendah 56,30 diperoleh KUA Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yang berada diurutan 481.

Tabel 1.43 : Indeks KUA Revitalisasi se Sumatera Barat

Urutan Nasional	Nama KUA Kecamatan	Indeks KUA
2 dari 505	KUA Mandiangin Koto Selayan	89,0
38 dari 505	KUA Lubuk Basung	81,8
101 dari 505	KUA Lubuk Sikarah	78,6
121 dari 505	KUA Kubung	77,8
132 dari 505	KUA Pariangan	77,5



Urutan Nasional	Nama KUA Kecamatan	Indeks KUA
163 dari 505	KUA Lubuk Sikaping	76,4
169 dari 505	KUA Pariaman Tengah	76,2
190 dari 505	KUA Nan Sabaris	75,5
195 dari 505	KUA Padang Panjang Timur	75,3
207 dari 505	KUA Pauh	74,9
261 dari 505	KUA Pasaman	72,4
285 dari 505	KUA Tilatang Kamang	71,2
323 dari 505	KUA Guguk Panjang	69,5
352 dari 505	KUA Sijunjung	67,8
412 dari 505	KUA Padang Utara	64,4
443 dari 505	KUA Koto XI Tarusan	61,7
481 dari 505	KUA Sungai Rumbai	56,3
Indeks Rata Rata Layanan 12 KUA Revitalisasi di Sumatera Barat		73,3
Indeks Rata Rata Layanan 506 KUA Revitalisasi Se Indonesia		71,7

Sumber : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama 2023

Inovasi layanan pada KUA Revitalisasi

Tabel 1.44 : Inovasi Layanan pada KUA Revitalisasi

No	Nama KUA Kecamatan	Inovasi Layanan
1	KUA Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi	- Layanan Teman Dekat (Layanan setelah menikah delapan dokumen didapat). Program layanan terintegrasi yang inovatif bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bukittinggi. Melalui layanan ini, pasangan yang baru menikah tidak hanya mendapatkan buku nikah, tetapi juga langsung memperoleh delapan dokumen administrasi kependudukan lainnya, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) baru dengan status perkawinan yang telah diperbarui. - Pilot Project Revitalisasi KUA KUA Mandiangin Koto Selayan terpilih sebagai salah satu dari 100 KUA di seluruh Indonesia untuk menjadi percontohan program revitalisasi oleh Kementerian Agama pada tahun 2021. Inisiatif ini bertujuan untuk mentransformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang lebih modern, profesional, dan terintegrasi di tengah masyarakat. - Program Catin NAMPAK (Menanam dan Berdampak) Program ini melibatkan calon pengantin dalam kegiatan menanam pohon atau berkontribusi pada lingkungan - sebagai bagian dari proses pernikahan, mengaitkan layanan keagamaan dengan kepedulian ekologis dan sosial.KUA Percontohan Ekonomi Umat Berkolaborasi dengan lembaga filantropi seperti



No	Nama KUA Kecamatan	Inovasi Layanan
		LAZ Al Azhar dalam program percontohan yang berfokus pada pengembangan ekonomi umat, menunjukkan peran KUA yang meluas beyond administrasi pernikahan semata.
2	KUA Lubuk Basung	• Layanan Digital dan Terintegrasi Layanan berbasis digital dan terintegrasi, seperti penganpengantin yang langsung menerima Kartu Keluarga (KK) dan KTP baru setelah akad nikah, menunjukkan adanya dorongan inovasi serupa di tingkat regional. KUA Lubuk Basung sendiri memiliki halaman Facebook aktif yang digunakan untuk penyebaran informasi pelayanan, menunjukkan adopsi teknologi untuk komunikasi publik. • Bimbingan dan Konsultasi Menyelenggarakan layanan bimbingan manasik haji, konsultasi hukum Islam, serta bimbingan dan penerangan agama Islam. Ini termasuk bimbingan keagamaan oleh penghulu dan kerja sama dengan tokoh agama setempat untuk penguatan pendidikan keagamaan.
3	KUA Pariangan Kabupaten Tanah Datar	Catin Nampak Calon pengantin menanam berdampak yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses pernikahan.
4	KUA Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	• Pelayanan Konsultasi Digital Memberikan layanan konsultasi pra-nikah melalui platform digital atau video conference. • Program Pendampingan Berbasis Digital Membuat program pendampingan keluarga yang bisa diakses melalui aplikasi, seperti materi edukasi atau forum diskusi online. • Penerapan E-Sertifikat Nikah Menggunakan sertifikat nikah digital yang dapat diunduh atau diakses secara online, sehingga lebih aman dan efisien.
5	KUA Pariaman Tengah Kota Pariaman	• Dapur Serabi Program bantuan sosial dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan dan menyalurkan bantuan sembako. • Shuling: (Subuh Keliling) Kegiatan KUA di waktu Subuh untuk berinteraksi dan melayani masyarakat. bantuan sembako. Inisiatif ini menjadi salah satu dari tiga program unggulan di KUA Pariaman Tengah. • Shuling: (Subuh Keliling) Kegiatan KUA di waktu Subuh untuk berinteraksi dan melayani masyarakat.
6	KUA Padang Panjang Timur	Program SAHARA, menggabungkan aspek spiritual dan kesehatan jasmani untuk keluarga, mencakup



No	Nama KUA Kecamatan	Inovasi Layanan
		bimbingan calon pengantin, konseling keluarga, penyuluhan kesehatan mental dan reproduksi, serta pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
7	KUA Tilatang Kamang	• Layanan "1 Urusan 2 Batang Bibit" Mengintegrasikan layanan administrasi dengan kegiatan lingkungan. Setiap pasangan yang menikah tidak hanya mendapatkan layanan pencatatan pernikahan, tetapi juga menerima dua batang bibit tanaman, mendorong kesadaran lingkungan di kalangan pengantin baru. • Pelaksanaan Ikrar Wakaf Tanah Memfasilitasi dan melaksanakan ikrar wakaf tanah, memastikan pengamanan aset wakaf untuk kemaslahatan umat, yang merupakan bagian dari optimalisasi layanan bimbingan zakat dan wakaf. • Sosialisasi Produk Halal Sosialisasi proses produk halal (PPPH) kepada masyarakat, memperluas cakupan layanan KUA di luar urusan pernikahan.

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

2. Peningkatan sarana dan prasarana pada KUA

Peningkatan sarana dan prasarana KUA dilakukan melalui rehabilitasi/ peremajaan gedung bangunan dan fasilitasi prasarana kantor

Tabel 1.45 : Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

Tahun	Jumlah KUA
2022	22
2023	12
2024	16

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

3. Isbat Nikah

Isbat nikah (permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengukuhkan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi)

Tabel 1.46 : Jumlah putusan Isbat Nikah, 2024

Tahun	Jumlah Putusan Isbat Nikah
2023	1.537
2024	1.297

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam



4. Peristiwa nikah

Dari tahun 2022, jumlah peristiwa nikah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Di Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 8.918 peristiwa bila dibandingkan dengan peristiwa nikah ditahun 2021

Tabel 1.47 : Jumlah Peristiwa Nikah di Sumatera Barat, 2020-2024

Tahun	Jumlah		Angka Perceraian
	Peristiwa Nikah	Peristiwa Nikah Dibawah Umur	
2020	43.290	100	5.291
2021	45.407	114	9.371
2022	42.487	242	10.278
2023	38.389	760	9.266
2024	36.489	410	8.152

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

Badan Pusat Statistik mencatat. angka perceraian di Sumatera Barat tahun 2024 mencapai 8.152 kasus dengan persentase 1,99% dari jumlah kasus perceraian di Indonesia yang mencapai 463,654 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah peristiwa nikah ditahun yang sama sebanyak 36.486 peristiwa, maka angka perceraian di Sumatera Barat mencapai 0.29%. Dari 8.152 perkara perceraian, dengan rincian 7.539 perkara dikabulkan, 328 perkara dicabut, 158 perkara gugur, 25 perkara digugurkan, 107 perkara ditolak, dan 5 perkara dicoret dari registrasi. Di tahun 2023 berjumlah 9.266 perkara dengan rincian 8.219 perkara dikabulkan, 731 perkara dicabut, 282 perkara gugur, 34 perkara digugurkan, 180 perkara ditolak, dan 4 perkara dicoret dari registrasi.

5. PNBP dari peristiwa nikah/ rujuk

Peristiwa nikah di Sumatera Barat menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari peristiwa Nikah, 2020-2024 sebesar Rp. 92.419.800.000,-

Tabel 1.48 : PNBP dari Peristiwa Nikah di Sumatera Barat, 2020-2024

Tahun	Jumlah			PNBP (Rp.000)
	Peristiwa Nikah	Nikah di KUA	Nikah di Luar KUA (Rumah/ Gedung)	
2020	43.290	13.674	29.616	17.769.600
2021	45.407	11.110	34.297	20.578.200
2022	42.487	10.215	32.272	19.363.200
2023	38.389	8.545	29.844	17.906.400
2024	36.489	8.485	28.004	16.802.400
Jumlah	206.062	52.029	154.033	92.419.800

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam



6. Bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah pada remaja usia sekolah (BRUS)

Program ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, terutama dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan pembentukan generasi yang berkualitas, beriman, dan berakhlak mulia. Dari tahun 2020 hingga 2024, peserta kegiatan BRUS mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Mayoritas kasus perceraian tahun 2023 dan 2024 di Sumatera Barat, terjadi pada usia pernikahan yang masih belia, kurang dari lima tahun (31,8%), disusul usia pernikahan 6-10 tahun dengan persentase 19,9%. Selain kasus perceraian, perkara dispensasi kawin yang terjadi karena pernikahan dini di bawah usia 19 tahun selama tahun 2024 mencapai 410 kasus, dengan alasan utama untuk menghindari perbuatan zina.

<https://www.kompas.tv/regional/562370/angka-perceraian-di-sumbar-tinggi-pta-padang-tangani-10-054-kasus-cerai-di-tahun-2024-ma-news>

Sinkronisasi program dengan lembaga instansi pemerintah dan LSM sangat diperlukan untuk memastikan pasangan yang akan menikah mendapatkan bimbingan yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah perlu diperkuat dimasa masa mendatang

Tabel 1.49 : Jumlah Madrasah/ Sekolah Sasaran BRUS 2024

Tahun	Penyelenggara BRUS	
	Lembaga Pendidikan Islam (MA)	Sekolah Umum (SMA)
2022	21	20
2023	20	20
2024	20	23

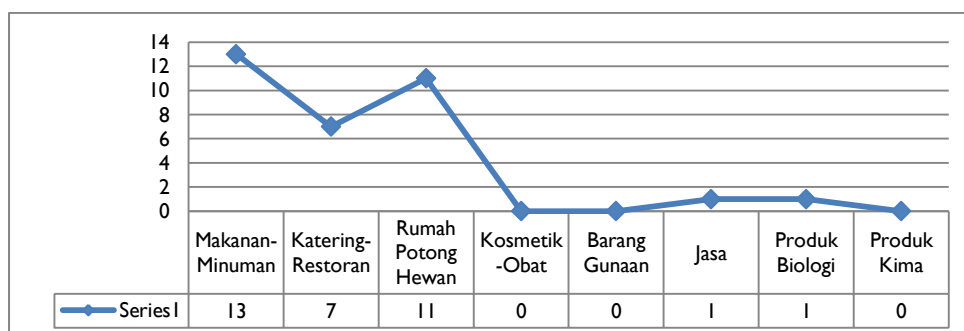
Sumber : Bidang Urusan Agama Islam

7. Sertifikasi halal

a. Konsultasi halal

Satgas JPH melayani konsultasi halal, bagi pengelola usaha di Sumatera Barat sebanyak 33 kali layanan

Grafik 1.1 : Jumlah Layanan Konsultasi Halal



Sumber : Satgas JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat



b. Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan

Dalam periode 2022-2024, Satuan Tugas Layanan Jamimnan Produk Halal (Satgas JPH) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan 49.983 Sertifikat Halal untuk usaha skala mikro, menengah, kecil dan besar

Tabel 1.50 : Sertifikasi Halal, 2022-2024

Tahun	Skala Usaha				Jumlah
	Besar	Kecil	Menengah	Mikro	
2022		10	1	1.994	2.005
2023	5	600	-	26.496	27.101
2024	21	298	6	20.552	20.877
Jumlah	26	908	7	49.042	49.983

Sumber : Satgas JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

c. Pengawasan produk halal

Pengawasan produk halal secara rutin dilakukan oleh Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berkolaborasi dengan dinas terkait seperti Balai POM dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/hindari-sanksi-satgas-halal>

Tabel 1.51 : Pengawasan Halal

No	Objek Pengawasan	Jumlah Objek	Lokasi
1	Pelaku usaha perhotelan	3	Hotel Axana Padang, Hotel Truntum Padang dan Hotel Rangkayo Basa Padang
2	Rumah Potong Hewan (RPH)	4	RPH Kota Padang, RPH Kota Padang Panjang, RPH Kota Bukittinggi dan RPH Kota Sawahlunto
3	Rumah Potong Unggas (RPU)	6	Kota Padang
4	Pengawasan terhadap supermarket	4	Transmart, Supermarket SJS, Supermarket Budiman dan Aciak Mart
5	Psaha daging potong (los daging)	3	Pasar Raya Padang, Pasar Alai Padang dan Pasar Lubuk Buaya Padang
6	Pelaku usaha rumahan	10	Padang
7	Lembaga halal	3	LP3H, LPH dan Pendamping Halal
8	Pengawasan serentak di Pasar Tradisional, Supermarket, Minimarket terhadap produk yang dicurigai mengandung unsur babi		Seluruh Sumatera Barat

Sumber : Satgas JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

A.1.3.3 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga (SK-17)

Program peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan keluarga lintas agama di Provinsi



Sumatera Barat. Dengan capaian 100% dari target rata-rata 176 keluarga per tahun, program ini berhasil menjangkau kelompok sasaran secara optimal dan merata.

Pelayanan berbasis model Pusaka Sakinah, Pusaka Kristiani, Keluarga Bahagia Hindu (Sukinah), dan Hitta Sukhaya, tidak hanya meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat keharmonisan, stabilitas emosi, serta kesiapan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial modern.

Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan keluarga sebagai ruang konseling, edukasi, dan pembinaan karakter spiritual. Inovasi program diwujudkan melalui diversifikasi metode layanan yang disesuaikan dengan karakteristik agama dan budaya masing-masing komunitas.

Pendekatan berbasis literasi keluarga, kelas konseling pra–dan pasca–pernikahan, pemanfaatan media digital untuk e-bimbingan, serta kolaborasi dengan lembaga keagamaan menjadi terobosan yang memperluas jangkauan layanan. Selain itu, penguatan kapasitas penyuluh agama melalui pelatihan modul tematik, integrasi bimbingan dengan program penguatan moderasi beragama, serta penyediaan layanan mobile counselling menjadikan program ini lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini. Inovasi-inovasi tersebut turut memastikan layanan bimbingan keluarga tetap berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan

Tabel 1.52 : IKSK meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah keluarga yang mem peroleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/sukinah/hitta sukhaya	170	170	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah mengimplementasikan berbagai program strategis bimbingan keluarga yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga

Tabel 1.53 : Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/sukinah/hitta sukhaya, 2023-2024

Tahun	Layanan Bimbingan Keluarga					Jumlah
	Layanan Pusaka Sakinah (Islam)	Layanan Kristiani (Kristen)	Layanan Bahagia (Katolik)	Layanan Sukinah (Hindu)	Layanan Hittasukhaya (Buddha)	
2023	60	35	30	25	20	170
2024	150	45	45	30	30	300

Sumber : Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha)

Hasil sinergi program dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta dukungan regulasi yang kuat berdampak pada membaiknya Indeks Pembangunan Ketahanan Keluarga (IBangga) di Sumatera Barat indikator kinerja



bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengukur kebijakan pembangunan keluarga. Penilaian iBangga didasarkan pada tiga dimensi utama : kemandirian, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga. Tahun 2023 nilai IBangga Sumatera Barat menccapai angka 53,54% kategori berkembang atau cukup baik dan ditahun 2024 dengan nilai 60,99% kategori berkembang atau cukup baik. Kota Payakumbuh menjadi juara pertama dalam **IBangga Award 2024** tingkat provinsi, dengan kualitas ketahanan keluarga yang melebihi rata-rata provinsi, dan mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional

<https://sumbar.antaranews.com/berita/607797/payakumbuh-juara-ibangga-tingkat-sumbar-tahun-2024>

A.1.3.4 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan PIH khusus (SK-18)

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPIU dan PIHK selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan ibadah umrah serta haji khusus. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, secara konsisten menempatkan kegiatan ini sebagai prioritas strategis untuk melindungi hak jamaah, mengantisipasi potensi penipuan, serta memastikan kesesuaian layanan dengan regulasi nasional. Melalui pendataan ulang, bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, verifikasi izin operasional, evaluasi lapangan, dan implementasi digitalisasi SISKOPATUH, capaian pembinaan meningkat dari 78% pada 2020 hingga 100% pada 2024. Seluruh capaian tersebut mencerminkan komitmen Kanwil dalam mendorong transparansi pelaporan, integritas layanan, serta responsivitas terhadap aduan jamaah, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya kualitas pelayanan ibadah dan predikat kepatuhan tertinggi di wilayah Sumatera Barat

Tabel 1.54 : IKS meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah (PIU) dan PIH khusus

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase Penyelenggara PIU yang terbina dan terawasi	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dari tahun 2020-2024 telah berjalan dengan baik. Proses pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan, bimbingan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah di Sumatera Barat, memastikan ibadah mereka berjalan sesuai syariat dan standar yang ditetapkan.

<https://ihram.republika.co.id/berita/r7uu8i3l3/kemenag-sumbar-minta-ppiupahami-regulasi-umrah>



Tabel 1.55 : Jumlah lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A), 2020-2024

Tahun	Jumlah Penyelenggaraan	
	Haji Khusus	Umrah
2020	-	1
2021	-	-
2022	-	1
2023	-	6
2024	-	1

Sumber : Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

A.1.3.5 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji (SK-19)

Pelayanan pendaftaran haji di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang periode 2020–2024, meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19 pada awal pelaksanaannya. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berhasil menjaga konsistensi kualitas layanan melalui standarisasi PLHUT, pemanfaatan teknologi digital seperti Siskohat Online, serta pembinaan intensif terhadap petugas layanan haji.

Capaian yang semula hanya 27,11% pusat layanan memenuhi standar pada 2020–2023, meningkat menjadi 51,3% pada 2024, menandakan adanya komitmen dan perbaikan tata kelola layanan secara bertahap dan terukur. Selain itu, efektivitas sistem verifikasi layanan haji tercermin dari menurunnya angka pembatalan jamaah, dari 100% pada 2021 akibat kebijakan nasional menjadi hanya 0,3% pada 2024. Tren perbaikan ini menunjukkan bahwa integrasi layanan digital, penguatan kapasitas SDM, dan koordinasi lintas sektor telah menghasilkan sistem pendaftaran haji yang lebih akuntabel, responsif, dan transparan.

Secara keseluruhan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatkan mutu penyelenggaraan pendaftaran haji serta memenuhi ekspektasi masyarakat melalui layanan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan jamaah. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, ditandai dengan pelaksanaan 2 IKS sebagai berikut :

Tabel 1.56 : IKS meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	51,3	51,3	100
2	Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,3	0,3	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



1. Pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan

Pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dari tahun 2020-2024,, berjumlah 7 gedung di 7 Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 21.350.759.000,- (dua puluh satu milyar, tujuh ratus lima puluh sembilan juta)

Sebagai Pusat layanan haji, gedung PLHUT yang memenuhi standar pelayanan berdampak signifikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji di Sumatera Barat. Kualitas pelayanan yang terstandardisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur fisik hingga efisiensi proses digital, yang secara kolektif meningkatkan pengalaman calon jemaah haji.

Tabel 1.57 : Inovasi Pelayanan Gedung PLHUT

Gedung PLHUT	Inovasi Layanan
1. Kota Pariaman 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kota Padang 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Agam 6. Kabupaten Pasaman Barat 7. Kota Sawahlunto	Pelayanan terpadu Menggabungkan berbagai layanan haji dan umrah di bawah satu atap. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi jemaah sehingga tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan. Pelayanan terpadu Menggabungkan berbagai layanan haji dan umrah di bawah satu atap. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah sehingga tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan. Pendekatan terstruktur Pelayanan dirancang dengan pendekatan yang terstruktur untuk memastikan efisiensi. Termasuk identifikasi kebutuhan jemaah dan pemetaan masalah komunikasi sebelum pelayanan diberikan. Penggunaan media digital PLHUT secara aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk berkomunikasi dengan jemaah. Ini memudahkan penyampaian informasi, pengumpulan masukan, dan pembinaan. Pengawasan dan evaluasi PLHUT melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Evaluasi kinerja petugas juga dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan dan interaksi yang baik dengan jemaah.

Sumber : Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah



2. Calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan

Tabel 1.58 : Jumlah jemaah yang diberangkatkan

Tahun	Jumlah jemaah		Alasan Batal Berangkat
	Diberangkatkan	Batal berangkat	
2022	2.112	-	
2023	4.754	-	
2024	4,836	-	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji yang terencana juga bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk pembatalan yang disebabkan oleh faktor internal, memastikan bahwa jemaah yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat dapat berangkat sesuai jadwal.

A.1.3.6 Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji (SK-20)

Tabel 1.59 : IKSK meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	93,15	93,15	100
2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji, diukur melalui 2 IKSK sebagai berikut :

1. Asrama haji yang memenuhi standar pelayanan

Asrama Haji Embarkasi Padang berfungsi sebagai gerbang awal dan titik sentral dalam rangkaian perjalanan ibadah haji bagi jemaah asal Sumatera Barat. Keberadaannya sangat vital, tidak hanya sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai tempat pemulihan fisik dan mental serta pusat pelayanan administratif sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

- <https://rri.co.id/info-haji/1474270/asrama-haji-embarkasi-padang-siap-sambut-cjh>
- <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/ppih-embarkasi-padang-siap-sambut-jemaah-haji-kloter-perdana-di-asrama-haji>

Ombudsman perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi pelayanan haji Embarkasi Padang di Asrama Haji Tabing Padang. Standar pelayanan dan fasilitas yang disediakan masuk kategori baik.. Pemantauan terhadap kamar jemaah, kamar mandi, klinik kesehatan, ruang makan hingga pelayanan semuanya bagus. Semua proses berjalan baik dan petugas dengan maksimal melayani jemaah haji, apresiasi pada petugas juga perlu diberikan karena bekerja nonstop melayani jemaah mulai dari masuk



asrama hingga pemberangkatan ke Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian informasi jamaah haji yang meninggal di tanah suci, jelas, rinci dan cepat sampai ke keluarga.

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-apresiasi-pelayanan-haji-embarkasi-padang>

2. Pelayanan transportasi jamaah haji

Pelayanan haji di Sumatera Barat melibatkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas transportasi jamaah dari daerah asal ke embarkasi. Kualitas transportasi yang baik adalah bagian dari rantai pelayanan yang terintegrasi. Kegagalan atau keterlambatan dalam transportasi dapat mengganggu seluruh rantai pelayanan, termasuk operasional di asrama haji dan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Perjalanan dari daerah asal ke asrama haji sering kali melelahkan.

Pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan efisien dapat mengurangi tingkat stres dan kelelahan jamaah sebelum mereka memasuki fase persiapan di asrama. Jamaah yang lebih segar dan tenang akan lebih mudah mengikuti arahan dan menikmati fasilitas asrama, sehingga meningkatkan persepsi kualitas pelayanan secara keseluruhan.

<https://www.youtube.com/watch?v=oyiLLiDpTig>

A.1.3.7 Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji (SK-21)

Melalui manasik, jamaah di Sumatera Barat dilatih untuk melaksanakan setiap tahapan, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, hingga thawaf dan sa'i. Keterampilan praktis ini membuat jamaah lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pembimbing saat berada di Tanah Suci.

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/1410-jamaah-ikut-bimbingan-manasik-haji-dibagi-menjadi-10-kb>

Tabel 1.60 : IKS meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Selain bimbingan pada calon jamaah haji, bimbingan juga diberikan pada Petugas Haji, meliputi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), 120 orang Petugas Pembimbing Ibadah Haji (TPIH) dan Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) untuk meningkatkan profesionalisme petugas dalam melayani jamaah haji.

- <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/melalui-petugas-gubernur-berharap-embarkasi-padang-menjadi-pelaksana-terbaik-melayani-jamaah>; dan



- <https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/bimtek-petugas-kloter-kakanwil-mahyudin-se-but-tanpa-petugas-jemaah-kehilangan-arrah>

Gambar 1.6 : Bimtek Petugas Kloter



Sumber : Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Profesionalisme petugas merupakan salah satu kunci utama dalam memastikan jemaah haji merasa aman, nyaman, dan mendapatkan bimbingan yang memadai selama menjalankan ibadah.

Tabel 1.61 : Jumlah petugas haji tersertifikat

Tahun	Jumlah petugas haji bersertifikat
2022	8
2023	18
2024	18

Sumber : Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

A.1.3.8 Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu (SK-22)

Keberlanjutan layanan haji (kemampuan sistem untuk terus beroperasi tanpa gangguan signifikan) sering diukur sebagai bagian dari indikator kinerja pengelolaan data dan sistem informasi haji yang terpadu. Jika pengelolaan data baik, maka keberlanjutan layanan juga meningkat.

Tabel 1. 62 : IKSK meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

SISKOHAT berfungsi mengolah seluruh data perhajian, dari pendaftaran, pembayaran, hingga keberangkatan. Pengelolaan data yang meningkat memastikan:

- a. Data akurat dan lengkap. Meminimalkan risiko kesalahan administrasi, yang merupakan kunci kelancaran pelayanan.
- b. Akses informasi real-time. Memudahkan petugas di Sumatera Barat dan pusat untuk mengakses data jemaah dengan cepat, mempercepat proses dan pengambilan keputusan.



- c. Transparansi dan akuntabilitas. Data yang terkelola dengan baik meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan haji.

Tabel 1.63 : Jumlah jamaah yang mendaftar

Tahun	Jumlah jamaah yang mendaftar
2020	7.020
2021	3.699
2022	4.980
2023	5.114
2024	6.674

Sumber : Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

A.1.3.9 Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat (SK-23)

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat, merupakan upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keagamaan umat. Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut

Tabel 1.64 : IKS K meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah	75	75	100
2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	42	42	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Tabel 1.65, menunjukan keberadaan lembaga pemberdayaan zakat, perannya dalam pemberdayaan ekonomi keagamaan umat beragama di Sumatera Barat. Pemberdayaan dana sosial keagamaan memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan dan keagamaan

1. Lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah

a. Sinergi dan kolaborasi pengelolaan dan pembinaan

- 1) Terdapat dorongan kuat dari Gubernur Sumatera Barat, agar BAZNAS dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam pendistribusian zakat untuk memberikan manfaat yang lebih besar
- 2) Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menerima BAZNAS Award 2024 sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik,



- 3) Sinergi pengawasan dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Barat, yang mewajibkan BAZNAS Sumatera Barat, untuk membuka data dana zakat dan penerima manfaat kepada publik, menunjukkan komitmen terhadap transparansi

b. Lembaga Zakat

- 1) Terdapat 20 Lembaga BAZNAS telah berdiri di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota di Sumatera Barat.
- 2) 1 LAZ yang memiliki izin operasional di Sumatera Barat dalam skala Kabupaten / Kota, yaitu LAZ Perkumpulan Ar Risalah Charity, Sumatera Barat

c. Potensi

- 1) Potensi dana zakat di Sumatera Barat mencapai Rp 4,2 hingga Rp 4,3 triliun per tahun. Namun, baru sebagian kecil yang berhasil dikelola, sekitar Rp 475 miliar. Disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pengumpulan dan menyalurkan dana secara tepat sasaran melalui berbagai program prioritas

<https://mediasinardunia.com/index.php/rakorda-baznas-se-sumbar-potensi-zakat-di-sumbar-rp42-triliun-terkelola-baru-capai-rp-475-miliar>

- 2) BAZNAS Kota Pariaman, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 6,5 miliar, sementara BAZNAS Kota Padang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 14,07 miliar hingga Oktober 2024.
- 3) Pengumpulan dana melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan 19 BAZNAS Kabupaten Kota di Sumatera Barat

Tabel 1.65 : Jumlah pengumpulan zakat, 2024

No	Jenis Zakat	Jumlah (Rp)
1	Zakat Maal	182.754.056.292
2	Zakat fitrah	1.767.982.157
3	Infak dan sedekah	21.761.871.875
4	Pengumpulan kurban	5.301.346.000
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	169.168.315
Total Penerimaan		211.754.424.639

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS

Dibandingkan dengan jumlah pengumpulan nasional (Rp. 4.050.986.146.2190,-) per sentase jumlah pengumpulan zakat oleh BAZNAS Sumatera Barat baru sebesar 0.52%

- 4) Pertumbuhan 1` 2023-2024

Tabel 1.66 : Pertumbuhan muzaki 2023-2024

Muzaki 2023		Muzaki 2024		Pertumbuhan (%)	
Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun
286.308	603.396	414.151	763.612	44.65%	26.55%

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS



b. Pemberdayaan

Pemberdayaan dana zakat di Sumatera Barat berfokus pada transformasi mustahik (penerima zakat) dari konsumtif menjadi produktif melalui program bantuan modal usaha dan pembinaan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial serta mendukung kegiatan pendidikan siswa/mahasiswa dengan latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu.

1) Pendistribusian dan pendayagunaan

Tabel 1.67 : Pertumbuhan pendistribusian dan pendayagunaan 2023-2024

Penyaluran 2023 (Rp)		Penyaluran 2024 (Rp)		Pertumbuhan (%)	
Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun
74,004,005,867	160,258,159,055	78,523,469,585	183,144,909,926	6.11%	14.28%

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS

2) Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan 2024

Tabel 1.68 : Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan 2024

No	Pendistribusian dan Penamfaatan	Jumlah (Rp)
1	Kemanusiaan	65,628,612,590
2	Kesehatan	16,672,873,306
3	Pendidikan	50,673,183,724
4	Ekonomi	12,880,687,09
5	Akwah-Advokasi	7,683,041,777
6	Operasional	20,840,213,744

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS

3) Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan berdasarkan Asnaf, 2024

Tabel 1.69 : Realisasi pendistribusian dan pemanfaatan berdasarkan asnaf

No	Pendistribusian dan Pemanfaatan Berdasarkan Asnaf	Jumlah (Rp)
1	Fakir Miskin	138,012,785,277
2	Amil	20,840,213,744
3	Mualaf	221,890,000
4	Riqab	2,000,00
5	Qharim	3,054,791,732
6	Fisabilillah	20,707,309,173
7	Ibnu Sabil	305,920,000

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS



4) Pertumbuhan Mustahik Penerima Pendistribusian dan Pendayagunaan, 2023-2024

Tabel 1.70 : Pertumbuhan Mustahik Penerima Pendistribusian dan Pendayagunaan, 2023-2024

Mustahik Penerima PDP 2023		Mustahik Penerima PDP 2024		Pertumbuhan (%)	
Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun	Semester 1	Akhir Tahun
140,489	189,848	172,602	309,043	22.86%	62.78%

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS

5) Dana Keagamaan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

▪ Potensi

Tabel 1.71 : Pengelolaan Dana Zakat pada UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Setoran Ke Baznas Provinsi (Rp)	Pengembalian 70% dari Baznas Provinsi (Rp)	Pendistribusian (Rp)
2023	1.142.221.068	944.968.792	944.968.792
2024	1.337.845.627	790.414.768	589.850.000

Sumber : UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023-2024 berhasil mengumpulkan dana zakat dari ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Satuan kerja Madrasah Aliyah Negeri sebesar Rp. 2.480.066.695,-

▪ Pemberdayaan

Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan untuk siswa madrasah, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial keagamaan

Tabel 1.72 : Realisasi pendistribusian dan pendayagunaan

Tahun	Pendistribusian dan Pendayagunaan	Jumlah (Rp)	
2023	Pendidikan (777 Siswa/i Madrasah)	777.000.000	944.968.792
	Ekonomi dan kegiatan keagamaan	167.000.000	
2024	Pendidikan (471 Siswa/i Madrasah)	471.000.000	589.850.000
	Ekonomi, sosial dan kegiatan keagamaan	118.850.000	

Sumber : UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

▪ Inovasi pemberdayaan dana zakat

Pemanfaatan dana zakat untuk mendukung pengentasan kemiskinan melahirkan program BERANI (BEnahi RumAh Bina Penghuninya). Program BERANI merupakan wujud kepedulian sosial ASN Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan membantu masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah, untuk memperbaiki rumah tinggal mereka yang tidak layak huni (RTLH), memberikan pembinaan keagamaan pada penghuni dan



warga sekitar. Anggaran program BERANI berasal dari pengembalian dana ZIS ASN Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk *dana stimulan*. Program BERANI bertujuan :

- (1) Memberikan dana stimulan perbaikan rumah kepada warga kurang mampu;
- (2) Terpenuhi kenyamanan, keamanan dan layak huni rumah sebagai tempat tinggal beserta keluarga;
- (3) Memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan pada keluarga;
- (4) Meningkatkan semangat dan kualitas hidup yang lebih baik; dan
- (5) Menumbuhkan kembali perilaku kerelawanan dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan RTLH

Tabel 1.73 : Jumlah RTLH penerima dana Stimulan Program BERANI

Tahun	Jumlah RTLH	Lokasi	Jumlah Anggaran Stimulan (Rp)
2022	10 RTLH Warga Masyarakat	9 Kecamatan	50.000.000
2023	6 RTLH Warga Masyarakat	6 Kecamatan	30.000.000
	4 RTLH Guru Honorer PAI	4 Kecamatan	20.000.000
2024	1 RTLH Guru Honorer PAI	1 Kecamatan	5.000.000
	6 RTLH Warga Masyarakat	6 Kecamatan	30.000.000
Jumlah	27 RTLH		135.000.000

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

d. Kampung Zakat

Pada tahun 2024, Kementerian Agama menetapkan 6 kampung/ desa/ jorong di Sumatera Barat menjadi pilot proyek Kampung Zakat, bersama 112 Kampung/ Desa/ Jorong se Indonesia. Masing masing kampung/ desa/ jorong yang ditetapkan, mendapat dana stimulan dari Kementerian Agama, masing masingnya sebesar Rp. 20 Juta

<https://sumbar.antaranews.com/berita/634866/kemenag-tetapkan-enam-dusun-di-sumbar-jadi-proyek-contoh-kampung-zakat>

Tabel 1.74 : Kampung Zakat

Nama Kampung/ Desa/ Jorong	Dampak Perubahan
1. Desa Jorong Mangunai, Nagari Ampalu, Kecamatan Lima Puluh Kota (ditetapkan berdasarkan SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 202	- Bantuan stimulant dari Kementerian Agama sebesar Rp. 20 Juta, disalurkan kepada petani cabe dan telah dikelola oleh penerima manfaat, mulai dari proses tanam dan hingga panen. Namun tanaman cabenya mengalami penyakit dan ha - Bantuan stimulant dari Kementerian Agama sebesar Rp. 20 Juta, disalurkan kepada petani cabe dan telah dikelola oleh penerima manfaat, mulai dari proses tanam dan hingga panen. Namun tanaman cabenya mengalami penyakit dan ha.



Nama Kampung/ Desa/ Jorong	Dampak Perubahan
	• Bantuan stimulant dari Kementerian Agama sebesar Rp. 20 Juta, disalurkan kepada petani cabe dan telah dikelola oleh penerima manfaat, mulai dari proses tanam dan hingga panen. Namun tanaman cabenya mengalami penyakit dan hasil panen tidak maksimal. Bantuan dari Lembaga Amil Zakat untuk petani cabe sudah pada tahap panen dengan hasil dan harga cabe yang cukup bagus, sehingga kelompok ini sudah bisa menitipkan modal berikutnya pada toko ini sudah bisa menitipkan modal berikutnya pada toko pestisida dan pupuk. • Satu persatu LAZ ikut serta mengintervensi kegiatan di program kampung zakat. LAZ Rumah Yatim berpartisipasi menyalurkan dana yatim bagi anak-anak di Jorong Mangunai. • LAZ Dompot Dhuafa pusat dan BAZNAS RI secara terpisah juga telah melakukan peninjauan ke Jorong Mangunai untuk menggali potensi yang dapat dikembangkan di Jorong Mangunai.
2. Kampuang Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (ditetapkan berdasarkan SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 206 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024)	• Kampung Guo merupakan wilayah yang memiliki usaha budidaya ikan karena memiliki sungai yang membelah Kampung Guo • Budidaya ikan kolam air deras yang sudah berjalan selama beberapa bulan akan dialihkan menjadi budidaya melalui Bioflok • Budidaya dengan bioflok memerlukan keahlian atau keterampilan khusus dan secara bertahap telah dipelajari oleh masyarakat kelompok usaha • Saat ini telah dibangun sebanyak 20 unit kolam bioflok di lahan masyarakat dengan cara menyewa selama 5 tahun • Kolam bioflok belum dapat dioperasikan karena masih menunggu mesin yang dipesan langsung dari China melalui tenaga ahli yang memberikan pelatihan
3. Desa Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung (ditetapkan berdasarkan SK Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 208 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024)	• Berdasarkan Laporan dari Pengurus Kampung Zakat yang juga Penyuluh Agama Islam di Kecamatan tersebut, bahwa program Kampung Zakat di Nagari Guguk ada yang berjalan baik dan ada yang kurang baik. • Bantuan untuk usaha pertanian jagung dari Kementerian Agama sebesar Rp20 Juta dibagi ke dalam 3 titik lokasi penanaman. • Lokasi pertama berada di daerah yang cukup datar dan dekat dari sumber air, sementara dua lokasi lainnya berada di perbukitan yang jauh dari sumber air. • Pada waktu setelah penanaman terjadi musim kemarau, sehingga dua lokasi yang jauh dari sumber air bisa dikatakan • gagal, sementara yang satu lokasi lagi tumbuh cukup baik; • Pada waktu panen di satu lokasi yang jagungnya



Nama Kampung/ Desa/ Jorong	Dampak Perubahan
	tumbuh cukup baik berhasil panen lebih dari 1 ton jagung. • Dari panen tersebut mustahik yang memiliki kebun jagung telah berhasil menyetorkan zakatnya senilai Rp.600 ribuan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Nagari Guguk. • Saat ini lahan sudah dibersihkan dan siap untuk ditanam, namun kendala kemarau masih terjadi di wilayah Kabupaten Sijunjung sehingga dikuatirkan jika ditanam sekarang bibit akan mati
4.Desu Lumindai, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto	• Desa Lumindai, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto merupakan salah satu titik lokasi Kampung Zakat yang menerima bantuan dari kementerian Agama RI tahun 2024; • Berdasarkan Laporan dari Pengurus Kampung Zakat yang juga Sekretaris Desa Lumindai, bahwa program • Kampung Zakat di Desa Lumindai berjalan dengan baik walaupun progresnya dirasakan tidak terlalu signifikan Hal ini disebabkan antara lain : faktor cuaca khususnya bagi petani tembakau, masih terbatasnya kemampuan penerima manfaat untuk mengolah tembakau, belum adanya pesananan lanjutan bagi usaha tenunan dan persoalan pemasaran yang belum maksimal
5.Desu Joeong Bangkok, Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggal Selatan, Kabupaten Pasaman	• Bantuan untuk usaha pertanian jagung dari Kementerian Agama sebesar Rp 20 Juta telah dikelola oleh 10 orang penerima manfaat hingga proses tanam dan panen. • Bantuan juga diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pasaman sebanyak Rp.20 Juta untuk 10 orang penerima manfaat yang juga digunakan untuk pertanian jagung. • Bantuan juga diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pasaman sebanyak Rp.20 Juta untuk 10 orang penerima manfaat yang juga digunakan untuk pertanian jagung. • Dari laporan yang disampaikan, tanaman jagung telah dipanen dan menghasilkan panen yang cukup banyak, sehingga dari 20 orang penerima manfaat, sebanyak 13 orang telah berhasil menyalurkan zakatnya sesudah panen jagung. • Jumlah penerima manfaat juga telah bertambah sebanyak 3 orang dan total penerima manfaat saat ini sebanyak 23 orang. • Kearifan lokal menjadi kunci kesuksesan dari pertanian jagung oleh penerima manfaat ini, karena mereka satu komando dalam mengelola bantuan kampung zakat ini. • Kendala yang dihadapi saat ini adalah musim kemarau yang cukup panjang sehingga mereka belum bisa melakukan penanaman ulang. Masyarakat sudah melaksanakan shalat Istisqa' karena kesulitan air untuk



Nama Kampung/ Desa/ Jorong	Dampak Perubahan
	tanaman
6. Desa Gunuang Bungkuak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan	- Potensi yang dikembangkan di titik lokasi Kampung Zakat di Gunung Bungkuak Kec. IV Jurai adalah peternakan Kambing - Bantuan usaha yang diberikan senilai Rp.20 juta diperuntukan untuk pembuatan kandang dan pembelian kambing. - Setelah launching awal Januari 2025, kambing yang dimasukan k kandang sebanyak 6 ekor, dan saat ini sudah cukup besar. - Pengembangan dari peternakan kambing ini belum signifikan karena keterbatasan SDM yang benar-benar fokus dalam peternakan kambing

Sumber : Bidang Penais dan Pemberdayaan Zawa

2. Persentase amil yang bersertifikat

Pembinaan amil zakat di tahun 2024, dilakukan pada 30 orang perwakilan pengurus LAZNAS dan LAZ berskala Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat sebagai upaya meningkatkan program program pemberdayaan zakat di Sumatera Barat.

<https://sumbar.kemenag.go.id/berita/post/kemenag-sumbar-berikan-pembinaan-amil-zakat-tahun-2024>

Amil zakat di Sumatera Barat menjalankan berbagai program pendistribusian yang beragam, seperti bantuan kemanusiaan, program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi dan bantuan rumah layak huni. Jumlah Amil zakat di Sumatera Barat 350 orang sebagaimana yang dipublikasi oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024

Tabel 1.75 : Jumlah Amil berdasarkan status, 2024

Status Amil		Jumlah
Amil Tetap	Amil Kontrak	
136	114	350

Sumber : Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024, BAZNAS

A.1.3.10 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf (SK-24)

Tabel 1.76 : IKSK meningkatnya pengelolaan aset wakaf

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	61,25	61,25	100
2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	61,25	61,25	100
3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	75	75	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



1. Peningkatan kompetensi Nazhir

Berkolaborasi dengan BWI perwakilan Sumatera Barat, menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan program sertifikasi kompetensi nazhir. Program-program ini bertujuan untuk memastikan nazhir memahami tugas dan fungsinya dengan baik sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, sehingga mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif. Tercatat 330 nazhir sudah bersertifikat BNSP di Sumatera Barat

<https://www.sumbar.bwi.go.id/>

2. Optimalisasi wakaf

Tabel 1.77 : Jumlah tanah wakaf

Jumlah	Luas (Ha)	Sudah sertifikat			Belum sertifikat		
		Jumlah	Luas (Ha)	%	Jumlah	Luas (Ha)	%
5.959	675,34	3.885	417,81	65,20	2.074	257,53	34,80

Sumber : https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php

- a. Data tanah wakaf di Sumatera Barat yang tercatat di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama hingga 2024, sebanyak **5.959 bidang** dengan luas 675,34 Ha. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 3.885 (=65,20%) dengan luas 417,81 Ha, sedangkan 2.074 (=34,80%) dengan luas 257,53 Ha belum bersertifikat

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php

- b. Akta ikrar wakaf

Tabel 1.79, menjelaskan jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan selama tahun 2023-2024

Tabel 1.78 : Jumlah akta ikrar wakaf

Tahun	Terdaftar	Akta Ikraf Wakaf	
		Sudah Diterbitkan	Belum Diterbitkan
2023	66	66	-
2024	216	216	-

Sumber : Bidang Penerangan Agama Islam

- c. Pengumpulan wakaf uang oleh BWI Sumatera Barat di tahun 2024 mencapai Rp. 763.321.248,-

Bekerjasama dengan BWI Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melahirkan dua program inovasi pengembangan pengelolaan wakaf, yaitu wakaf madrasah dan wakaf jemaah haji dan umrah. Program yang dihadirkan untuk mengembangkan dan mamajukan per-wakaf-an di Sumatera Barat, yang dikemas dalam tag line satu wakaf untuk Sumatera Barat, seiring dengan program wakaf nasional, satu wakaf untuk Indonesia.



Gambar 1.7 : Penandatanganan Kerjasama Wakaf Madrasah dan Wakaf Jemaah Haji - Umrah



Sumber : <https://padek.jawapos.com/sumbar/2363768778/luncurkan-wakaf-madrasah>

Gambar 1.8 : Padang Kota Wakaf 2024



Sumber : <https://www.tempo.co/info-tempo/padang-resmi-menjadi-kota-wakaf-keenam-di-indonesia-1180206>

Pada 11 Desember 2024, Kota Padang resmi diluncurkan sebagai Kota Wakaf ke-6 di Indonesia, setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Kota Wakaf tahun 2024. Pemerintah Kota Padang akan fokus pada program seperti Gerakan Wakaf Uang untuk ASN, pembentukan regulasi yang memudahkan, sosialisasi manfaat wakaf, serta pengelolaan yang transparan dan professional

A.2 Kondisi umum bidang pendidikan

Bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum yang dikelola Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, persentase jumlah lembaga pendidikan Islam sebesar 14,86%, jumlah guru, 18,95 % dan jumlah siswa 15,60% Rasio guru terhadap siswa pada lembaga pendidikan Islam 1 : 9 di tahun 2023 dan 1 : 10 di tahun 2024. Rasio ini lebih baik bila dibandingkan lembaga pendidikan umum.

Tabel 1.79 : Jumlah lembaga, guru, siswa dan rasio guru terhadap siswa

Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga		Jumlah Guru		Jumlah Siswa		Rasio Guru Terhadap Siswa	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Dilingkungan Kementerian Agama								
RA	429	430	1.586	1.543	14.749	14.591	1 : 10	1 : 10
MI	159	159	2.649	2.590	27.790	28.259	1 : 11	1 : 11



Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga		Jumlah Guru		Jumlah Siswa		Rasio Guru Terhadap Siswa	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
MTs	413	417	10.075	9.252	95.911	94.058	1 : 10	1 : 10
MA	221	222	5107	4.637	37.323	37.507	1 : 8	1 : 8
Jumlah	1.222	1.228	19.417	18.022	175.773	174.415	1 : 9	1 : 10
Dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi								
TK	2.570	2.620	9.293	9.610	85.251	85.334	1 : 9	1 : 9
SD	4.212	4.219	48.547	49.301	591.637	585.597	1 : 12	1 : 12
SMP	858	865	17.939	18.146	201.502	204.214	1 : 11	1 : 11
SMA	338	345	11.140	10.893	153.535	157.273	1 : 14	1 : 14
SMK	212	216	7.463	7.153	88.282	85.619	1 : 12	1 : 12
Jumlah	8.190	8.265	94.382	95.103	1.120.207	1.118.037	1 : 12	1 : 12

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, Volume 55 Tahun 2025, halaman 246-285

A.2.1 Mendukung peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bermutu (Tujuan-4)

Untuk mendukung tujuan 4 peningkatan pesertan didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bermutu, dilakukan melalui pencapaian 13 SK (SK-25 sampai dengan SK- 37) dengan 41 IKSK

A.2.1.1 Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif (SK-25)

Penerapan kurikulum inovatif dan pola pembelajaran modern di lingkungan madrasah dan pondok pesantren di Sumtera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Transformasi dilakukan secara bertahap melalui penguatan integrasi nilai-nilai keagamaan, teknologi informasi, keterampilan hidup, dan model pembelajaran abad ke-21. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berhasil mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbagai pendekatan seperti blended learning, project-based learning, problem-based learning, dan integrasi STEAM. Peran guru dan kepala madrasah terus diperkuat sebagai agen perubahan melalui pelatihan, workshop, serta pendampingan intensif.

Secara keseluruhan, capaian program menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari adaptasi pembelajaran jarak jauh dan digitalisasi pada 2020, peningkatan kompetensi guru melalui Bimtek pada 2021, penguatan integrasi kurikulum keagamaan dan keterampilan di 2022, pengembangan laboratorium pembelajaran pada 2023, hingga puncaknya pada 2024 dengan lahirnya program unggulan seperti Smart Madrasah Libray, Madrasah Literasi Moderasi, serta penguatan Teaching Factory dan Life Skill Center.



Persentase madrasah yang menerapkan pola pembelajaran inovatif meningkat signifikan dari 75% pada 2020 menjadi 87,5% pada 2024, sementara lembaga diniyah juga menunjukkan perkembangan hingga 12%. Keseluruhan capaian ini menegaskan keberhasilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong transformasi pendidikan agama yang adaptif, digital, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Tabel 1.80 : IKSK meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase madrasah / pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	87,5	87,5	100
2	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	2	2	100
3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan	11	12	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum pada madrasah/ satuan pendidikan muadalah

Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas proses pendidikan agama dan keagamaan.

Tabel 1.81 : Jmlah madrasah yang menerapkan pembelajaran inovatif

Tahun	MI			MTS			MA			Total
	Negeri	Swata	Jumlah	Negeri	Swata	Jumlah	Negeri	Swata	Jumlah	
2024	62	63	125	112	206	318	48	112	160	825

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Dengan tercapainya 100% realisasi pada seluruh indikator, terlihat bahwa madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah, telah berhasil mengadopsi metode pembelajaran inovatif secara menyeluruh. Hal ini mendorong terjadinya transformasi pembelajaran dari model konvensional menuju pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi, dan kreativitas yang memperkuat kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta karakter peserta didik. Selain itu, pelaksanaan program keagamaan dan keterampilan di madrasah turut memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Inovasi program yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pembaruan metode pembelajaran, tetapi juga pada pengembangan kurikulum adaptif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan keterampilan abad ke-21. Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, serta integrasi pendidikan karakter telah memperkuat kualitas layanan pendidikan.



Madrasah yang menyelenggarakan program keagamaan dan kejuruan menjadi model pembelajaran holistik yang menggabungkan aspek spiritual, akademik, dan vokasional. Keberhasilan capaian 100% menunjukkan bahwa inisiatif ini tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi juga dijalankan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum di seluruh satuan pendidikan binaan.

Tabel 1.82 : Jumlah inovasi pembelajaran berbasis keagamaan

Jenjang Pendidikan				Inovasi Pembelajaran
RA	MI	MTs	MA	
-	159	417	222	Integrasi Sains dan Islam
-	159	417	222	Integrasi Materi Anti Narkoba dalam Pembelajaran
-	159	417	222	Integrasi Materi Anti Korupsi dalam Pembelajaran
-	159	417	222	Integrasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran
-	159	417	222	Program Tahfidz Qur'an dan Khatam Al-Qur'an
-	-	51	43	Program Bilingual Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
430	159	417	222	Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
-	159	417	222	Pesantren Kilat di Bulan Ramadhan
430	159	417	222	Program Tadarus Al Qur'an/ Baca Tulis Al-Quran
-	159	417	222	Gerakan Infak dan Wakaf di Madrasah
-	159	417	222	Muhadarah dan Praktek Ibadah
-	159	417	222	Praktek Dakwah dan Kutbah Jumat

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Selain metode pembelajaran inovatif, dukungan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren, dilakukan melalui Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren kepada 47 pesantren di Sumatera Barat

**Tabel 1.83 : Jumlah Pondok Pesantren
Penerima Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Pesantren
1	2021	2 Pesantren
2	2022	8 Pesantren
3	2023	37 Pesantren
Jumlah		47 Pesantren

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Jumlah pondok pesantren penerima bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren berdasarkan sebaran Kabupaten/Kota

**Tabel 1.84 : Sebaran Pondok Pesantren Penerima Bantuan Inkubasi Bisnis
Berdasarkan Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pesantren
1	Kabupaten Agam	8 Pesantren
2	Dharmasraya	2 Pesantren
3	Kota Pariaman	1 Pesantren
4	Kabupaten Pasaman	3 Pesantren



No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pesantren
5	Pasaman Barat	8 Pesantren
6	Kabupaten Solok	5 Pesantren
7	Kota Bukittinggi	1 Pesantren
8	Kota Padang	1 Pesantren
9	Kota Padang Panjang	1 Pesantren
10	Kota Payakumbuh	1 Pesantren
11	Kota Solok	1 Pesantren
12	Kabupaten Pesisir Selatan	5 Pesantren
13	Kabupaten Sijunjung	2 Pesantren
14	Kabupaten Tanah Datar	3 Pesantren
15	Kabupaten Padang Pariaman	4 Pesantren
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Pesantren
Jumlah		47 Pesantren

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Bekerjasama dengan UIN Imam Bonjol Padang, UIN Syekh M. Djamil Djambek Bukittinggi dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar diadakan Kemandirian Pesantren Expo 2023

Tabel 1.85 : Peserta Kemandirian Pesantren Expo Tahun 2023

No	Pondok Pesantren	Kabupaten/ Kota	Kategori Usaha
UIN Imam Bonjol Padang			
1	Darul Ulum	Padang	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
2	Nurul Yaqin Ambung Kapur	Padang Pariaman	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
3	Nurul Yaqin Al Hidayah	Padang Pariaman	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
4	MTI Ashabul Kahfi	Pesisir Selatan	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
5	Almadani	Pesisir Selatan	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
6	Hijrah Medinah	Pesisir Selatan	Garmen/Pakaian
7	Sabilul Jannah	Pesisir Selatan	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
8	Iqra'	Pesisir Selatan	Perindustrian
9	Alkahfi	Pasaman Barat	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
10	Darul Fikri	Pasaman Barat	Peternakan
11	M. Muhammadiyah Tamiang	Pasaman Barat	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
12	Darul Mursyidin	Pasaman Barat	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
13	Darussalam Pinaga	Pasaman Barat	Pertanian/Perkebunan
14	Darul Hikmah	Pasaman Barat	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
15	Arabi Darul Yamani	Pasaman Barat	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
UIN Syekh M. Djamil Djambek Bukittinggi			
1	Al-Ma'arif	Bukittinggi	Souvenir
2	Ashabul Yamin	Agam	AMDK
3	Tahfiz Qur'an Haji Nur Abdullah	Agam	Perindustrian
4	Al-Irsyad	Agam	Laundry



No	Pondok Pesantren	Kabupaten/ Kota	Kategori Usaha
5	Modern Diniyyah Pasia	Agam	Perdagangan
6	As-Syarif	Agam	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
7	Darul Makmur	Agam	Perdagangan
8	BNM Tanjung Mutiara	Agam	Garmen/Pakaian
9	Abi Center	Agam	Perindustrian
10	Kauman Muhammadiyah	Padang Panjang	Laundry
11	Syekh Ibrahim Kumpulan	Pasaman	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
12	Baina Annas Kotanopan Setia	Pasaman	Perikanan
13	Al-Madinatul Munawwarah	Dharmasraya	Garmen/ Pakaian
UIN Mahmud Yunus Batusangkar			
1	Thawalib Tanjung Limau	Tanah Datar	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
2	DM Sarek Sarumpun Batu Taba	Tanah Datar	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
3	Jabal Rahmah	Tanah Datar	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
4	MTI Paninggahan	Kabupaten Solok	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
5	Muhammadiyah Saningbakar	Kabupaten Solok	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
6	Syekh M. Muhsin	Kabupaten Solok	Perindustrian
7	Jabal Rahmah	Kabupaten Solok	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
8	Waratsatul Anbiya'	Kota Solok	Perdagangan
9	Ibnu Qoyyim	Payakumbuh	Perdagangan
10	Riadhus Sholihih	Sijunjung	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi
11	Darul Falah	Sijunjung	Toko, Warung, Minimarket, Koperasi

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

2. Program keagamaan pada madrasah

Berdasarkan PMA Nomor 60 Tahun 2015, MA Program Keagamaan (MA-PK) merupakan prototipe madrasah aliyah unggulan di bidang keagamaan. MA-PK merupakan salah satu program peminatan unggulan nasional dalam bidang keagamaan berbasis asrama yang menjadi bagian dari MA Reguler yang sudah ada.

Tabel 1.86 : Madrasah Program Keagamaan di Sumatera Barat, 2024

No	Nama Madrasah	Kabupaten/ Kota
1	MAN/MAK 1 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
2	MA Tarbiyah Islamiyah Candung	Kabupaten Agam

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

3. Program keterampilan/ kejuruan pada madrasah

Program keterampilan/ kejuruan di madrasah adalah program pendidikan yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk bekerja atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi setelah lulus. Program ini menggabungkan pendidikan formal dengan kompetensi vokasional (kejuruan) yang relevan, melalui teori dan praktik langsung, termasuk praktik kerja lapangan (PKL).



Tabel 1.87 : Madrasah keterampilan/ kejuruan di Sumatera Barat

No	Nama Madrasah	Program Keterampilan
1	MAN 1 Bukittinggi	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Tata Busana, Teknik Pengelasan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Multimedia
2	MAN 2 Bukittinggi	Tata Boga, Tata Busana, Multimedia, dan Teknik Instalasi Listrik
3	MAN 2 Padang	Tata Busana, Operator Komputer, Teknik Otomotif, Teknik Pengelasan dan Teknik Elektronik
4	MAN 3 Padang	Tata Busana, Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif
5	MAN 1 Payakumbuh	Teknik Pengelasan, Tata Busana, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Robotik
6	MAN 3 Payakumbuh	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Tata Busana
7	MAN 1 Solok Selatan	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Multimedia
8	MAN 2 Solok Selatan	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dan Agribisnis Perikanan
9	MAN 2 Sijunjung	Teknik Pengelasan, Tata Busana, Teknik Komputer dan Jaringan
10	MAN 3 Agam	Teknik Pengelasan dan Tata Busana
11	MAN 1 Tanah Datar	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Multimedia, Tata Busana, Tata Boga
12	MAN 1 Solok	Tata Busana, Tata Boga, Multimedia, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Robotik

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Selain Madrasah Program Keagamaan dan Madrasah Keterampilan/ Kejuruan, di Sumatera Barat ditetapkan juga Madrasah Penyelenggara Riset dan Madrasah Unggulan Akademik.

1. Madrasah penyelenggara riset

Berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nomor 6757 Tahun 2020, 20 MTsN di Sumatera Barat ditetapkan sebagai Madrasah Penyelenggara Riset. Madrasah penyelenggara riset adalah madrasah yang memiliki program khusus untuk membudayakan kegiatan penelitian di kalangan siswa dan guru, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Implementasinya bisa melalui pembelajaran berbasis riset, pembekalan keterampilan riset, dan kegiatan seperti Karya Ilmiah Remaja (KIR). Penunjukan 48 Madrasah Penyelenggara Riset (28 MAN dan 20 MTsN) di Sumatera Barat,

Tabel 1.88 : Madrasah Penyelenggara Riset Jenjang MTs

No	Nama Madrasah	Kabupaten/ Kota
1	MAN IC Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman
2	MAN 2 Agam	Kabupaten Agam
3	MAN 1 Agam	Kabupaten Agam
4	MAN Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya



No	Nama Madrasah	Kabupaten/ Kota
5	MAN 2 Bukittinggi	Kota Bukittinggi
6	MAN 1 Bukittinggi	Kota Bukittinggi
7	MAN 2 Padang	Kota Padang
8	MAN 2 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9	MAN 1 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
10	MA KKM Kauman Padang Panjang	Kota Padang Panjang
11	MAN Pariaman	Kota Pariaman
12	MAN 1 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
13	MAN 2 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
14	MAN 3 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
15	MAN Sawahlunto	Kota Sawahlunto
16	MAN 1 Padang Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman
17	MAN 1 Pasaman	Kabupaten Pasaman
18	MAN 1 Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
19	MAN 2 Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
20	MAN 3 Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat
21	MAN 1 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
22	MAN 2 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
23	MAN 2 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
24	MAN 1 Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
25	MAN 3 Solok	Kabupaten Solok
26	MAN 1 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
27	MAN 2 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
28	MAN 4 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
29	MTsN 1 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
30	MTsN 2 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
31	MTsN 1 Limah Pulu Kota	Kabupaten Lima Pulu Kota
32	MTsN 3 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
33	MTsN 6 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
34	MTsN 10 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
35	MTsN 12 Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar
36	MTsN 3 Padang	Kota Padang
37	MTsN 6 Padang	Kota Padang
38	MTsN 1 Sawahlunto	Kota Sawahlunto
39	MTsN 2 Sawahlunto	Kota Sawahlunto
40	MTsN 3 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
41	MTsN 4 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
42	MTsN 5 Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan
43	MTsN Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya



No	Nama Madrasah	Kabupaten/ Kota
44	MTsN 2 Solok	Kabupaten Solok
45	MTsN 1 Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
46	MTsN 6 Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
47	MTsN 1 Bukittinggi	Kota Bukittinggi
48	MTsN 1 Agam	Kabupaten Agam

Sumber : Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nomor 6750 Tahun 2020

2. Madrasah unggulan bidang akademik

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nomor 1.834 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021, MAN IC Padang Pariaman dan MAN 1 Bukittinggi di tetapkan sebagai madrasah unggul bidang akademik, bersama dengan 53 Madrasah Aliyah lainnya se Indonesia

A.2.1.2 Meningkatkan kualitas penilaian pendidikan (SK-26)

Peningkatan kualitas penilaian pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap profesionalisme pendidik serta akuntabilitas kinerja madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah. Dengan tercapainya 100% penilaian kinerja bagi guru madrasah, dan ustadz pendidikan diniyah, sebagai dasar penetapan tunjangan, program ini mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, kompetitif, dan berbasis prestasi. Selain itu, pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan serta terlaksananya asesmen kompetensi secara konsisten memperkuat motivasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan proses belajar mengajar berjalan selaras dengan standar mutu yang ditetapkan.

Tabel 1.89 : IKS meningkatkan kualitas penilaian pendidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	49,6	49,6	100
2	Persentase ustadz di pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	38,75	38,75	100
3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	51,25	0	0
4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	30	30	100
5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah	2	2	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Dalam aspek inovasi, program ini memanfaatkan pendekatan penilaian berbasis asesmen kompetensi, yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga karakter, literasi, dan kecakapan abad ke-21. Implementasi sistem penilaian digital serta integrasi teknologi evaluasi memungkinkan proses pemantauan kinerja pendidik dilakukan lebih cepat, objektif, dan terdokumentasi.





Selain itu, perluasan cakupan asesmen kompetensi siswa hingga 100% menjadi bukti adanya penerapan strategi evaluasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi penguatan mutu madrasah dan sekolah keagamaan secara terpadu

a. Asesmen Kompetensi Guru (AKG)

AKG bertujuan untuk mengukur dan memetakan kemampuan pedagogik serta profesional guru dan tenaga kependidikan (GTK), menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) agar kualitas pendidikan meningkat sesuai standar kompetensi. Hasil AKG madrasah dapat dilihat pada tabel 1.90. AKG PAI dari tahun 2020-2024 tidak ada, karena AKG GPAI baru dilaksanakan pada tahun 2025

Tabel 1.90 : Hasil AKG Madrasah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Madrasah	Hasil AKG				
		Mahir	Terampil	Cakap	Berkembang	Jumlah
RA	1.543	18	635	523	367	1.543
MI	2.590	112	1.864	410	212	2.590
MTs	9.252	638	6.992	1112	510	9.252
MA	4.637	323	3.683	514	118	4.637
Jumlah	18.022	1.091	13.174	2.559	1.207	1.091

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

b. Asesment Kompetensi Kepala (AKK) Madrasah

AKK dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan (manajerial, supervisi, kewirausahaan, kepribadian), dan perilaku pemimpin madrasah berdasarkan standar yang ditetapkan, guna memetakan kualitas kompetensi mereka sebagai dasar pengembangan profesi berkelanjutan (PKB) dan pengambilan kebijakan pendidikan madrasah.

Tabel 1.91 : Hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Lembaga	Nilai Asesmen				
		Mahir	Terampil	Cakap	Berkembang	Jumlah
RA	430	12	33	269	116	430
MI	159	28	112	15	4	159
MTs	417	67	310	32	8	417
MA	222	36	166	13	7	222
Jumlah	1.228	143	621	329	135	1.228

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Penguatan kompetensi tenaga pendidik pada madrasah dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan para pihak



Tabel 1.92 : Jumlah kegiatan penguatan kompetensi oleh AKG, KKG, dan MGMP

Tahun	Penguatan Kompetensi		
	AKG	KKG	MGMP
2021	2	172	179
2022	2	185	192
2023	3	196	206
2024	3	47	59

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

Pengawas madrasah berperan sebagai supervisor akademik dan manajerial, fasilitator, inovator, serta agen perubahan yang menjamin mutu pendidikan, membina profesionalitas guru, mengoptimalkan sumber daya madrasah, dan memastikan implementasi kebijakan pendidikan seperti merdeka belajar agar madrasah mampu menghasilkan lulusan berkarakter dan kompetitif di era digital. Mereka melakukan pembinaan berkelanjutan melalui supervisi klinis dan berbasis data, memastikan kesesuaian proses dengan standar nasional pendidikan, serta menjembatani kebutuhan antara guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 1.93 : Jumlah kegiatan pendampingan mutu oleh pengawas, 2024

Bentuk Kegiatan Pendampingan		Jenjang Pendidikan			
		RA	MI	MTs	MA
1	Pendampingan Akademik				
	a. Supervisi Pembelajaran:	2	4	4	4
	b. Penguatan Kurikulum:	2	4	4	4
	c. Pengembangan Profesional Guru	2	4	4	4
	d. Persiapan Asesmen	4	4	4	4
2	Pendampingan Manajerial				
	a. Tata Kelola Madrasah	1	2	2	2
	b. Manajemen keuangan	1	2	2	2
	c. Penguatan kepemimpinan	1	2	2	2

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prarana pendidikan (SK-27)

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah dan pondok pesantren selama periode 2020–2024 berjalan secara bertahap, terstruktur, dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Upaya ini menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan yang layak, penguatan infrastruktur pembelajaran, serta penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan modern.

Tabel 1.94 : IKS K meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	40,00	40,00	100



INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
2	Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana	59,75	59,75	100
3	Persentase MTs/ Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana	59,95	59,95	100
4	Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana	75,23	75,23	100
5	Persentase PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memiliki SPM sarana dan prasarana	82,2	82,2	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Capaian kinerja menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun, mulai dari 80% pada 2020 hingga mencapai rentang 82,2 % pada 2024. Program ini memperkuat fondasi layanan pendidikan keagamaan yang bermutu dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan SDM unggul berbasis infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan merata. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Madrasah ditujukan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal

Melalui pendataan komprehensif, rehabilitasi sarana dasar, modernisasi fasilitas TIK, pembangunan laboratorium, dan revitalisasi madrasah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berhasil memfasilitasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara signifikan

Sampai tahun 2024, kondisi bangunan Madrasah di Sumatera Barat (negeri dan swasta), 326 rusak ringan, 268 rusak sedang dan 184 rusak berat. Kondisi ini mendorong Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah.

Tabel 1.95 : Kondisi bangunan madrasah

Jenjang Pendidikan	Kondisi Bangunan		
	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
MI	59	59	41
Negeri	29	23	10
Swasta	30	36	31
MTs	193	113	91
Negeri	68	25	19
Swasta	135	88	72
MA	74	96	52
Negeri	28	12	8
Swasta	46	84	44
Jumlah	326	268	184

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah



Persentase jumlah RA, MI/Ula, MTs/ Wustha, MA/ Ulya dan SPM PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi sarana prasarana, sebanyak 58%, mencakup fasilitas minimal yang dimiliki, seperti: ketersediaan ruang kelas yang layak dan memadai, sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga, prasarana dasar seperti bangunan sekolah/pesantren, sanitasi, dan akses air bersih dan kelengkapan mebelair seperti meja dan kursi

Tabel 1.96 : Jumlah RA, MI/Ula, MTs/ Wustha, MA/Ulya dan PDF/ Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Memenuhi SPM sarana prasarana	
		Sudah	Belum
RA	430	172	258
MI	159	95	64
MTs	417	250	167
MA	222	167	55
PKPPS Ula	11	6	5
PKPPS Wustha	56	48	8
PKPPS Ulya	48	41	7
Jumlah	1343	779	564

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana madrasah, selama 2020-2024. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi peningkatan akses dan mutu madrasah dengan tujuan memastikan lebih banyak anak dapat bersekolah di madrasah (akses) dan pendidikan yang mereka terima berkualitas tinggi (mutu), relevan, dan memberikan keunggulan akademis serta non-akademis. Fasilitasi yang dilakukan, terdiri dari :

1. Revitalisasi madrasah

Diaksanakan pada 37 lokasi Madrasah (2 MIN, 16 MTsN dan 17 MAN) tersebar pada 15 Kabupaten/ Kota dengan total anggaran Rp. 141.731.991.000.-(seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan jumlah MIN, MTsN dan MAN yang ada di Sumatera Barat, maka persentase madrasah penerima proyek peningkatan prasarana madrasah di Sumatera Barat baru mencapai 15.77%

Tabel 1.97 : Revitalisasi Madrasah. 2020-2024

Tahun	Jenjang Pendidikan			Pembangunan
	MIN	MTsN	MAN	
2020		1	3	Gedung administrasi, Gedung Workshop, Asrama Siswa dan Ruang Kelas Baru
2021	1	4	6	Gedung Administrasi, Asrama Siswa, Ruang Kelas Baru, Asrama Siswa dan Ruang Kelas Baru dan Gedung Workshop
2022		3	4	Rung Kelas Baru



Tahun	Jenjang Pendidikan			Pembangunan
	MIN	MTsN	MAN	
2023	1	3	3	Rung Kelas Baru dan Gedung Workshop
2024		6	1	RKB Type 1 dan RKB Type 2

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

2. Bantuan rehab berat

Tabel 1.98 : Madrasah penerima bantuan rehab berat

Tahun	Nama Madrasah
2023	1. MAS Darussalam Dharrmasraya
	2. MTs Silayang Pasaman Barat
	3. MTs Nurul Falah Sijunjung
	4. MTs Muhammadiyah Kajai Pasaman Barat
	5. MTs Sabilul Jannah Pesisir Selatan
	6. MIS Muhammadiyah Pangkalan Lima Puluh Kota
	7. MIS Darul Ulya Solok Selatan
	8. MIS Miftahul Ulum Solok Selatan
	9. MIS Mardhatillah Pesisir Selatan

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

3. Bantuan PUPR (MYC)

Tabel 1.99 : Madrasah penerima bantuan PUPR

Nama Madrasah	Pembangunan
1. MIN 5 Pesisir Selatan	Rehabilitasi
2. MIN 2 Solok	Rehabilitasi
3. MTsN 7 Solok	Rehabilitasi
4. MAN 3 Solok	Rehabilitasi
5. MTsN 12 Tanah Datar	Rehabilitasi
6. MAN 1 Padang Panjang	Rehabilitasi
7. MIN 3 Padang	Rehabilitasi
8. MTsN 1 Pariaman	Rehabilitasi
9. MAN 1 Payakumbuh	Rehabilitasi
10. MTsN 6 Padang	Rehabilitasi

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

4. Bantuan Kinerja dan Afirmasi Madrasah

Tabel 1.100 : Madrasah penerima bantuan kinerja dan afirmasi madrasah

Nama Madrasah	Pembangunan
1. MTsN Al Hikmah Pasaman Barat	Rehabilitasi
2. MIS Tanjung Medan Padang Pariaman	Rehabilitasi

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah





A.2.1.4 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat (SK-28)

Sepanjang lima tahun implementasi, program menunjukkan perkembangan yang konsisten. Tahun 2020 menjadi fase pemulihan krisis akibat pandemi dengan penyaluran bantuan berbasis digital sebagai jaring pengaman pendidikan. Tahun 2021 dan 2022 menjadi momentum ekspansi program dan optimalisasi sistem data berbasis EMIS dan SIMPATIKA, memastikan bantuan menjangkau sekolah kecil, madrasah swasta, dan pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Pada 2023, mekanisme berbasis kinerja diterapkan untuk menjaga akuntabilitas, memastikan lembaga aktif dan layak menerima bantuan. Tahun 2024 menegaskan komitmen konsolidasi melalui sinkronisasi data, peningkatan inklusi, serta perhatian khusus terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peserta didik berkebutuhan khusus.

Tabel 1.101 : IKS K meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah siswa penerima BOS pada madrasah/ PDF Muadalah	168.873	168.873	100
2	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / PDF Muadalah	30	30	100
3	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1	1	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

BOS, PIP, BOP Pesantren dan BOP RA, selama periode 2020–2024 berperan signifikan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, daerah afirmasi, serta siswa berbakat. Melalui BOS, PIP, BOP Pesantren dan BOP RA, Kementerian Agama berperan menjaga keberlangsungan pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik.

Tabel 1.102 : Jumlah Siswa/ Santri Penerima BOS dan PIP

Jenjang Pendidikan		Jumlah					
		Siswa/ Santri	BOP RA	Penerima BOS	Penerima PIP	Penerima Beasiswa	Penerima Afirmasi
1	Madrasah						
	a. RA	14.591	14.408	-	-	-	-
	b. MI	28.259		28.009	28.009	-	-
	• Negeri	16.979		16.905	16.905	-	-
	• Swasta	27.790		11.104	11.104	-	-
	c. MTs	94.058		93.082	93.082	-	-
	• Negeri	57.319		57.126	57.126	-	-
	• Swasta	95.911		35.956	35.956	-	-
	d. MA	37.507		37.231	37.231	-	-
	• Negeri	23.770		23.666	23.666	-	-
	• Swasta	13.737		13.565	13.565	-	-



Jenjang Pendidikan		Jumlah					
		Siswa/ Santri	BOP RA	Penerima BOS	Penerima PIP	Penerima Beasiswa	Penerima Afirmasi
2	PKPPS	11.806	-	8.024	8.824	-	3.534
3	PDF/ Muadalah	650	-	196	428	-	153
3	SD Theologia Kristen	104		104	37		

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam dan Bimas Kristen

Program peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, wilayah afirmasi, serta peserta didik berbakat memberikan dampak langsung terhadap perluasan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Capaian 100% pada indikator jumlah penerima BOS dan PIP menunjukkan bahwa bantuan sudah tersalurkan secara optimal, sehingga siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya operasional. Selain itu, program ini membantu meminimalkan angka putus sekolah, memperkuat motivasi belajar peserta didik, serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah dan sekolah keagamaan.

Inovasi program terlihat melalui penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan berbasis data terpadu yang lebih akurat dan real time, integrasi sistem digital dalam verifikasi dan validasi peserta didik, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat distribusi anggaran. Selain itu, intervensi ini juga mendorong lahirnya model pendampingan sosial bagi peserta didik penerima bantuan, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan dukungan finansial tetapi juga bimbingan akademik dan penguatan karakter. Pendekatan digital, kolaboratif, dan terukur ini memastikan program berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan

Secara keseluruhan, program berjalan efektif, adaptif, dan semakin terintegrasi, dengan kecenderungan peningkatan penerima bantuan, penguatan sistem digital, dan perluasan jangkauan ke wilayah terpencil maupun kelompok rentan. Program ini tidak hanya mendukung peserta didik secara finansial, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan agama dan keagamaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan berbasis kebutuhan

A.2.1.5 Meningkatkan kualitas penanganan ATS (SK-29)

Sasaran dari kegiatan peningkatan kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah memastikan seluruh anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu atau wilayah rentan pendidikan, dapat kembali memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang layak. Kegiatan ini juga menargetkan peningkatan akurasi data ATS, penguatan kapasitas pendidik dan penyuluh dalam pendampingan anak, serta terciptanya kolaborasi efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menekan angka ATS di Provinsi Sumatera Barat



Tabel 1.103 : IKSX meningkatnya kualitas penanganan ATS

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	51,5	81,5	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren adalah mereka yang putus sekolah (di jenjang dasar/menengah) namun mengikuti program pendidikan nonformal di pesantren (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah) untuk mendapatkan ijazah kesetaraan (Paket B/C) yang setara dengan sekolah formal, menggabungkan pendidikan agama klasik (kitab kuning, sorogan/bandongan) dengan kurikulum umum agar bisa lanjut ke sekolah formal atau berwirausaha, mencakup siswa dari berbagai latar belakang yang tak bisa menempuh pendidikan formal biasa.

Tabel 1.104 : Jumlah ATS yang mengikuti dan menyelesaikan PKPPS

Lokasi Pondok Pesantren	Jumlah ATS yang mengikuti PKPPS
• Kota Padang	1.231
• Kota Padang Panjang	0
• Kota Bukittinggi	397
• Kota Payakumbuh	1.097
• Kota Pariaman	166
• Kota Solok	626
• Kota Sawahlunto	0
• Kabupaten Padang Pariaman	3.505
• Kabupaten Lima Puluh Kota	229
• Kabupaten Agam	527
• Kabupaten Sijunjung	75
• Kabupaten Pasaman	966
• Kabupaten Pasaman Barat	553
• Kabupaten Tanah Datar	522
• Kabupaten Solok	1.027
• Kabupaten Solok Selatan	117
• Kabupaten Pesisir Selatan	301
• Kabupaten Dharmasraya	156
• Kabupaten Kepulauan Mentawai	0
Jumlah	11.495

Sumber : EMIS 4.0 PD. PONTREN Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

A.2.1.6 Menguatnya pelayanan 1 Tahun pra sekolah (SK-30)

Pada tahun 2023, tercatatnya 15.477 siswa RA menerima manfaat dari BOP. Di tahun 2024, meskipun pengelolaan BOP sebagian besar beralih ke pusat, fokus tetap pada



penguatan tata kelola, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program.

Tabel 1.105 : Menguatnya pelayanan 1 Tahun pra sekolah

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	15.477	15.477	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk menempuh pendidikan dasar. Anak-anak yang memiliki persiapan lebih baik akan dapat menempuh pendidikan dasar dengan lebih baik.

Tabel 1.106 : Jumlah PAUD dan PAUD- HI Se Sumatera Barat

No	Nama Kota/ Kabupaten	PAUD			PAUD HI			
		TK	RA	Jumlah	RA - KB	TPA	SPS	Jumlah
Kabupaten								
1	Agam	303	44	347	16	1	17	34
2	Pasaman	130	3	133	3	8	2	13
3	Lima Puluh Kota	244	6	250	3	1	1	5
4	Solok	197	11	208	5	3	0	8
5	Padang Pariaman	162	5	167	2	2	6	10
6	Peisir Selatan	183	8	191	5	3	9	17
7	Tanah Datar	199	9	208	4	5	75	84
8	Sijunjung	152	41	193	16	4	0	20
9	Kepulauan Mentawai	113	20	133	8	0	0	8
10	Solok Selatan	97	15	112	6	1	21	28
11	Dharmasraya	142	28	170	11	6	8	25
12	Pasaman Barat	275	12	287	5	3	0	8
Kota								
13	Bukittinggi	59	46	105	18	19	11	48
14	Padang	339	14	353	6	16	85	107
15	Padang Panjang	19	20	39	8	7	0	15
16	Sawahlunto	36	27	63	10	2	60	72
17	Solok	19	72	91	30	6	0	36
18	Payakumbuh	50	34	84	14	7	0	21
19	Pariaman	46	15	61	4	0	11	15
Total		2.765	430	3.195	174	94	306	574

Sumber : <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/paud/080000/1>

Catatan : RA-KB = Kelompok Bermain; TPA = Taman Penitipan Anak; SPS = Satuan PAUD Sejenis

Pelayanan 1 tahun prasekolah bertujuan memastikan kesiapan anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar dengan menyediakan layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas dan inklusif. Melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP),



Kementerian Agama berkomitmen meningkatkan mutu Raudhatul Athfal (RA), dengan memperkuat kompetensi pendidik, sarana pembelajaran, serta kurikulum berbasis karakter dan nilai keagamaan. Selama periode 2020–2024, program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan usia dini, memberikan pelatihan bagi pendidik, serta memperkenalkan alat permainan edukatif berbasis nilai agama.

Perkembangan jumlah siswa kelas I MI/ Ula yang mengikuti pendidikan pada PAUD dari tahun 2020-2024, mengalami peningkatan dari tahun ketahun (table 1.107)

Tabel 1.107 : Jumlah siswa Kelas I MI/ Ula yang mengikuti pendidikan pada PAUD

2020	2021	2022	2023	2024
4.029	4.235	4.232	4.393	4.699

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.1.7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SK-31)

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu prioritas yang dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperkuat mutu layanan pendidikan agama dan keagamaan. Kegiatan ini difokuskan pada pengembangan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian bagi guru, ustadz, pamong, kepala satuan pendidikan, serta tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan supervisi berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan kinerja dan pengembangan profesional secara digital, sehingga para pendidik mampu beradaptasi dengan tuntutan pendidikan di era modern.

Tabel 1.108 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;	30,3	30,3	100
2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	61,0	61,0	100
3	Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	42,8	42,8	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Melalui berbagai inisiatif tersebut, kualitas dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan pada madrasah dan pondok pesantren di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dampaknya terlihat pada semakin optimalnya proses pembelajaran, manajemen pendidikan yang lebih efektif, serta meningkatnya prestasi dan motivasi kerja para pendidik. Dengan demikian, program ini berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.



Upaya meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan capaian kinerja yang optimal dengan rata-rata realisasi 100% pada seluruh indikator. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pembinaan berkelanjutan melalui sertifikasi ustadz, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan, serta penguatan forum profesional seperti KKG/MGMP dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG). Dampaknya terlihat pada meningkatnya profesionalisme, motivasi, dan kinerja para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.

Inovasi program diwujudkan melalui optimalisasi pelatihan berbasis digital, kolaborasi antarlembaga pendidikan, serta pemanfaatan platform daring untuk pengembangan kompetensi secara berkesinambungan, sehingga menghasilkan ekosistem pendidikan agama yang adaptif dan berdaya saing

A.2.1.8 Meningkatnya kualitas pendidik vokasi (SK-32)

Pendidikan vokasi, dirancang untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki kompetensi aplikatif, bukan sekadar pemahaman konseptual. Keberhasilan program vokasi sangat bergantung pada kualitas para pendidiknya, yang berperan sebagai fasilitator utama dalam mentransformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri (Du/Di).

Tabel 1.109 : Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi	12	12	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Pendidik vokasi yang berkualitas ditandai dengan kemampuan mereka untuk tidak hanya mengajar teori, tetapi juga membimbing siswa dalam aplikasi praktis melalui pendekatan *hands-on*, *minds-on*, dan *hearts-on* yang menciptakan suasana belajar kondusif dan menantang. Jumlah tenaga pendidik vokasi pada 12 MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan di Sumatera Barat sebanyak 42 orang, 51% memiliki sertifikat kompetensi

Tabel 1.110 : Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan, 2024

No	Nama Madrasah	Status Kepegawaian		Bersertifikat Kompetensi	Pembantu Instruktur
		PNS/ PPPK	Non PNS		
1	MAN 1 Bukittinggi	5	3	5	2
2	MAN 2 Bukittinggi	1	2	1	1
3	MAN 2 Padang	5	0	5	0
4	MAN 3 Padang	3	1	2	0
5	MAN 1 Payakumbuh	2	3	1	0
6	MAN 3 Payakumbuh	0	1	1	5
7	MAN 1 Solok Selatan	0	3	0	0



No	Nama Madrasah	Status Kepegawaian		Bersertifikat Kompetensi	Pembantu Instruktur
		PNS/ PPPK	Non PNS		
8	MAN 2 Solok Selatan	0	0	1	0
9	MAN 2 Sijunjung	0	2	2	0
10	MAN 3 Agam	0	2	2	0
11	MAN 1 Tanah Datar	1	0	1	0
12	MAN 1 Solok	0	0	0	0
Jumlah		17	17	21	8

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.1.9 Meningkatkan kualitas pendidik profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik (SK-33)

Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui penguatan kualifikasi pendidik merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan berdaya saing. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan guru agar memenuhi standar minimal kualifikasi akademik, melalui fasilitasi studi lanjut, pelatihan profesional, serta sertifikasi kompetensi.

Tabel 1.111 : IKS meningkatkan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG	5,5	5,5	100
2	Persentase GPAI yang mengikuti PPG	81,5	81,5	100
3	Persentase GPA berkualifikasi minimal S1	83,25	83,25	100
5	Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima bea siswa S2	2,2	0	-

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Peningkatan kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik menunjukkan capaian optimal dengan realisasi 100% walaupun pada indikator pemberian beasiswa S2 bagi calon pengawas madrasah tidak tercapai karena tidak adanya alokasi anggaran. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan profesionalisme guru madrasah dan guru pendidikan agama melalui pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik minimal S1

Selain itu, dilakukan juga pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi guru untuk memperkuat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik di era digital.



Tabel 1.112 : Jumlah Guru Madrasah dan GPAI yang sudah/ belum mengikuti PPG

Jenjang Pendidikan	Sudah	Belum
	PPG	
Guru Madrasah		
RA	239	164
MI	805	656
MTs	386	286
MA	195	89
GPAI pada Sekolah Umum		
TK – SD	1.421	3106
SMP	389	644
SMA/SMK	105	582

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, kualitas guru madrasah dan GPAI pada sekolah umum terus meningkat, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun profesionalisme. Dampaknya terlihat pada perbaikan kualitas proses pembelajaran, peningkatan hasil belajar peserta didik, serta tumbuhnya budaya belajar sepanjang hayat di kalangan pendidik. Inovasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi dengan perguruan tinggi keagamaan, dan pengembangan sistem pelatihan berbasis digital yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lapangan, sehingga kualitas pendidik dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Dampaknya terlihat pada meningkatnya kompetensi pedagogik dan profesional guru, terciptanya proses pembelajaran yang lebih inovatif dan berorientasi pada mutu, serta bertumbuhnya motivasi pendidik untuk terus mengembangkan diri. Inovasi program diwujudkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi keagamaan, pemanfaatan sistem pembelajaran daring dalam PPG, serta penguatan mekanisme pembinaan berkelanjutan berbasis digital, sehingga kualitas tenaga pendidik semakin unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Tabel 1.113 : Jumlah Guru Madrasah/ Guru PAI pada Sekolah Umum tersertifikasi

Jenjang Pendidikan	Sudah	Belum
Madrasah		
RA	993	1.615
MI	3.544	5.491
MTs	1.708	2,752
MA	342	1.180
Sekolah Umum		
TK	72	205
SD	3291	2,901
SMP	751	644
SMA/SMK	729	582

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam



Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik lainnya, yang diukur dari bersertifikat / tidaknya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tahun 2020 tenaga kependidikan lainnya yang belum memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 66 orang dan di tahun 2024 menjadi 221 orang

Tabel 1.114 : Jumlah tenaga pendidik lainnya pada madrasah bersertifikat kompetensi

Jenjang Pendidikan	Bersertifikat Kompetensi	Tidak Bersertifikat Kompetensi	Jenis Kompetensi
MI	66	93	Pustakawan
MTs	123	293	Laboran,Pustakawan
MA	52	170	Laboran,Pustakawan

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.1.10 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi (SK-34)

Penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi madrasah dan pondok pesantren, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), penguatan akreditasi eksternal, dan peningkatan kapasitas manajemen mutu di madrasah. Sejak 2020, program ini melibatkan pemetaan capaian mutu, pendampingan akreditasi, dan penerapan SPMI digital.

Tabel 1.115 : Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	560	560	100
2	Jumlah pendidikan diniyah /muadalah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	18	18	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Akreditasi madrasah, ditujukan untuk menilai dan menetapkan kelayakan serta mutu program pendidikan yang dijalankan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, **dan menjadi** dasar untuk pembinaan serta pengembangan madrasah secara berkelanjutan.

Tabel 1.116 : Akreditasi Madrasah

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Akreditasi			Belum Terakreditasi
		A	B	C	
MI	159	39	74	35	1
Negeri	62	32	30		=
Swasta	97	7	44	35	1
MTs	417	108	175	124	2
Negeri	112	83	26	3	=
Swasta	305	25	149	121	2



Jenjang Pendidikan	Jumlah	Akreditasi			Belum Terakreditasi
		A	B	C	
MA	222	65	92	58	1
Negeri	48	43	5		-
Swasta	174	22	87	58	1
PKPPS	79	13	23	1	-

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

Selama empat tahun, 19 madrasah berhasil meningkatkan status akreditasi dari "B" ke "A" atau "Unggul". Pada 2024, program berhasil menyempurnakan integrasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, dengan pengembangan dashboard monitoring mutu berbasis data EMIS dan hasil akreditasi. Pendampingan berkelanjutan ini membuktikan efektivitasnya dalam memastikan pendidikan keagamaan yang bermutu, terukur, dan berdaya saing di tingkat daerah.

A.2.1.11 Meningkatnya budaya mutu pendidikan (SK-35)

Peningkatan budaya mutu pendidikan pada madrasah dan pesantren, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keunggulan, kompetisi sehat, dan inovasi di kalangan peserta didik. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan partisipasi siswa dan santri dalam berbagai ajang kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta mendorong tumbuhnya karakter unggul, sportivitas, dan rasa percaya diri.

Tabel 1.117 : Meningkatnya budaya mutu pendidikan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	75	75	100
2	Persentase siswa/ santri madrasah/ pendidikan diniyah/ PDF yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1,2	1,2	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

1. Prestasi siswa

Beberapa prestasi diraih siswa Madrasah pada ajang kompetisi tingkat nasional, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mengembangkan karakter dan kemampuan siswa secara holistik. Inovasi dan ekspansi digital dalam kompetisi, serta konsistensi dalam meraih prestasi tingkat nasional, menjadikan budaya mutu pendidikan sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang kompetitif dan berdaya saing global

Tabel 1.118 : Jumlah siswa berprestasi (talent pool), 2024

Jenjang Pendidikan				Jumlah
RA	MI	MTs	MA	
-	25	158	83	266

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah



2. Daya tampung lembaga pendidikan Islam

Daya tampung RA, MI, MTs dan MA, dibandingkan dengan animo masyarakat ditahun 2024, mencapai 78,12%. Persentase daya tampung tertinggi pada lembaga RA. Kondisi ini menunjukan bahwa, lembaga pendidikan agama Islam menjadi pilihan masyarakat walaupun daya tampungnya terbatas.

Tabel 1.119 : Animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam

Jenjang Pendidikan	Jumlah	
	Pendaftaran Calon Siswa Baru	Diterima sebagai siswa baru
RA	15.321	14.594
MI	33.911	28.360
MTs	122.275	91.807
MA	48.759	37.321
Jumlah	220.266	172.082

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

3. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen kompetisi

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) digunakan sebagai data diagnostik untuk referensi akademik dalam mendiagnosis kompetensi siswa, serta sebagai bahan intervensi untuk perbaikan pembelajaran dan kebijakan di madrasah, termasuk penguatan moderasi beragama dan karakter sosial budaya.

Bila dilihat dari jumlah peserta, pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022-2023

Tabel 1.120 : Penyelenggaraan asesmen kompetisi siswa

Assesmen	Jumlah Peserta								
	2022			2023			2024		
	MI	MTs	MA	MI	MTs	MA	MI	MTs	MA
• AKMI	6.232	-	-	13.580	10.080	6.995	350	487	418
• AM	3.643	31.202	11.894	3.852	30.090	11.706	4.222	31.876	12.302

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

4. Rapor pendidikan

Hasil rapor pendidikan madrasah, memberikan gambaran terintegrasi tentang mutu lembaga pendidikan Islam berbasis data Asesmen Nasional, meliputi hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan layanan, pengelolaan sekolah, dan sumber daya manusia. Dari tahun 2022-2024 memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada semua jenjang pendidikan



Tabel 1.121 : Rapor Pendidikan Madrasah Sumatera Barat

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta AN			Rapor Pendidikan	Tahun		
	2022	2023	2024		2022	2023	2024
MI	5.255	5.678	4.072	Literasi Membaca	64,10	65,12	65,84
				Numerasi	51,25	51,61	61,49
				Nilai Karakter	50,68	54,21	53,35
				Kualitas Pembelajaran	57,50	57,89	57,03
MTs	13,500	13.235	13.851	Literasi Membaca	68,50	69,18	69,20
				Numerasi	60,68	61,88	65,62
				Nilai Karakter	51,66	52,71	51,96
				Kualitas Pembelajaran	58,50	60,17	57,97
MA	5.599	4.971	5.586	Literasi Membaca	69,25	70,96	69,73
				Numerasi	61,85	63,85	67,76
				Nilai Karakter	53,45	54,79	53,82
				Kualitas Pembelajaran	59,68	60,39	59,00

Sumber : <https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>

A.2.1.12 Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (SK-36)

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya terfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan budaya belajar yang sehat dan lingkungan madrasah dan pondok pesantren, yang terbebas dari kekerasan. Menciptakan suasana pembelajaran yang aman, ramah anak, serta mendukung perkembangan karakter positif peserta didik menjadi hal yang sangat penting.

Tabel 1.122 : IKSK meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	82,5	82,5	100
2	Persentase pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	43,75	43,75	100
3	Persentase Kepala Pendidik an diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar nyaman dan aman	20	20	100
4	Persentase madrasah yang ramah anak	65	65	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Melalui integrasi pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran, pendampingan dari kepala satuan pendidikan, serta pengembangan sekolah ramah anak, diharapkan tercipta ekosistem belajar yang dapat memotivasi siswa, mengurangi kekerasan, dan meningkatkan hubungan harmonis di antara warga sekolah.



Madrasah dan pesantren, telah berhasil mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, menciptakan budaya belajar yang nyaman dan aman, serta mengembangkan sekolah ramah anak. Inovasi yang dilakukan melalui pendampingan pada kepala pendidikan diniyah/muadalah dan penerapan nilai karakter positif, telah menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih humanis, inklusif, dan berkualitas, selaras dengan visi pendidikan nasional yang berfokus pada kesejahteraan dan perkembangan karakter siswa.

Tabel 1.123 : Madrasah ramah anak/ramah layanan dan inklusi

Jenjang Pendidikan	Jumlah
MI	40
Negeri	18
Swasta	22
MTs	78
Negeri	37
Swasta	41
MA	62
Negeri	30
Swasta	32
Jumlah	182

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah

A.2.1.13 Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan (SK-37)

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda, serta mengembangkan pendidikan kepramukaan di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda melalui pembinaan organisasi siswa dan gugus pramuka, dengan fokus pada pelatihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lapangan seperti Perkemahan Jumat Sabtu (Perjusa) dan Kemah Pramuka Madrasah Nasional (KPMN).

Tabel 1.124 : IKS K meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	75	75	100
2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	55,5	55,5	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Dampak dari program ini terlihat pada keberhasilan peningkatan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini tercermin dari persentase rata rata realisasi



mencapai 100% pada indikator jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler dan gugus pramuka yang dibina. Inovasi yang dihasilkan melalui program ini mencakup pembinaan kepemimpinan yang terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan gerakan pramuka, serta sinergi yang kuat antara pendidikan keagamaan dan pengembangan karakter melalui aktivitas kepramukaan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat karakter siswa, tetapi juga menciptakan model pembelajaran yang holistik, menggabungkan pendidikan akademik, kepemimpinan, dan kebangsaan dalam satu wadah

A3 Kondisi umum bidang tata kelola

A.3.1 Mendukung peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive (Tujuan-5)

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mengukur kualitas peningkatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive menggunakan hasil capaian kinerja 14 SK (SK 38 sampai dengan SK-51

A.3.1.1 Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum (SK-38)

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika hukum. Hasil dari kegiatan ini mencakup peningkatan kualitas penerbitan dan pengawasan produk hukum internal, menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan, serta menyelesaikan permasalahan hukum dengan cepat dan tuntas. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum ASN dan masyarakat juga menjadi prioritas melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi regulasi keagamaan.

Tabel 1.125 : IKS meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	88,33	88,33	100
2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	90,92	90,92	100
3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	20,67	20,67	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Selama periode 2020–2024, kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas unit hukum melalui digitalisasi layanan, penyusunan pedoman penanganan kasus hukum, dan pengembangan sistem pelaporan hukum yang lebih efisien. Pada tahun 2024, program ini mencapai sasaran dengan penyelesaian 100% kasus hukum, penguatan fungsi hukum kelembagaan, dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi ASN. Dengan demikian, layanan hukum yang responsif dan solutif dapat



terwujud, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ASN, lembaga pendidikan, dan masyarakat penerima layanan keagamaan

Pada tahun 2022, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menandatangani MOU Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Gambar 1.9 : Penandatanganan MOU Penanganan Masalah Hukum Bidang perdata dan Tata Usaha Negara



Sumber : Tim Kerja Hukmas

Dampak dari program ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum, terbukti dengan tercapainya 100% realisasi pada semua indikator kinerja yang ditetapkan. Persentase produk hukum yang diterbitkan dan kasus hukum yang terselesaikan masing-masing mencapai 100%, mencerminkan efektivitas sistem hukum yang terintegrasi dengan baik dan mampu memberikan solusi cepat bagi ASN serta masyarakat.

Inovasi yang dihasilkan antara lain melalui pendigitalan produk hukum dan peningkatan jumlah penyuluhan hukum, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan ASN dan masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika hukum yang ada.

Di tahun 2022, juga dilakukan penandatanganan 12 Naskah Kerjasama (MOU) dengan berbagai pihak:

Tabel 1.126 : Daftar MOU Dengan Pihak Kedua

No	Dengan	Tentang
1	Pemerintah Daerah Sumatera Barat	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Sektor Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Kelautan dan Perikanan



No	Dengan	Tentang
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Balai Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama	Penyelenggaraan Pelatihan Calon Kepala Madrasah dan Pengawas
3	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
5	PT Bank Nagari	Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Intensif Ustadz
6	Rumah Sakit Hermina Padang	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Di Rumah Sakit Hermna Padang
7	Rumah Sakit Universitas Andalas Padang	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Non Muslim Di Rumah Sakit Universitas Andalas Padang
8	Rumah Sakit Aisyiyah Padang	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Non Muslim Di Rumah Sakit Aisyiyah Padang
9	Rumah Sakit Arosuka Solok	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Di Rumah Sakit Arosuka Solok
10	Rumah Sakit Harapan Ibuda Batusangkar	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Di Rumah Sakit Umum Harapan Ibunda Batusangkar
11	Rumah Sakit Bayangkara Tk III Padang	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Muslim dan Non Muslim Di Rumah Sakit Bayangkara Tk III Padang
12	Rumah Sakit Tentara dr Reksodiwiryo Padang	Pelayanan Bimbingan Rohani Pasien Muslim dan Non Muslim Di Rumah Sakit Tk III dr Reksodiwiryo Padang
13	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Gefisika Stasiun Geofisika Padang Panjang	Hisab Rukyat
14	DMI Sumatera Barat	Ketahanan Keluarga
15	Lembaga Permayarakatan	Pembinaan Kerohanian Warga Binaan

Sumber : Tim Kerja Hukmas

A.3.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri (SK-39)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kerjasama luar negeri, khususnya dalam pengawasan kegiatan keagamaan oleh WNA di Sumatera Barat, memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional, dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Fokusnya adalah pada layanan izin kegiatan keagamaan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta membangun citra positif Indonesia melalui tata kelola yang harmonis dan menghargai keberagaman

Tabel 1.127 : IKS meningkatkan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
	TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase rekomendasi izin orang asing	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024



A.3.1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (SK-40)

Peningkatan pengelolaan ASN di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, difokuskan pada pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN, serta memperkuat sistem merit melalui rekrutmen berbasis kompetensi. Kegiatan ini juga mendorong digitalisasi layanan kepegawaian untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung transformasi menuju pemerintahan yang lebih profesional.

Tabel 1.128 : IKS meningkatkan kualitas pengelolaan ASN

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	79,5	79,5	100
2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	92	92	100
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	93,75	93,75	100
4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (min 71)	78,75	78,75	100
5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	92,5	92,5	100
6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	96,25	96,25	100
7	Persentase data ASN yang diupdate	95,75	95,75	100
8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	93,25	93,25	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Inovasi yang diterapkan, seperti digitalisasi layanan administrasi kepegawaian dan pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dalam penempatan jabatan, berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan ASN. Terlebih lagi, dengan adanya pemutakhiran data ASN yang mencapai 99% dan tindak lanjut permasalahan kepegawaian yang mencapai target, program ini memastikan pengelolaan ASN berjalan lebih akurat dan responsif. Pencapaian ini juga berdampak pada peningkatan profesionalisme ASN, dengan 100% ASN memenuhi kriteria kompetensi jabatan dan lebih dari 70% hasil asesmen sesuai dengan jabatan yang diemban, yang mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih profesional dan adaptif. Selama 2020–2024, kegiatan ini berhasil memperbarui data ASN, memperkuat sistem merit, dan meningkatkan profesionalisme ASN melalui asesmen dan pelatihan.

Tabel 1.129 : Jumlah pegawai berdasarkan jabatannya

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.a	1
2	Eselon III.a	24



No	Jabatan	Jumlah
3	Eselon III.b	3
4	Eselon IV.a	101
5	Eselon IV.b	16
6	Eselon V.a	134
7	Guru	8.048
8	Jabatan Pelaksana	2.745
9	Penyuluh Agama	1.140
10	Penghulu	401
11	Pengawas	136
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran	118
13	Pranata Keuangan	96
14	Jabatan Fungsional Umum	61
15	Pranata Komputer	52
16	Analisis SDM Aparatur	46
17	Perencana	46
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	44
19	Arsiparis	36
20	Pranata Humas	31
21	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	28
22	Pengawas Jaminan Produk Halal	21
23	Analisis Hukum	4
24	Pranata SDM Aparatur	3
25	Pustakawan	3
26	Analisis Kebijakan	2
27	Statistisi	2
28	Pamong Belajar	1
29	Pamong Budaya	1
30	Penerjemah	1
31	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
Jumlah		13.346

Sumber : aplikasi simpeg,kemenag, go.i

A.3.1.4 Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan (SK-41)

Pengelolaan keuangan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian anggaran. Sejak tahun 2020, upaya penguatan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2024, hampir seluruh satuan kerja telah menerapkan PIPK dengan tingkat efektivitas mencapai 99%, sementara realisasi anggaran mencapai 97,8%, mencerminkan pencapaian pengelolaan keuangan yang optimal dan efisien.



Keberhasilan program ini juga tercermin dalam prestasi yang diraih, seperti penghargaan dari DJPB sebagai peringkat ketiga nasional dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2024. Penyusunan laporan keuangan semesteran tetap tepat waktu, serta penyelesaian kasus kerugian negara yang konsisten di angka 80%, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan. Dengan implementasi sistem berbasis digital yang semakin kuat, program ini mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Tabel 1.130 : IKS K meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100
2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	98,6	98,6	100
3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	98,5	98,5	100
4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	98,1	98,1	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Pengelolaan manajemen keuangan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi dengan mencapai 100% penyusunan laporan keuangan tepat waktu sesuai standar. Penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) mencapai target 100% satuan kerja yang menerapkannya. Realisasi anggaran optimal dan penyelesaian kerugian negara yang konsisten menegaskan keberhasilan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Inovasi digital dan sistem pengendalian internal yang lebih baik turut mempercepat pelaporan dan pengawasan, mendukung reformasi birokrasi yang efisien dan transparan

A.3.1.5 Meningkatnya pengelolaan BMN (SK-42)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian integral dari penerapan prinsip good governance dan clean government. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan legalitas aset, meningkatkan efisiensi pemanfaatan, serta menyusun data BMN yang valid dan terintegrasi dengan sistem nasional. Pencapaian utama meliputi sertifikasi 100% tanah aset, penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN yang mencapai 100%, serta pelaksanaan opname fisik (OP) yang mencapai 100% pada tahun 2020. Selain itu, penguatan sistem dan kepatuhan terhadap regulasi melalui rekonsiliasi data dan bimbingan teknis dilakukan pada tahun 2021, serta optimalisasi pemanfaatan BMN untuk mendukung pelayanan publik di tahun 2022.



Tabel 1.131 : Meningkatnya pengelolaan BMN akuntabel

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	87,60	87,60	100
2	Persentase tanah yang bersertifikat	94,35	94,35	100
3	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	95,82	95,82	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Pada tahun 2023, fokus program beralih pada digitalisasi dan integrasi pengelolaan BMN, dengan penggunaan aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap secara penuh, serta penerapan geo-tagging untuk memastikan validitas aset. Tahun 2024 menjadi puncak dari program ini, dengan penetapan status penggunaan BMN mencapai 100%, seluruh tanah aset telah bersertifikat dan terdokumentasi digital, serta opname fisik (OP) BMN mencapai 100%. Program ini berhasil mencapai zero temuan dalam audit internal maupun eksternal, mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

A.3.1.6 Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi (SK-43)

Tabel 1.132 : Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase satuan organisasi /kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	85	100
2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	72,25	72,25	100
3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	94	94	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Penataan dan penguatan manajemen organisasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berhasil meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi melalui digitalisasi kinerja ASN, dengan pelaporan SKP harian berbasis digital. Pembaruan rutin SOP dan peta proses bisnis memastikan keselarasan antarunit, sementara evaluasi kinerja secara berkala memperkuat budaya berbasis hasil. Integrasi pengawasan internal dilakukan melalui tindak lanjut digital dan rapat monev yang dilakukan secara rutin dan berkala setiap senin diminggu pertama dan ketiga

A.3.1.7 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi (SK-44)

Reformasi Birokrasi (RB) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.



Sejak 2020, program ini fokus pada evaluasi implementasi RB di seluruh satuan kerja, pembinaan Zona Integritas (ZI), dan pembentukan agen perubahan untuk mendorong inovasi layanan publik berbasis digital. Pada 2021 hingga 2023, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memperluas implementasi ZI, meningkatkan kualitas layanan, dan menguatkan budaya kerja dengan nilai-nilai **BerAKHLAK**, serta memperkenalkan sistem reward and punishment berbasis kinerja

Tabel 1.133 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	56,67	56,67	100
2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	53,33	53,33	100
3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	38,33	38,33	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Hasil penilaian mandiri terhadap Pembangunan Zona Integritas pada aplikasi.pmpzi.kemenag.go.id, diperoleh gambaran sebagai berikut

Tabel 1.134 : Nilai Pembangunan Zona Integritas, 2020-2024

Penilaian Mandiri (Internal)				Penilaian Tim TPI (Eksternal)			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
97,84	20,02	85,69	91,5	30,59	-	-	31,1

Sumber : pmpzi.kemenag.go.id

A.3.1.8 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran (SK-45)

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah berhasil membangun sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi dengan baik. Pada tahun 2020 hingga 2024, output perencanaan berbasis data terus meningkat, mencapai 100% pada tahun 2024, yang memastikan efektivitas perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program.

Selain itu, sinkronisasi dokumen perencanaan (Renja dan Renstra) juga telah mencapai 100%, menjamin keselarasan antara tujuan strategis dan program kerja. Implementasi aplikasi E-Planning dan SMART DJA mendukung digitalisasi perencanaan, memperkuat akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Tabel 1.135 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	92,50	92,50	100
2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	92,25	92,25	100



INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindak lanjuti	93,25	93,25	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Kolaborasi antar unit kerja (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota serta Madrasah Negeri) dan dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga dan ormas Keagamaan dalam penyusunan Renja, dengan 75% tindak lanjut yang mencakup berbagai kegiatan lintas lembaga di bidang pendidikan dan keagamaan. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan koordinasi dan integrasi yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1.136 : Nilai IKPA 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
89.79	93.8	95.81	94.72	91.7

Sumber : emonev,dja.kemenkeu

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, telah berhasil mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi dengan sistem digital, seperti E-Planning, E-Monev, dan SMART DJA, untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam setiap langkah perencanaan. Dengan capaian 100% dalam keselarasan Renja–Renstra, output perencanaan yang berbasis data, serta tindak lanjut kerjasama yang ditindaklanjuti, program ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan data-driven planning, serta sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, memperkuat transparansi, koordinasi lintas sektor, dan mempercepat evaluasi kinerja melalui monev triwulanan. Inovasi ini menciptakan sistem perencanaan yang lebih terukur, responsif, dan adaptif, mendukung terwujudnya birokrasi yang unggul dan pelayanan publik yang lebih baik.

A.3.1.9 Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran (SK-46)

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan selama periode 2020–2024 difokuskan pada peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan anggaran yang akurat dan tepat waktu, serta memperkuat sistem pelaporan yang terintegrasi. Melalui penggunaan aplikasi digital seperti E-Monev Bappenas, SMART DJA, dan SAKTI, berhasil memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan, dengan laporan capaian kinerja meningkat menjadi 96% pada tahun 2023. Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi nasional juga mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 80% pada tahun 2024.

Selama implementasi program ini, fokus utama juga diberikan pada penguatan evaluasi berbasis hasil yang mendukung perbaikan perencanaan tahun berikutnya. Penggunaan sistem monev yang terintegrasi dengan Dashboard Monitoring Kinerja dan Anggaran, serta pelaksanaan evaluasi berbasis Evidence-Based Policy, telah memperkuat akuntabilitas dan transparansi.



Capaian ini menegaskan komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan dan penganggaran nasional yang lebih efisien.

Tabel 1.137 : Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96,50	96,50	100
2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindak lanjuti	95,00	95,00	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Selama periode 2020–2024, berhasil meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan memastikan bahwa 100% laporan capaian kinerja memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Inovasi dalam penggunaan sistem digital seperti E-Monev Bappenas dan SMART DJA telah memungkinkan integrasi pelaporan yang lebih efisien, mendukung pemantauan yang lebih akurat, serta memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Dengan tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi mencapai 100%, program ini telah memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan di bidang agama, bidang pendidikan agama dan keagamaan serta bidang tata kelola

A.3.1.10 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor (SK-47)

Tabel 1.138 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		96,32	96,32	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Peningkatan sarana dan prasarana kantor menjadi kunci untuk mendukung efisiensi pelayanan publik dan transformasi digital. Selama 2020–2024, program ini fokus pada pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai SBSK Kementerian Keuangan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Langkah awal meliputi inventarisasi aset, rehabilitasi ruang pelayanan publik, serta pengadaan peralatan digital. Tahun 2022 fokus pada penguatan infrastruktur jaringan dan ruang PTSP untuk mendukung sistem Smart Office dan SPBE.



A.3.1.11 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan barang jasa (SK-48)

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatkan pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan fokus pada digitalisasi dan efisiensi. Selama periode 2020–2024, sistem tata persuratan dan arsip berbasis elektronik diterapkan secara penuh melalui penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang meningkatkan ketepatan waktu tindak lanjut surat masuk dan pengiriman dokumen secara elektronik. 100% surat ditindaklanjuti tepat waktu, sementara seluruh dokumen diarsipkan dalam format digital (e-dokumen), mendukung prinsip paperless office. Penerapan ini juga berhasil mengurangi lelang gagal hingga 95% dan sanggah banding mencapai 98%, mencerminkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa

Tabel 1.139 : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti secara tepat waktu	99,33	99,33	100
2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	99,39	99,39	100
3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	98,76	98,76	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Selain itu, implementasi sistem ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, dengan penurunan signifikan dalam lelang gagal dan sanggah banding. Dengan penggunaan arsip digital berbasis QR Code dan integrasi penuh antara sistem TTE, SRIKANDI, dan E-Office, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, telah menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap transformasi digital.

A.3.1.12 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga (SK-49)

Tabel 1.140 : Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan		97,67	97,67	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Selama periode 2020–2024, berhasil mencapai pemenuhan sarana dan prasarana kantor sebesar 99,33%, Inovasi yang dihasilkan antara lain pembangunan dan modernisasi PTSP untuk pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, pengelolaan aset dan BMN yang optimal menggunakan sistem digital SIMAK-BMN, serta digitalisasi sarpras seperti jaringan internet cepat, turut mendukung transformasi pelayanan.



Peningkatan fasilitas ramah disabilitas juga menjadi fokus utama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, nyaman, dan produktif. Semua langkah ini berkontribusi pada terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

A.3.1.13 Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi (SK-50)

Tabel 1.141 : Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Persentase jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	82,50	82,50	100
2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	99,50	99,50	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Optimalisasi peran humas dan informasi publik dari 2020 hingga 2024, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan informasi. Melalui berbagai kanal media seperti website, media sosial, dan publikasi media massa, berhasil meningkatkan citra positif lembaga, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat komunikasi publik terkait program dan layanan keagamaan. Penggunaan sistem digital, penguatan kapasitas PPID, dan sinergi dengan media lokal serta nasional telah mempercepat alur informasi, menjaga reputasi lembaga, dan merespons pemberitaan negatif secara cepat dan efektif.

Tabel 1.142 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	96,8	92,6

Sumber : Hasil Monev Kinerja Pengelolaan KIP pada PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi Tahun 2023 – 2024 yang dilakukan Biro HDI Setjen Kementerian Agama

Selama periode tersebut, telah berhasil meraih berbagai penghargaan. Pada Humas Kemenag Award 2024 (diumumkan akhir Desember 2024), Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, menerima penghargaan dalam kualifikasi **Informatif** untuk Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 1.143 : Jumlah publikasi capaian kinerja

2020	2021	2022	2023	2024
45	51	85	81	55

Sumber : Tim Kerja Hukmas

Rata rata publikasi capaian kinerja mencapai 63 berita per tahun dan kemampuan counter-issue yang efektif (95%) menunjukkan keberhasilan dalam membangun sistem manajemen isu yang solid.



A.3.1.14 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi (SK-51)

Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat fokus pada penguatan sistem data dan informasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Selama periode 2020–2024, berbagai inovasi digital diterapkan, seperti integrasi sistem nasional (E-Planning, E-Monev, SAKTI, dan lainnya) untuk memperkuat data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Selain itu, validasi dan verifikasi data agama dan pendidikan dilakukan melalui sinkronisasi dengan sistem nasional seperti EMIS dan SIMPATIKA, serta penguatan kapasitas SDM dengan pelatihan SPBE dan workshop digitalisasi data.

Tabel 1.144 : Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		RATA RATA		% RATA RATA REALISASI 2020-2024
		TARGET 2020-2024	REALISASI 2020-2024	
1	Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet	84,3	84,3	100
2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	86,7	86,7	100

Sumber: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2021-2024

Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat berhasil meningkatkan kualitas data dan sistem informasi dengan capaian 100% pada validitas dan reliabilitas data agama dan pendidikan. Hal ini tercapai melalui integrasi berbagai sistem informasi seperti E-Planning, E-Monev, dan EMIS, yang memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, dilakukan verifikasi data secara berkala dan penguatan kapasitas SDM untuk meningkatkan pengelolaan informasi berbasis teknologi. Keberhasilan ini mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik berbasis data yang lebih transparan dan akuntabel.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1 Potensi dan permasalahan bidang agama

B.1.1 Mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial (Tujuan-1)

Untuk mendukung tujuan 1 : peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, dilakukan melalui peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama. Terdapat berbagai potensi yang mendukung pencapaian tujuan ini, seperti kompetensi penyuluh agama, dan jaringan penyuluh agama yang kuat dengan lembaga agama, rumah ibadah, tokoh agama dan tokoh masyarakat/ tokoh adat. Kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam menghadapi isu-isu sosial keagamaan, moral, dan tantangan kehidupan modern dijadikan peluang untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama



Tabel 1.145 : Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT
Mendukung peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial
(Tujuan 1)

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kompetensi para penyuluh, yang cukup tinggi untuk memberikan pemahaman yang baik dan contoh pengamalan ajaran agama jalan tengah di masyarakat 2. Memiliki akses yang baik keberbagai lapisan masyarakat untuk memberikan bimbingan keagamaan 3. Dukungan regulasi yang memberikan legitimasi dan dukungan administratif. 4. Memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga agama rumah ibadah, tokoh agama, tokoh masyarakat/ tokoh adat 5. Penyuluh agama, berperan penting dalam memelihara kerukunan dan menjaga perdamaian antar umat beragama.	1. Rasio penyuluh tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah sasaran dakwah (masyarakat yang beragam profesi dan latar belakang). 2. Tidak tersedianya layanan keagamaan bagi umat agama khonghucu 3. Kurangnya metode penyuluhan yang inovatif dan variatif karena keterbatasan kemampuan pada teknologi dan media sosial 4. Proses evaluasi dan penilaian kinerja belum terstruktur dan terukur, sehingga nilai kinerja belum dapat dipertanggung jawabkan 5. Belum mampu beradaptasi terhadap metode penyuluhan berbasis media baru atau teknologi digital, terutama saat menghadapi situasi darurat
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN / TANTANGAN (THREATS)
1. Fasilitas ketersediaan penyuluh agama khonghucu 2. Kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam menghadapi isu-isu sosial keagamaan, moral, dan tantangan kehidupan modern 3. Peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital oleh masyarakat untuk mencari informasi keagamaan 4. Kemudahan akses teknologi komunikasi (video conference, siaran langsung). Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja dari Kementerian Agama.	1. Adanya potensi konflik atau ketegangan dengan kelompok yang memiliki pandangan agama yang berbeda atau ekstrem, yang dapat mengancam kerukunan umat beragama. 2. Generasi muda, kurang responsif terhadap metode penyuluhan konvensional. 3. Penyebaran informasi keagamaan dari berbagai sumber, yang tidak terverifikasi dan menyesatkan. Penyuluhan tatap muka dihadapkan pada jarak, situasi dan kondisi yang terjadi

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia dan ancaman/ tantangan yang mungkin terjadi, isu strategis yang diangkat adalah

1. Mengajukan tambahan formasi pengadaan penyuluh agama
2. Peningkatan kompetensi penyuluh menggunakan media sosial secara efektif untuk dawah dan penyuluhan menyentuh Gen Z,
3. Optimalisasi penyiar agama,
4. Memfasilitasi layanan keagamaan bagi umat khonghucu
5. Pengukuran kinerja penyuluh agama berbasis digital



B.1.2 Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)

Dalam mendukung tujuan 2 penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian pada pemberian layanan perlindungan hak beragama, beribadah, beraktivitas, fasilitasi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penguatan peran FKUB, pembinaan kerukunan intra dan antar umat beragama, pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran serta penguatan peran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama

**Tabel 1.146 : Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT
Mendukung penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB (Tujuan-2)**

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Peran aktif dari FKUB, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, dalam menjaga dan merawat KUB. 2. Keanggotaan FKUB terdiri dari para pemuka agama dan tokoh masyarakat lintas agama yang memudahkan komunikasi dan pembangunan kepercayaan di tingkat akar rumput. 3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat dipandang sebagai figur dipercaya, yang ucapannya didengar dan diikuti oleh umat/masyarakat 4. Nilai ndeks KUB Sumatera Barat dari 2021-2024, menunjukkan tren peningkatan, walaupun masih berada dibawah rata rata Nasional 5. Pemberdayaan rumah ibadah, selain memiliki fungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat komunitas, pendidikan, dan silaturahmi.	1. FKUB Belum berdiri di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar 2. Insiden/ kasus sosial keagamaan terjadi berulang 3. Peserta forum dialog kerukunan (intra dan antar), belum mewakili pimpinan di akar rumput 4. Kurangnya pelatihan formal bagi pengelola rumah ibadah dalam manajemen konflik, pendidikan multikultural, dan hukum terkait pendirian rumah ibadah.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN / TANTANGAN (THREATS)
1. FKUB dapat memanfaatkan sistem peringatan dini (EWS), untuk memonitor potensi konflik dan bertindak cepat. 2. Dialog antar umat beragama dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling pengertian serta kerjasama antar umat beragama 3. Peran penyuluh agama pembimbingan spiritual dan moral masyarakat, menja di jembatan harmoni dan toleransi antar umat beragama, serta mencegah perilaku destruktif seperti penyalahgunaan narkoba dan paham radikal.	1. Rumah tinggal disalahgunakan sebagai rumah ibadah, menjadi pemicu terjadinya insiden penolakan yang dapat mengancam kerukunan 2. Informasi yang tidak benar melalui media sosial seringkali menjadi pemicu ketegangan akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis SARA.



Adanya pertemuan dan kegiatan bersama antar pemuda dan pelajar lintas agama	
4. Teknologi digital membuka platform media sosial, dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agama, menjangkau audiens muda secara luas dan efektif.	

Mempertimbangkan potensi dan permasalahan, kekuatan dan ancaman tantangan yang mungkin terjadi dalam mendukung tujuan 2, hal-hal yang perlu dilakukan untuk penguatan kualitas moderasi beragama dan KUB, isu strategis yang diangkat antara lain, :

1. Pengarusutamaan penguatan moderasi beragama,
2. Peningkatan layanan cegah konflik sosial keagamaan,
3. Penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama, dan
4. Optimalisasi peran penyuluh agama dalam meningkatkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial masyarakat

B.1.3 Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan (Tujuan-3)

Dalam mendukung tujuan 3 peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memberikan perhatian pada layanan sarana pendukung keagamaan, layanan nikah/ rujuk/, layanan bimbingan keluarga, layanan dana sosial keagamaan (Ziswaf, BAKKAT, Punia, Paramitha, Dana Kebajikan, Dana Amal Kasih), layanan penjaminan dan literasi produk halal, dan layanan ibadah haji dan umrah. Tabel berikut menjelaskan kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman/ tantangan yang dihadapi dalam mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan di Sumatera Barat

**Tabel 1.147 : Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT
Mendukung peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan
(Tujuan-3)**

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung keagamaan 2. KUA memiliki jaringan yang luas dan memiliki standar pelayanan, sebagai dampak dari revitalisasi dan digitalisasi layanan KUA. 3. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran serta akses materi persiapan ibadah haji. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran serta akses materi persiapan ibadah haji Proses bisnis pendaftaran sertifikasi halal yang semakin matang dan mapan memungkinkan pelayanan yang lebih terjamin.	1. Fasilitas, jaringan internet dan SDM tidak merata di berbagai KUA 2. Belum 19 Kabupaten/ Kota memiliki gedung PLHUT 3. Sebaran jumlah SDM yang tidak merata Layanan jaminan produk halal, organisasi pelaksana dan pendampingan proses sertifikasi produk halal belum merata di seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat 4. Tumpang tindihnya kebijakan/ program atau pelaksanaan kebijakan antar pemangku



5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan PIH khusus, pelayanan pendaftaran haji, pelayanan jamaah haji di asrama haji embarkasi Padang, dan pembinaan jamaah haj 6. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan potensi ekonomi keagamaan umat. Bertambahnya jumlah SDM muda di Kanwil dan satuan kerja di daerah, meningkatkan kapasitas digitalisasi layanan keagamaan	kepentingan di bidang pengelolaan ekonomi keagamaan umat 5. Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan dana keagamaan umat masih terbatas 6. Pengelolaan dana keagamaan umat belum transparan dan akuntabel.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN/ TANTANGAN (THREATS)
1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA memungkinkan KUA memperluas sosialisasi dan jangkauan layanannya 2. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan transfer pengetahuan antar KUA dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pegawai KUA dan penerapan etos kerja yang lebih baik. 3. Potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah, Universitas, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan jangkauan sertifikasi halal 4. Kementerian Agama memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan standarisasi kualitas dan prosedur layanan untuk meminimalkan kesenjangan kualitas layanan di daerah 5. Potensi dana wakaf meningkat dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat 6. Peningkatan kesadaran dikalangan organisasi keagamaan tentang pentingnya mobilisasi dan konsolidasi dana sosial keagamaan agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan umat. .	1. Insiden/ kasus sosial keagamaan yang kembali berulang 2. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan transformasi layanan KUA, dan sertifikasi jaminan produk halal masih perlu ditingkatkan. 3. Masa tunggu haji reguler Sumatera Barat saat ini adalah 24 tahun sehingga usia jamaah yang berangkat rata rata diatas 60 tahun 4. Adanya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kuota haji yang betul-betul transparan 5. Munculnya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal. 6. Adanya ketidakpercayaan sebagian kalangan terhadap lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana umat lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas 7. Inovasi pemanfaatan terhadap pelaksanaan program ekonomi keagamaan belum sepenuhnya membantu masyarakat miskin

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, dalam mendukung tujuan 3 sebagaimana tercantum dalam table tersebut diatas, isu strategis yang diangkat untuk peningkatan kualitas layanan keagamaan antara lain, yaitu :

1. Transformasi layanan keagamaan berbasis digital,
2. Peningkatan kualitas SDM layanan keagamaan yang andal dan profesional,
3. Penguatan layanan KUA,
4. Layanan halal
5. Layanan penyuluh agama yang berdampak dan berorientasi pada kemaslahatan,
6. Distribusi kitab suci dan buku keagamaan yang merata,
7. Sarana dan prasarana peribadatan yang sesuai standar serta



8. Penyaluran dana sosial keagamaan yang tepat sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan

B.2 Potensi dan permasalahan bidang pendidikan

Dalam mendukung tujuan 4 peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, difokuskan pada peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, peningkatan kualitas penilaian pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penyaluran bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat, peningkatan kualitas ATS, fasilitasi pelayanan 1 Tahun pra sekolah, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik, peningkatan kapasitas dan akselerasi akreditasi dan peningkatan budaya mutu pendidikan, budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tujuan 4 peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bermutu

**Tabel 1.148 : Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT
Mendukung peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum
berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
(Tujuan-4)**

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Kurikulum inovatif memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan karakter dan nilai-nilai keagamaan yang kuat, sesuai dengan budaya lokal Minangkabau. 2. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas terkait SPM sarpras 3. Beberapa madrasah negeri telah memiliki fasilitas dasar yang memadai. 4. Adanya alokasi dana BOS dan PIP yang spesifik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama untuk madrasah dan pesantren, termasuk PDF Muadalah, menunjukkan dukungan finansial yang kuat. 5. Penggunaan sistem informasi seperti SIPMA Kementerian Agama untuk pengecekan penerima PIP memudahkan pengelolaan dan pemantauan data siswa di tingkat pusat dan daerah. PDF Muadalah memiliki struktur yang terorganisir, memfasilitasi jalur koordinasi dan penyaluran bantuan 6. Keunggulan pendidikan di PDF Muadalah	1. Kurikulum inovatif menuntut guru/fasilitator yang memiliki pemahaman mendalam, tidak hanya dalam materi tetapi juga teknologi dan metode pembelajaran aktif, yang mungkin belum merata. 2. Inkonsistensi dalam penerapan instrumen penilaian di lapangan jika tidak disertai supervisi yang ketat 3. Mayoritas madrasah di Sumatera Barat, dikelola oleh pihak swasta/masyarakat, yang memiliki keterbatasan finansial dalam penyediaan sarpras yang memenuhi standar. 4. Kurangnya data sarpras yang valid dan ter-update secara berkala di beberapa madrasah menjadi tantangan dalam perencanaan bantuan 5. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen administrasi dan pelaporan keuangan berbasis digital di beberapa PDF /muadalah dapat menghambat proses pencairan dan pelaporan. 6. Tantangan akses internet atau pemahaman



yang menekankan pada nilai-nilai agama dan karakter dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan dana bantuan yang transparan dan akuntabel 7. Kurikulum inovatif memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan karakter dan nilai-nilai keagamaan yang kuat, sesuai dengan budaya lokal Minangkabau. 8. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas terkait SPM sarpras Beberapa madrasah negeri telah memiliki fasilitas dasar yang memadai. 9. Adanya alokasi dana BOS dan PIP yang spesifik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama untuk madrasah dan pesantren, termasuk PDF Muadalah, menunjukkan dukungan finansial yang kuat. 10. Penggunaan sistem informasi seperti SIPMA Kementerian Agama untuk pengecekan penerima PIP memudahkan pengelolaan dan pemantauan data siswa di tingkat pusat dan daerah. 11. PDF Muadalah memiliki struktur yang terorganisir, memfasilitasi jalur koordinasi dan penyaluran bantuan. 12. Keunggulan pendidikan di PDF Muadalah yang menekankan pada nilai-nilai agama dan karakter dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan dana bantuan yang transparan dan akuntabel 13. Dukungan dan komitmen yang kuat dari kepala madrasah, guru, dan yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. 14. Meningkatkan kepercayaan publik, terhadap madrasah yang menerima semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus 15. Sistem pesantren menanamkan nilai kemandirian dan tanggung jawab, keterampilan hidup yang penting bagi ATS. 16. Pesantren memfasilitasi kepercayaan dan dukungan dari orang tua/wali ATS 17. Program kesetaraan (Paket A, B, C) secara inheren fleksibel, memungkinkan penyesuaian jadwal bagi ATS yang mungkin memiliki tanggung jawab lain. 18. Ketersediaan guru PAUD dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai.	teknologi untuk mengakses informasi dan sistem pelaporan bantuan secara optimal. 7. Tidak adanya guru pembimbing khusus (GPK) atau tenaga pendidik yang terlatih secara spesifik untuk ABK 8. Kurikulum inovatif menuntut guru/fasilitator yang memiliki pemahaman mendalam, tidak hanya dalam materi tetapi juga teknologi dan metode pembelajaran aktif, yang mungkin belum merata. 9. Inkonsistensi dalam penerapan instrumen penilaian di lapangan jika tidak disertai supervisi yang ketat 10. Mayoritas madrasah di Sumatera Barat, dikelola oleh pihak swasta/masyarakat, yang memiliki keterbatasan finansial dalam 11. penyediaan sarpras yang memenuhi standar 12. Kurangnya data sarpras yang valid dan ter-update secara berkala di beberapa madrasah menjadi tantangan dalam perencanaan bantuan 13. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen administrasi dan pelaporan keuangan berbasis digital di beberapa PDF Muadalah dapat menghambat proses pencairan dan pelaporan. 14. Tantangan akses internet atau pemahaman teknologi untuk mengakses informasi dan sistem pelaporan bantuan secara optimal. 15. Tidak adanya guru pembimbing khusus (GPK) atau tenaga pendidik yang terlatih secara spesifik untuk ABK 16. Pengetahuan dan keterampilan guru reguler yang masih minim dalam menangani keragaman karakteristik ABK 17. Beberapa pesantren menghadapi keterbatasan dalam fasilitas, media pembelajaran modern, dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi ganda (ilmu agama dan umum). 18. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pada PAUD, terutama pada lembaga yang banyak menerima siswa dari keluarga kurang mampu. 19. Kurangnya alat permainan edukatif dan fasilitas bermain <i>indoor</i> pada PAUD. 20. Kualitas dan kompetensi guru PAUD yang belum merata. 21. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru.
--	---



19. Ruang kelas PAUD, mendukung, fasilitas bermain yang memadai, dan akses terhadap media ajar yang beragam. 20. Adanya program unggulan seperti tahfidz Al Quran atau pembelajaran komputer dasar yang menjadi <i>branding</i> lembaga. 21. Madrasah, memiliki kekuatan dalam mengintegrasikan kompetensi teknis vokasi dengan nilai-nilai moral dan religius, yang menghasilkan lulusan dengan karakter kuat.	22. Guru vokasi belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengindikasikan perlunya peningkatan kompetensi teknis
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN / TANTANGAN (THREATS)
1. Era digital menawarkan peluang besar untuk mengadopsi berbagai metode pembelajaran inovatif seperti <i>blended learning</i>, gamifikasi, dan penggunaan AR/VR untuk memperkaya materi pendidikan Islam. 2. Adanya program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang didukung oleh Kementerian Agama, membuka kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru secara terstruktur. 3. Adanya komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu Pendidikan Madrasah. 4. Adanya sistem informasi manajemen sarpras (Simsarpras). 5. Banyak orang tua yang mencari sekolah inklusi untuk pendidikan anak mereka 6. Adanya payung hukum dan kebijakan pemerintah, untuk Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), memungkinkan ATS mengakses sekolah formal, memberikan kesempatan kedua untuk mendapatkan ijazah setara. 7. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan akhlak mulia. 8. Dukungan program dari pemerintah pada PAUD, seperti bantuan BOS. 9. Kesempatan untuk kerjasama dengan universitas atau lembaga lain untuk program linier S1 PAUD atau program lainnya. 10. Adanya peluang untuk menjalin kerja sama erat dengan industri lokal dan regional di Sumatera Barat untuk menyelaraskan kurikulum dan magang guru/siswa dengan permintaan pasar kerja.	1. Persaingan ketat dengan lembaga pendidikan lain (umum/swasta) yang lebih cepat berinovasi dapat mengancam jumlah siswa jika madrasah kurang adaptif. 2. Perubahan kebijakan dari pusat atau kementerian lain yang tumpang tindih dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya 3. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pemerataan sarpras di semua madrasah. 4. Kurangnya tenaga pengelola sarpras yang profesional di tingkat madrasah swasta 5. Potensi perundungan (bullying) dari siswa reguler jika tidak ada sosialisasi dan pengawasan yang memadai. 6. ATS rentan terhadap pengaruh negatif teknologi informasi dan lingkungan luar jika tidak dibentengi dengan sistem pengawasan yang baik. 7. Partisipasi ATS bersifat sukarela, sehingga keberlanjutan kehadiran dan motivasi belajar mereka bisa menjadi tantangan tersendiri. 8. Persaingan dengan lembaga PAUD lain, baik yang di bawah naungan Kementerian Agama maupun non-Kementerian Agama 9. Persaingan yang ketat dengan SMK negeri/swasta umum atau lembaga pelatihan swasta di Sumatera Barat dapat mengancam jika Kementerian Agama kurang inovatif dan tidak mampu menarik siswa. 10. Kebutuhan pasar tenaga kerja dan perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi kurikulum dan kompetensi guru yang cepat pula, menjadi ancaman jika terlambat direspons.



12. Memprioritaskan peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi dan pelatihan kerja.	
--	--

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman/ tantangan yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah

1. Peningkatan sarana dan prasarana pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif,
2. Peningkatan partisipasi siswa/santri termasuk pada satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T,
3. Peningkatan Anak Kelas 1 MI/ Ula yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA),
4. Peningkatan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah,
5. Peningkatan satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi,
6. Peningkatan siswa yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu,
7. Peningkatan anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan,
8. Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, Pemanfaatan hasil asesmen kompetensi tingkat nasional sebagai landasan evaluasi dan penyempurnaan kualitas pendidikan,
9. Peningkatan peserta didik dalam memahami dan praktik beragama yang moderat,
10. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pendidikan berbasis partisipasi komunitas masyarakat, Integrasi keilmuan agama dan umum dalam penerapan pembelajaran, Peningkatan siswa yang memiliki nilai karakter baik,
11. Peningkatan siswa yang memiliki prestasi akademik dan ekstrakurikuler,
12. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan penyelenggaraan project penguatan profil pelajar pancasila.
13. Peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan,
14. Peningkatan nilai indeks pemerataan guru dengan kategori baik,
15. Peningkatan guru yang memiliki sertifikat pendidik,
16. Pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama dengan murid seagama,
17. Peningkatan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal,
18. Peningkatan kualitas guru yang memperoleh penguatan kompetensi melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK), Musyawarah Guru MataPelajaran (MGMP),
19. Peningkatan guru yang memperoleh penguatan moderasi beragama,



20. Peningkatan guru yang memperoleh layanan peningkatan jenjang karir,
21. Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta
22. Peningkatan pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan

B.3 Potensi dan permasalahan bidang tata kelola

Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tujuan 5 peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsiv

Tabel 1.149 : Potensi dan permasalahan berdasarkan Analisa SWOT
Mendukung peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive
(Tujuan-5)

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
1. Adanya komitmen pimpinan dan ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terhadap tata kelola yang akuntabel dan bersih (Zona Integritas/WBK/WBBM) 2. Adanya PMA Nomor 3 Tahun 2023 dan regulasi terkait lainnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk proses pemberian rekomendasi dan pengawasan orang asing di bidang agama. 3. Memiliki struktur koordinasi vertikal (dengan Kementerian Agama pusat) dan horizontal (dengan instansi daerah terkait seperti Imigrasi dan Kesbangpol) yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengawasan. 4. SOP yang terstruktur membantu memastikan konsistensi dalam proses peninjauan dan rekomendasi, mengurangi potensi kesalahan manusia dan penyalahgunaan wewenang 5. Adanya petugas yang kompeten dan berpengalaman dalam menangani urusan keagamaan dan administrasi keimigrasian di tingkat provinsi 6. Perencanaan kebutuhan ASN, mengacu pada pedoman Kementerian Agama. 7. Adanya dukungan kuat dari pimpinan untuk peningkatan kompetensi dan kinerja ASN. 8. Adanya dukungan kuat dari pimpinan untuk peningkatan kompetensi dan kinerja ASN.	1. Proses layanan bantuan hukum belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, mempengaruhi kecepatan penanganan kasus. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara komprehensif terhadap aktivitas orang asing di seluruh wilayah Sumatera Barat. 3. Sistem perencanaan kepegawaian belum sepenuhnya terdigitalisasi atau terintegrasi, antar satuan kerja 4. Kesenjangan kompetensi antara ASN yang ada dengan tuntutan tugas dan perkembangan teknologi. 5. Keterbatasan anggaran atau sumber daya untuk pengembangan kompetensi dan pengadaan pegawai baru. 6. Adaptasi terhadap perubahan regulasi baru, seperti PermenPAN RB No. 1 Tahun 2023, membutuhkan waktu dan sering kali menghadapi resistensi. 7. Terdapat tantangan untuk memastikan semua ASN memiliki kompetensi yang setara, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil di Sumatera Barat 8. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan ASN. 9. Proses layanan bantuan hukum belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, mempengaruhi kecepatan penanganan kasus.



	10. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara komprehensif terhadap aktivitas orang asing di seluruh wilayah Sumatera Barat.
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN / TANTANGAN (THREATS)
1. ASN Kemenag diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) sebagai panduan perilaku. 2. Adanya upaya mitigasi penyelesaian pagu minus dan interkoneksi data SIMPEG dan aplikasi gaji web 3. Adanya target dan komitmen untuk mendukung pencapaian opini laporan keuangan Kementerian Agama WTP dari BPK 4. Tersedianya SDM yang kompeten dalam proses perencanaan dan penganggaran 5. Memiliki sistem informasi dan aplikasi internal (seperti SIPKA) untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, monev, dan pelaporan anggaran secara elektronik 6. Adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sarana, khususnya di unit pelayanan publik	1. Sistem perencanaan kepegawaian belum sepenuhnya terdigitalisasi atau terintegrasi, antar satuan kerja 2. Kesenjangan kompetensi antara ASN yang ada dengan tuntutan tugas dan perkembangan teknologi. 3. Keterbatasan anggaran atau sumber daya untuk pengembangan kompetensi dan pengadaan pegawai baru. 4. Adaptasi terhadap perubahan regulasi baru, seperti PermenPAN RB No. 1 Tahun 2023, membutuhkan waktu dan sering kali menghadapi resistensi 5. Terdapat tantangan untuk memastikan semua ASN memiliki kompetensi yang setara, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil di Sumatera Barat 6. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan ASN. 7. Kuantitas dan kualitas SDM yang memahami aplikasi Sistem Manajemen Aset dan pengelolaan BMN secara komprehensif. Terbatas 8. Belum semua unit kerja menyusun dokumen perencanaan yang responsif terhadap isu-isu tertentu Sarpras yang kurang memadai di Kantor Kementerian Agama dan unit pelayanan publik memadai karena keterbatasan dana. 9. Permasalahan dalam penatausahaan dan inventarisasi aset (Barang Milik Negara/BMN)

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mendukung peningkatan nilai kinerja anggaran
2. Peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan BMN



4. Peningkatan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
5. Peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum
6. Peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
7. Peningkatan layanan informasi dan dokumentasi
8. Peningkatan kualitas data dan sistem informasi
9. Peningkatan layanan prima bidang pendidikan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAGEMEN RESIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

A. VISI DAN MISI

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merujuk pada visi Kementerian Agama 2025-2029

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RUKUN, MASLAHAT DAN CERDAS BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Terdapat tiga kata kunci dalam Visi Kementerian Agama, yaitu **Rukun, Masalahat, dan Cerdas**. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Rukun** merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan.

Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.



Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan.

Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerjasama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

2. **Maslahat.** Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagaman yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
3. **Cerdas** adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

Kementerian Agama menetapkan misi 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar “Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi ini dirancang untuk menjembatani gagasan besar visi ke dalam program kerja nyata yang dapat



diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap misi mencerminkan upaya konkret untuk mendukung elemen dalam visi, yaitu menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan cerdas.

Adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan

Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dan maslahat dalam visi Kemenag. Kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren dan pendidikan keagamaan, Ramah dan Terintegrasi (Asta 4) dan Pesantren Berdaya

Misi kedua bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan mendukung kata kunci masyarakat cerdas dalam visi Kemenag. Cerdas diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter mulia. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi ketiga mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian visi Kemenag. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program di bidang agama dan pendidikan—program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Untuk itu, seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.



B. TUJUAN

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mendukung lima tujuan strategis Kementerian Agama dengan memperhatikan tantangan di bidang agama, pendidikan dan tata kelola. Berikut lima tujuan tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widyalya/Uttama Dhammasekha;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

C. SASARAN

Untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 4 Program, dengan 20 Sasaran Kegiatan (SK) dan 81 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada tahun 2025. Karena pemisahan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ditahun 2026 melaksanakan 15 SK dan 74 IKSK yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan

1. Tujuan 1, perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama (tabel 2.1)



Tabel 2.1 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni social	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 2. Indeks Kesalehan Umat Beragama

Mendukung pelaksanaan tujuan 1, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama, dengan 2 kegiatan, 1 SK dan 2 IKS, berikut :

- Program** Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Kegiatan**
- Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
- SK-1** **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama**
- IKS**
- a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
 - b. Persentase KUA yang menyeleng garakan EWS

2. Tujuan 2, peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis eko-teologi, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.2 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 2	Meningkatnya layanan keagamaan transformative	Indeks Layanan Keagamaan

Mendukung pencapaian tujuan 2, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Kehidupan Beragama, dengan 11 kegiatan, 7 SK dan 22 IKS, berikut :

- Program** Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Kegiatan**
- Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 - Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
 - Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
 - Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
 - Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
 - Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal



- Pelayanan Haji Dalam Negeri
- Pelayanan Haji Luar Negeri
- Pembinaan Haji

- IKSK**
1. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 2. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesparani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha
 3. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 4. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

SK-2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

- IKSK**
1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
 4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
 5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
 7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 8. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
 9. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 10. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

SK-3 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji

- IKSK** Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

SK-4 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

- IKSK**
1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu



SK-5 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah

- IKSK Persentase Lembaga penyelenggara an haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
- Lembaga penyelenggara haji khusus;
 - Lembaga penyelenggara umrah

SK-6 Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji

- IKSK Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar

SK-7 Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji

- IKSK
- Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.3 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK /Utama Widyalyaya/ Utama Dhammasekha

Mendukung pencapaian tujuan 3, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun, dengan 2 kegiatan, 2 SK dan 7 IKS

Program Program Wajib Belajar 13 Tahun

- Kegiatan**
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

SK-8 Meningkatkan akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan

- IKSK Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

SK-9 Meningkatkan sarana dan prasa rana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas

- IKSK
- Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang



memperoleh peningkatan sarana prasarana

3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
 4. Persentase Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
 5. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggara kan layanan kesehatan sekolah
 6. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
4. Tujuan 4, Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing

Tabel 2.4 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	1. Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional : a. Literasi membaca b. Numerasi
		2. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
SS 5	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan

Mendukung pencapaian tujuan 4, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dengan 5 kegiatan, 2 SK dan 24 IKSK,

Program Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- Kegiatan**
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
 - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
 - Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
 - Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam



SK-10 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

- IKSK
1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
 - Literasi membaca
 - Numerasi
 2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
 3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
 6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
 8. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
 10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
 12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

SK-11 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

- IKSK
1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
 2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
 3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 4. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 5. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 6. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal



predikat terampil

7. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
8. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil
9. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
10. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
11. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
12. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

5. Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2.5 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mendukung Pencapaian Tujuan 5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi

Mendukung pencapaian tujuan 5, dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dengan 8 kegiatan, 9 SK dan 27 IKS, berikut

Program Program Dukungan Manajemen

Kegiatan

- Pembinaan Administrasi Perencanaan
- Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian
- Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
- Pembinaan Administrasi Umum
- Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik
- Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi
- Dukungan Manajemen Pendidikan

SK-12 Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

IKSK Nilai Kinerja Anggaran

SK-13 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

IKSK 1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar



2. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75

SK-14 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN

- IKSK
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 3. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 4. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 5. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

SK-15 Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

- IKSK
1. Indeks Profesionalisme ASN
 2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif

SK-16 Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

- IKSK
1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 2. Persentase rekomendasi izin orang asing

SK-17 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

- IKSK
1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

SK-18 Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi

- IKSK
1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

SK-19 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

- IKSK
1. Indeks Pembangunan Statistik
 2. Persentase data statistik yang dipublikasi

SK-20 Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

- IKSK
1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
 2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
 3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi



program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

D. DUKUNGAN TERHADAP ASTA PROTAS MENTERI AGAMA

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berkomitmen penuh mendukung delapan program utama (Asta Prioritas) Menteri Agama untuk periode 2025-2029, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil. Melalui kegiatan seperti penguatan pusat layanan keagamaan di KUA, kampanye kerukunan umat beragama (Moderasi Beragama), pengembangan sekolah agama yang unggul, hingga digitalisasi layanan untuk transparansi dan kecepatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa setiap program kerja berdampak langsung pada terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang rukun, cerdas, dan sejahtera. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.6 : Bentuk Kegiatan Mendukung Asta Protas Menteri Agama

No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
1	Kerukunan dan cinta kemanusiaan	1. AMAL (Awali Morning Dengan Do'a Agar Lancar) : mengawali aktifitas di tempat kerja dengan doa bersama yang dipandu oleh rohaniwan masing-masing agama. 2. KARENA (Kamis Rezeki Nyata Antar Sesama): donasi uang dari ASN Kementerian Agama pada hari Kamis, ditukarkan dengan bahan-bahan makanan pokok seperti beras dan telur, dan langsung didistribusikan pada hari itu juga kepada masyarakat yang membutuhkan
2	Ekoteologi	1. BERSERI (Bersih-Bersih Rabu Sehat, Indah, dan Rapi): suatu gerakan membersihkan dan merapikan tempat kerja masing-masing ASN, dilaksanakan setiap hari Rabu setelah senam pagi 2. PEDULI (Pegawai Hijau untuk Lingkungan Lestari): merupakan aksi yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, berupa membawa tanaman hias untuk ditempatkan di lingkungan tempat kerja, serta memelihara dan merawatnya secara berkesinambungan. 3. CATIN NAMPAK (Calon Pengantin Menanam dan Berdampak): merupakan inovasi layanan pranikah berbasis ekoteologi, yakni mengajarkan pasangan untuk menanam tumbuhan sebagai simbol komitmen menjaga bumi dan keluarga.



No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
		Aksi ini dalam bentuk menanam pohon produktif di sekitar tempat tinggal atau tempat ibadah calon pengantin bersangkutan. 4. GEMES BERSERI (Gerakan Madrasah Mengelola Sampah, Sehat dan Berteknologi): merupakan langkah nyata untuk menanamkan kesadaran ekologis di madrasah. Aksi ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam dengan teknologi sederhana dalam pengelolaan sampah dan kesehatan lingkungan madrasah. Bentuk kegiatannya adalah: • Pelatihan pengelolaan sampah dengan teknologi sederhana (komposter, biopori, bank sampah digital). • Aksi madrasah hijau dan festival inovasi ekoteologi. 5. Kolaborasi lintas instansi: Dinas Lingkungan Hidup, Balai Diklat, dan Perguruan Tinggi Keagamaan (UIN)
3	Layanan keagamaan berdampak	Sinergi Layanan Nikah dengan Layanan Dokumen Kependudukan: merupakan aksi mensinergikan layanan nikah pada KUA dengan penerbitan dokumen kependudukan. Secara bertahap, Aksi ini dilakukan pada beberapa KUA dengan terlebih dahulu berkolaborasi dengan OPD Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten/Kota setempat.
4	Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi	SIGMA (Sinergi dan Integrasi Ilmu Guru Madrasah): bertujuan menyatukan ilmu pengetahuan dan nilai Islam agar pembelajaran di madrasah lebih holistik dan kontekstual. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan integrasi sains dan Islam bagi guru. b. Pengembangan modul pembelajaran integrative c. Kompetisi riset sains islami antar madrasah
5	Pesantren berdaya	LPQ BERSINAR (Lembaga Pendidikan Quran Berdampak, Berprestasi, dan Bersinergi): merupakan upaya penguatan lembaga pembelajaran Al-Qur'an agar berdaya saing dan berkontribusi terhadap masyarakat. Bentuk kegiatannya adalah: a. Pelatihan dan sertifikasi guru LPQ. b. Lomba-lomba tahfiz dan tilawah tingkat provinsi. c. Pembentukan BKS LPQ Sumatera Barat
6	Pemberdayaan ekonomi umat	BERANI (Bedah Rumah dan Bina Penghuni): adalah gerakan sosial keagamaan yang mengintegrasikan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pembinaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Tahapannya adalah: 1. Identifikasi rumah tidak layak huni, 2. Pembinaan penghuni oleh penyuluh agama. 3. Kolaborasi dengan Baznas, LAZ, dan pemerintah daerah. 4. Pelaksanaan bedah rumah



No	Asta Protas Menteri Agama	Bentuk Kegiatan
7	Pemberdayaan rumah ibadah	Pengembangan Masjid Ramah bertujuan untuk mewujudkan masjid yang modern, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Kategori Masjid Ramah yaitu: 1. Masjid Ramah Anak (MRA): menyediakan ruang aman, nyaman, kreatif, dan rekreatif untuk kegiatan positif anak-anak. 2. Masjid Ramah Difabel dan Lansia: memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan penyandang disabilitas dan lansia. 3. Masjid Ramah Lingkungan (MRL): mengedepankan konstruksi dan arsitektur yang ramah lingkungan. 4. Masjid Ramah Keragaman: mendorong inklusivitas dan toleransi antarumat beragama dan berbagai latar belakang. 5. Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir: memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi fakir miskin serta musafir.
8	Digitalisasi tatakelola	1. APIK (ASN Pembelajar untuk Inovasi dan Kompetensi): merupakan aksi kegiatan pembelajaran secara daring oleh ASN Kementerian Agama dengan materi-materi yang diutamakan terkait dengan pemanfaatan IT, seperti pengelolaan Aplikasi Srikandi, Aplikasi SI-ASN, penggunaan software Canva dan CapCut. 2. PETARUNG KEREN (Pelayanan Terpadu Unggul Ramah Kelompok Rentan): merupakan pengembangan aplikasi layanan digital pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat



E. MANAGEMEN RESIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

Indikasi risiko dari **20 Sasaran Kegiatan (SK)** pada Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut

Tabel 2.7 : Managemen Resiko Pembangunan Nasional

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
BIDANG AGAMA				
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan IKS:			
	a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83 b. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS c. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS d. Persentase peningkatan audiens MTQ/Pespawarai/Pesparani/Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha e. Persentase peningkatan peserta event seni budaya f. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah	1 Rendahnya nilai indeks KUB Provinsi Sumatera Barat	1.1 a. Melaksanakan penguatan moderasi beragama secara masif di berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui kurikulum pendidikan. b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda, serta mencegah cara-cara dakwah yang agresif. c. Meningkatkan koordinasi antara pengelola rumah ibadah dengan masyarakat d. Memberikan pelatihan manajemen konflik bagi tokoh/penyiar agama, penyuluh, dan tokoh pemuda/ penggerak masyarakat	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais-Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		e. Menggagas belajar sehari bersama dan kunjungan kerumah ibadah antar siswa lintas iman f. Memperkuat ruang pertemuan formal dan informal antar pemuda dan tokoh agama lintas iman (dialog, kerja sosial dan ronda bersama) g. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mediasi dan dialog h. Mendorong pembentukan agen kerukunan ditingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan / desa/ nagari	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais- Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		2 a. Kurang optimalnya KUA dalam menyelenggarakan EWS b. Penyelesaian konflik yang kurang efektif	2.1 a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penghulu, Penyuluh Agama dan Pelaksana pada KUA b. Mengembangkan dan menerapkan Standard Operating Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk alur pelaporan EWS c. Menggunakan platform digital atau aplikasi khusus yang memudahkan proses pelaporan, pemantauan, dan analisis data potensi konflik secara	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			real-time. d. Memperkuat kerja sama antara FKUB, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat keamanan (Polsek/ Koramil) dan di tingkat kecamatan untuk memvalidasi informasi dan mengkoordinasikan respons e. Membentuk tim khusus di tingkat KUA yang siap bergerak cepat untuk melakukan mediasi atau intervensi awal jika terdeteksi adanya indikasi konflik. f. Menyelenggarakan forum diskusi secara berkala antar KUA untuk membahas tantangan di lapangan dan berbagi praktik terbaik dalam pencegahan konflik. g. Memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan EWS termasuk pelatihan, operasional lapangan, dan sarana komunikasi. g. Memastikan KUA memiliki fasilitas kerja dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi EWS secara optimal.	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais- Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
			2.1 a. Meningkatkan proses penanganan	



SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			konflik yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko b. Meningkatkan proses penanganan konflik yang terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko c. Meningkatkan komunikasi terbuka dan efektif antar pihak yang berkonflik atau antar pemangku kepentingan d. Mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk memahami akar masalah dan sentralitas isu, secara mendalam. e. Menetapkan strategi penanganan risiko (mitigasi) sesuai dengan sifat dan ukuran konflik f. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas mengenai siapa yang harus mengelola risiko dan menyelesaikan konflik g. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran penyuluh terhadap dampak negatif jika konflik tidak diselesaikan	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais- Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			dengan baik, seperti rusaknya hubungan, kerugian finansial, atau menurunnya produktivitas, yang dapat menyebabkan kurangnya urgensi dalam penanganan h. Menyusun mekanisme untuk memfasilitasi perkembangan upaya penyelesaian konflik dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais- Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		3 a. Dialog hanya melibatkan kelompok atau tokoh tertentu, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak mewakili seluruh spektrum masyarakat (eksklusif) b. Pelaksanaan dialog tidak terstruktur dengan baik, c. Ketiadaan rekomendasi EWS	3.1 Memberikan penguatan pada pelaksanaan dialog, agar rekomendasi yang dihasilkan disusun efektif dan dapat menyelesaikan akar permasalahan kerukunan dimasyarakat secara keseluruhan	
			3.2 Menghadirkan panduan dialog yang jelas, terstruktur dan terukur hasilnya	
			3.3 Melaksanakan forum dialog dan memberikan rekomendasi EWS yang spesifik dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk setiap risiko yang teridentifikasi.	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		4 a. Efektivitas promosi dan komunikasi yang lemah b. Format acara yang monoton, lokasi yang sulit dijangkau, fasilitas yang kurang memadai, atau jadwal yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat	4.1 Mengoptimalkan promosi dan komunikasi 4.2 Mengoptimalkan pemanfaatan media on line dalam kegiatan keagamaan	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais- Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		5 Partisipasi umat beragama dalam mengikuti perayaan keagamaan dan event keagamaan rendah	5.1 a. Peningkatan penyelenggaran event keagamaan dan budaya b. Peningkatan penyiaran agama melalui ruang publik dan media elektronik c. Mendorong penyuluh dan penyiar agama agama memperbanyak dialog keagamaan	
		6 Kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan belum akuntabe	6.1 a. Pemberdayaaan lembaga agama dan lembaga keagamaan untuk layanan keagamaan dan pendidikan b. Penguatan tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan yang akuntabel dan profesional	
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan IKSK:			
	a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja	1 a. Kurangnya kompetensi penyuluh agama terkait Ilmu	1.1 a. Pelatihan dan pengembangan kompetensi digital para penyuluh	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
b. berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) c. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama d. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi e. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah f. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan g. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan h. Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat i. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan j. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah k. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi	b. Agama dan Sosial Keagamaan, Komunikasi, Sosiokultural, dan Kolaboratif c. Kurangnya pemanfaatan layanan digital Penilaian kinerja penyuluh belum dapat dipertanggung jawabkan	d. Mendorong penyuluh memanfaatkan teknologi digital secara optimal 1.2 a. Peningkatan frekuensi layanan penyuluhan agama b. Peningkatan konten keagamaan yang dipublikasi 1.3 Metode penilaian kinerja harus jelas, terstruktur dan dapat diukur	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais-Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
	2 a. Rendahnya rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran b. Bimbingan yang tidak maksimal dapat menghambat penguatan perspektif moderasi beragama di masyarakat.	2.1 a. Melakukan pemerataan tugas dan objek binaan penyuluh secara lebih akurat berdasarkan data demografi dan geografis kelompok sasaran b. Standardisasi pengelolaan layanan bimbingankeagamaan c. Peningkatan bimbingan kelompok sasaran/binaan (Lembaga agama dan rumah ibadah) 2.2 Menggunakan platform digital atau metode penyuluhan non-tatap muka (seperti yang relevan selama	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	basis data terpadu nasional k. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan		pandemi) untuk menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas, terutama di daerah yang sulit dijangkau.	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais-Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		3 Bimbingan perkawinan tidak efektif	3.1 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penghulu dan sertifikasi fasilitator bimbingan perkawinan	
		4 Terjadinya pernikahan dini (dibawah usia perkawinan)	4.1 Pembinaan pra nikah pada remaja usia sekolah dilakukan terstruktur dan berdampak	
		5 a. Terbatasnya tenaga konselor bimbingan perkawinan b. Belum adanya standar kualitas layanan bimbingan perkawinan	5.1 Mengaktifkan kembali BP4	
			5.2 Mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan	
		6 a. Ketidakmerataan bantuan yang diterima tidak digunakan untuk peruntukan yang semestinya	6.1 Menetapkan kriteria objektif dan trans untuk alokasi bantuan dan melakukan audit distribusi secara erkala	
			6.2 Memperkuat mekanisme monito ring dan evaluasi (monev) pasca-penyaluran dan mewajibkan laporan penggunaan dana/barang oleh penerima bantuan.	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		7 Layanan pengukuran arah kiblat belum menjangkau seluruh masjid/ mushalla yang ada	7.1 a. Sosialisasi intensif tentang penting nya arah kiblat yang akurat secara syar'i dan ilmiah. b. Mengadakan program pengukuran ulang arah kiblat secara berkala oleh petugas yang kompeten (ahli falak/ geospasial) dengan menggunakan teknologi yang akurat.	Bagian Tata Usaha. Bidang Penais-Penyelenggara Zawa Bidang Urais, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		8 Distribusi kitab suci dan buku keagamaan belum menjangkau rumah ibadah yang ada	8.1 Distribusi kitab suci dan buku keagamaan dilakukan secara terbuka, merata dan menjangkau rumah ibadah	
		9 Ketidakakuratan data (data tidak valid)	9.1 a. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berlapis sebelum penetapan penerima b. Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi dan audit internal secara rutin.	
		10 a. Jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal terhadap jasa dan barang yang dihasilkannya belum maksimal b. Kurangnya kompetensi	10.1 a. Peningkatan layanan sertifikasi halal secara self declare b. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sertifikasi halal c. Peningkatan layanan konsultasi dan literasi halal	Bidang Urais dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		pendamping dan auditor halal	10.2 a. Mewajibkan pendamping PPH dan auditor halal untuk mengikuti pelatihan intensif dan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang terakreditasi, b. Menerapkan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan rinci untuk proses pendampingan dan audit, serta memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. c. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya peran pendamping dan auditor yang kompeten, sehingga mereka juga dapat mengidentifikasi potensi masalah	Bidang Urais dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan IKS:			Bidang PHU dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	1 Gagal berangkat karena risiko kesehatan, meninggal dan faktor ekonomi	1.1 Memitigasi tantangan yang timbul akibat karakteristik jemaah lansia yang cenderung berisiko tinggi (risti) dari segi kesehatan	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan IKS:			
	a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi	1 Ketidak cukupan sarana penunjang karena kerusakan,	1.1 a. Melengkapi sarana penunjang dan melakukan pemeliharaan rutin	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	atau ketidak sesuaian fasilitas fisik dengan standar yang dipersyaratkan	untuk semua fasilitas (listrik, AC, lift, sistem air, dan sanitasi) untuk mencegah kerusakan mendadak. b. Fasilitasi rencana darurat jika terjadi bencana atau kerusakan besar (misalnya, kebakaran, banjir) yang mengganggu operasional layanan, termasuk ketersediaan tanggap darurat dan sistem pemadam kebakaran.	Bidang PHU dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		2 a. Masyarakat atau jemaah tidak memahami layanan yang tersedia di PLHUT b. Sumber daya aparatur yang tidak memadai: c. Fasilitas dan infrastruktur yang kurang optimal	2.1 Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi PLHUT, alur layanan, dan fasilitas yang tersedia melalui berbagai media (cetak, digital, pertemuan). 2.2 Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas PLHUT mengenai prosedur layanan, manajemen konflik, keramahan, dan pelayanan yang ramah lansia/difabel. 2.3 Memastikan ketersediaan fasilitas dasar yang nyaman (ruang tunggu, toilet, area parkir, akses bagi difabel), serta kerja sama yang baik dengan bank mitra terkait agar layanan perbankan mudah diakses di lokasi	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan IKS:			Bidang PHU dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
	Persentase lembaga penyelenggara an haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus b. Lembaga penyelenggara umrah	1 Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah.	1.1 a. Membentuk tim khusus yang memonitor dan mengimplemen tasikan perubahan regulasi terbaru secara proaktif b. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan semua aspek operasional, keuangan, dan pelayanan tetap sesuai dengan standar akreditasi dan hukum yang berlaku	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan IKS:			
	Persentase pelayanan (akomodasi, konsum si, transportasi) jemaah haji sesuai standar	1 Nilai survey kepuasan jemaah menurun	1.1 Meningkatkan koordinasi pelayanan (ako modasi, konsumsi, transportasi) jema ah haji sesuai standar	
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan IKS:			
	a. Persentase petugas haji yang mempe roleh nilai kinerja diatas 75 b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	1 Kurangnya kompetensi petugas	1.1 Peningkatan sertifikasi petugas haji	
		2 Minimnya inovasi manasik haji berbasis teknologi	2.1 Penguatan sistem manasik haji	
BIDANG PENDIDIKAN				
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan, dengan IKS:			
	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan	1 Tidak meratanya kualitas lulusan	1.1 a. Peningkatan kualitas dan profesio nalitas tenaga pendidik	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan Prediket sangat baik		b. Pemerataan akses dan kualitas sarana prasarana c. Menerapkan early warning system (EWS) untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku)	Bidang Penmad dan Bidang Papkis dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan IKS:			
	a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusi b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan	1 Masih minimnya jumlah satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2 Belum meratanya bantuan sarana prasana pendidikan	1.1 a. Menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi guru b. Fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibel, serta alat bantu yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran inklusi. c. Mendorong terciptanya lingkungan madrasah yang hangat, ramah, menerima keragaman, dan menghargai perbedaan untuk mencegah diskriminasi dan perundungan. 2.1 Mengembangkan sistem prioritas bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling mendesak (misalnya, perbaikan ruang kelas yang rusak	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
d. kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren e. Persentase Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA) f. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah g. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren			berat, penyediaan air bersih, atau akses listrik/internet) pada satuan pendidikan yang belum tersentuh bantuan	Bidang Penmad dan Bidang Paps dan Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
	3	Terbatasnya kualitas dan kuantitas ruang belajar	3.1 a. Mendorong peran Komite Sekolah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah b. Fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet	
	4	Tidak memiliki kemampuan literasi dan numerasi dasar yang lebih baik.	4.1 Mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan non formal (PAUD)	
	5	Responsive gangguan kesehatan pada siswa lambat diatasi	5.1 a. Fasilitas layanan kesehatan sekolah pada setiap satuan pendidikan Islam di Sumatera Barat b. Mendorong satuan pendidikan Islam untuk melakukan kerjasama dengan puskesmas terdekat	
	6	Sulitnya mendapatkan data anak tidak sekolah yang real time dan valid	6.1 a. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan b. Menyusun data base (pendataan) anak tidak sekolah	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
10 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan dengan IKS: a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca danb Numerasi b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta	1 a. Keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa b. Kurangnya budaya membaca dan belajar	1.1 a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang inovatif b. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kualitas pembelajaran 1.2 a. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran (alat peraga pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, sarana praktek pembelajaran) b. Mengajak anak menggunakan berbagai prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari c. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	2 Masukan, ide, dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan di luar lingkungan sekolah (orang tua, tokoh masyarakat, alumni dan dunia usaha) dalam penyusunan rencana kerja tahunan masih rendah	2.1 Menyusun strategi tindakan nyata untuk mengelola potensi masalah, ancaman, atau hambatan yang diidentifikasi bersama oleh pihak sekolah dan sekolah (orang tua, tokoh masyarakat, alumni dan dunia usaha)	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		3 a. Banyak siswa yang tidak memahami pentingnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila b. Minimnya teladan positif dari pendidik	3.1 a. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat b. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan an karakter siswa berbasis pembela jaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan	
			3.2 Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis keteladanan dalam menanamkan karakter	
		4 Kegiatan ekstrakurikuler yang kurang variatif	4.1 Memperluas kegiatan pramuka, OSIS, kegiatan keagamaan, dan program bakti sosial sebagai media pembentukan karakter	



SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		5 a. Fokus pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan afektif dan psikomotorik b. Ketidak konsistenan penerapan aturan dan disiplin di sekolah maupun rumah	5.1 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan karakter siswa berbasis pembelajaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan 5.2 Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		6 Kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	6.1 Mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kontekstual yang mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	
		7 Menurunnya nilai akreditasi	7.1 Fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai seperti ruang kelas, ruang peendidik dan tenaga kependidikan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		8 a. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang belum optimal b. Sarana prasarana yang tidak memadai atau tidak sesuai standar c. Kurikulum yang kurang relevan atau tidak adaptif terhadap kebutuhan zaman d. Lingkungan belajar yang tidak kondusif atau aman e. Keterlibatan orang tua dan masyarakat yang rendah dalam mendukung pendidikan f. Sistem evaluasi dan penjaminan mutu internal yang lemah	8.1 Mengintensifkan program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik 8.2 Melakukan peremajaan atau pembangunan fasilitas fisik, laboratorium, dan teknologi pendukung pembelajaran 8.3 Melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan peserta didik 8.4 Menerapkan kebijakan keamanan, program anti-perundungan, dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan suportif 8.5 Mengadakan pertemuan rutin, program kemitraan sekolah-orang tua, dan melibatkan komite sekolah secara aktif. 8.6 Menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang efektif dan memanfaatkan data dari Rapor Pendidikan untuk analisis dan perencanaan tindak lanjut.	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		9 a. Keterbatasan kompetensi pen didik dalam mendukung pembelajaran billigual b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung	9.1 Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan mendukung pembelajaran billigual	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
			9.2 Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan pembe lajaran billigual	
		10 Sedikitnya jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	10.1 a. Penguatan skema muatan pembelajar an pilihan untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik b. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakuri kuler yang mendukung kualitas pembelajaran	
		11 a. Sekolah belum cukup mam pu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah b. Sekolah belum menghadir kan suasana belajar yang menjun jung tinggi toleransi keberaga man c. Sekolah belum memfasilitasi kebutuhan murid dengan disa bilitas maupun cerdas istimewa berbakat istimewa	11.1 Mendorong keterlibatan siswa dan komite sekolah dalam kegiatan pembelajaran	
			11.2 Meningkatkan frekuensi supervisi kelas untuk memastikan interaksi guru-siswa mendukung iklim belajar kondusif	
			11.3 a. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa saling berinteraksi secara positif dengan siswa lainnya dari beragam latar belakang suku, ras dan agama	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			b. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belajar agar aman, nyaman, dan ramah anak	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
		12 a. Guru dan siswa tidak memiliki akses yang memadai ke materi digital (karena keterbatasan infrastruktur, perangkat, atau jaringan), yang dapat menyebabkan disparitas dalam kesempatan belajar	12.1 c. Mengembangkan dan mendistribusikan materi digital yang dapat diakses, tanpa koneksi internet (misalnya, melalui aplikasi pembelajaran <i>offline</i> USB drive, atau server lokal/KIPIN)	
		b. Guru tidak terlatih menggunakan materi pembelajaran digital c. Guru dan/atau siswa tidak memiliki literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan materi ajar digital secara optimal.	d. Mencetak materi ajar digital menjadi bahan cetak (buku, modul, lembar kerja) untuk memastikan ketersediaan sumber belajar bagi yang tidak memiliki perangkat atau jaringan yang memadai 12.2 a. Mengadakan FGD yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan digital guru b. Melatih guru menggunakan Learning Management Systems (LMS) atau platform pendidikan lainnya untuk mengelola materi, tugas, dan penilaian secara daring	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			c. Memasangkan guru yang lebih mahir teknologi (pionir digital) dengan rekan yang membutuhkan bantuan (guru non-tech savvy). Untuk menciptakan ruang yang aman untuk bertanya dan belajar d. Mendorong pembentukan komunitas di mana guru dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait penggunaan materi digital.	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan IKS:			
	a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa memenuhi SNP c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen	1 a. Kebijakan sertifikasi yang berubah-ubah, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan guru b. Ketersedian jam mengajar menjadi terbatas 2 Lingkungan belajar lebih kondusif	1.1 Menyediakan program pelatihan yang terstruktur dan pendampingan yang memadai sebelum uji sertifikasi dilakukan. 1.2 Pemetaan dan pemerataan guru madrasah 2.1 Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, aktif, dan kolaboratif untuk memaksimalkan potensi siswa.	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil, Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen f. Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil i. Persentase pengawas dan guru yang meningkat jenjang karir j. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) k. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	3	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung tugas tenaga kependidikan	3.1 a. Inventarisasi dan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang ada untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan mencegah kerusakan. b. Menerapkan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk memperpanjang masa pakai dan menjaga kondisi fasilitas agar tetap layak digunakan.	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kepala Kankemenag se Sumatera Barat
	4	Ketersedian jam mengajar menjadi terbatas	4.1 Pemetaan dan pemerataan/ distribusi guru	
	5	Terbatasnya akses Guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	5.1 a. Fasilitasi Guru dan Kepala Sekolah untuk mengikuti kursus, seminar, lokakarya, atau diklat fungsional yang diselenggarakan secara daring b. Mengadakan kegiatan studi banding atau kunjungan ke sekolah lain yang dianggap lebih maju untuk berbagi praktik baik (best practices). c. Mengoptimalkan peran KKG/MGMP	
	6	Tidak bisa menjadi teladan (role model)	6.1 a. Mencontohkan nilai-nilai moderasi (integritas, solidaritas, dan tenggang rasa)	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			b. Membangun saling pengertian antar siswa dari latar belakang daerah, suku, dan budaya yang berbeda, sehingga tercipta suasana yang lebih aman dan nyaman bagi semua	Bidang Penmad dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		7 Peningkatan jenjang karir belum sebanding dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi	7.1 Melaksanakan evaluasi kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) secara berkala.	
		8 Anggaran tunjangan profesi bagi guru yang lulus PPG belum teralokasikan pada DIPA	8.1 Penjaminan kesejahteraan pendidik dalam bentuk finansial dan nonfinansial	
		9 Tidak adanya koordinasi dalam pengadaan dan pemerataan guru agama pada sekolah umum	9.1 Monitoring dan evaluasi rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama pada sekolah umum berbasis rencana kebutuhan yang ditindak lanjuti	Bidang Papkis
BIDANG TATA KELOLA				
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran, dengan IKS:			Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
	Nilai Kinerja Anggaran	1 Nilai Kinerja Anggaran rendah	1.1 a. Melakukan analisis penyebab rendahnya nilai kinerja anggaran Melakukan revisi Halaman III DIPA secara rutin (di awal triwulan) untuk menyelaraskan anggaran dengan realisasi.	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			b. Menyusunproyeksi penarikan dana yang cermat, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal, dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. c. Akselerasi proses pengadaan barang /jasa (PBJ) dan pelaksanaanprogram/kegiatan untuk mempercepat realisasi. d. Memastikan "revolving" UP mencapai minimal 100% per bulan sesuai kebutuhan. Jika tidak, setor kembali kekas negara. Percepat digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi. e. Melakukan monev secara berkala	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, dengan IKS:			
	a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	1 a. Penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu b. Belum dilakukan reuiu	1.1 Melakukan evaluasi dan penilaian ulang terhadap proses yang menyebabkan keterlambatan 1.2 a. Memastikan semua data dalam laporan sudah lengkap dan akurat b. Berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk segera melakukan reuiu terhadap laporan kinerja	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		2 a. Penilaian eksternal pem bangunan ZI dibawah 75 b. Rendahnya kualitas pelayanan public c. Minimnya inovasi	2.1 a. Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi (penilaian eksternal) b. Menyusun rencana aksi perbaikan c. Melakukan perbaikan di 6 Area Perubahan d. Pemantauan dan evaluasi internal berkelanjutan e. Komitmen/ keterlibatan aktif pimpinan 2.2 a. Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dan terukur. b. Mengadakan pelatihan frontliner tentang pelayanan prima c. Membuka mekanisme pengaduan dan survey kepuasan masyarakat secara rutin. d. Menindaklanjuti hasil pengaduan dan survey dengan rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan 2.3 a. Membentuk unit atau tim inovasi di setiap bagian b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/industri untuk adopsi inovasi	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN, dengan IKS:			Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	1 Nilai IKPA rendah	1.1 a. Meningkatkan kualitas perencanaan, b. Mempercepat pelaksanaan belanja, c. Disiplin dalam penyerapan anggaran setiap bulan, dan d. Melakukan analisis rutin untuk mengidentifikasi satuan kerja atau indikator yang bermasalah e. Memberikan reward dan punishment	
	b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	2 TLHP belum dapat ditindaklanjuti	2.1 a. Identifikasi dan Analisis Kendala secara Menyeluruh b. Melaporkan kondisi dan kendala yang dihadapi secara resmi kepada pihak pengawasan c. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan aparat pengawas	
	c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		3.1 a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi kesalahan secara spesifik b. Menyusun laporan keuangan kembali	
	d. Persentase satuan kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	3 Kesalahan laporan	4.1 a. Perubahan pola pikir dan komitmen pimpinan	
	e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	4 Bersifat administrative, belum beriringan dengan aksi nyata		



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			b. Peningkatan kualitas desain dan dokumentasi pengendalian c. Implementasi pengendalian yang terstruktur d. Pengawasan, penilaian dan perbaikan berkelanjutan e. Penyusunan dan evaluasi SOP berkelanjutan	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		5 Belum dilakukan Ofname Fisik Barang Inventaris (OFBI) dan penghapusan	5.1 Melakukan OFBI dan penghapusan secara terjadwal, transparan dan akuntabel	
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan IKS:			
	a. Indeks Profesionalisme ASN	1 Nilai indeks tidak sebanding dengan profesionalismen ASN	1.1 Menerapkan sanksi tegas bagi yang tidakmelaksanakan komitmen (teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat)	
	b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	2 a. Rencana kebutuhan pegawai tidak berdasarkan ANJAB b. Penempatan pegawai yang diangkat, tidak pada satuan kerja yang mengusulkan	2.1 Memberikan pendampingan dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAB 2.1 Penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan satuan kerja	
	c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	3 a. Belum ada ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	3.1 a. Memberikan peluang dan dukungan bagi ASN untuk mengikuti pemilihan pegawai teladan/ inspirativ	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		b. Kinerja individu ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	b. Memberikan penghargaan (insentif, promosi, apresiasi) bagi unit/pegawai berprestasi 3.2 Menetapkan target kinerja individu ASN mendukung kinerja organisasi	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum, dengan IKS:			
	a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	1 Kasus hukum yang ada belum sepenuhnya bias diselesaikan	1.1 Penguatan kapabilitas dan kapasitas SDM	
	b. Persentase rekomendasi izin orang asing	2 Mekanisme pemantauan aktivitas orang asing yang diberi rekomen dari belum ada	2.1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pemantauan aktivitas orang asing	
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dengan IKS:			
	a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses b. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	1. Potensi data hilang, rusak, atau dimanipulasi secara tidak sah, yang membahayakan keaslian dan keandalan arsip	1.1 a. Memastikan data diarsip ke lokasi yang aman, baik secara fisik (<i>hard drive</i> eksternal terenkripsi) maupun di layanan cloud yang aman, dan pastikan salinan data terbaru tersedia untuk pemulihan b. Membatasi akses ke dokumen sensitif hanya untuk personel yang berwenang dan memiliki kebutuhan kerja yang sah c. Menggunakan enkripsi untuk melindungi semua data sensitive	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			d. Menerapkan TTE dan metadata standar untuk menjamin keaslian dan integritas arsip digital	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		2. a. <i>Roadmap</i> pengembangan sarana dan prasarana tidak mendukung sasaran atau target kinerja utama organisasi.	2.1 Identifikasi kesenjangan spesifik antara kondisi infrastruktur yang diinginkan (untuk mencapai target kinerja) dan apa yang saat ini direncanakan dalam roadmap.	
		b. Kebutuhan kantor dapat berubah seiring waktu	2.2 a. Menerapkan manajemen perubahan- yang proaktif dan memiliki pola pikir yang fleksibel. b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor didasari oleh kebutuhan aktual untuk memaksimalkan produktivitas dan menghemat anggaran	
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dengan IKS:			
	a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	1. Nilai PPID belum maksimal	1.1 a. Reviu dan mutakhirkan SOP b. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan c. Membangun komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi. d. Pastikan informasi yang disediakan selalu mutakhir, lengkap dan	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			akurat agar dapat dipercaya oleh masyarakat. e. Menyediakan layanan informasi berbasis digital yang mudah diakses, ramah pengguna, dan mendukung aksesibilitas (melalui website, media sosial, atau aplikasi) f. Pastikan permintaan informasi ditanggapi dengan cepat dan berikan solusi yang efektif terhadap kebutuhan pemohon Pelatihan berkelanjutan bagi PPID dan tim layanan informasi publik untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan prima. g. Menggunakan hasil evaluasi dan umpan balik masyarakat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan PPID	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		2. a. Data dan informasi tidak valid b. Konten keagamaan yang tidak termoderasi atau ekstrem berpotensi memicu radikalisme, ujaran kebenci	2.1 Memastikan data dan informasi yang akan dipublikasikan sudah terverifikasi dengan baik.	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		c. an, dan intoleransi antar umat beragama. d. Kesulitan siswa membedakan konten pembelajaran yang berkualitas baik dari yang buruk	2.2 Mengampanyekan nilai-nilai moderasi beragama secara luas, baik melalui media konvensional maupun digital, untuk menumbuhkan sikap seimbang, toleran, dan saling menghargai di masyarakat 2.3 Konten pendidikan yang dipublikasikan mendukung metode pembelajaran pada satuan pendidikan	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan IKSK:			
	a. Indeks Pembangunan Statistik b. Persentase data statistik yang dipublikasi	1. Nilai Indeks Pembangunan Statistik Rendah 2. a. Anomali (inkonsistensi data) b. Metodologi dan analisis pengolahan data tidak sesuai aturan c. Tidak adanya metadata atau	1.1 a. Memastikan data yang dikumpulkan dan dipublikasikan akurat, lengkap, atau relevan, dan mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang benar b. Penggunaan metodologi sesuai standar, tepat dalam pengumpulan dan pengolahan data dan menghasilkan data yang valid/ dapat diperbandingkan 2.1 Perancangan basis data untuk mengorganisir data secara efisien dan mengurangi redundansi (penyimpanan salinan data yang sama di lebih dari satu tempat).	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		dokumentasi yang jelas d. Keterlambatan atau jadwal publikasi yang tidak teratur	2.2 Penggunaan metodologi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 2.3 a. Menetapkan aturan/ standar yang jelas untuk pembuatan, pemeliharaan, dan peninjauan metadata serta dokumentasi semua aset data b. Penggunaan sistem atau katalog data untuk mengelola dan menyimpan metadata, untuk memudahkan pengguna, menemukan, memahami, dan mengakses informasi yang relevan dengan cepat 2.4 Menerapkan alur kerja (workflow) yang jelas dan terstandarisasi untuk publikasi data	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan, dengan IKS:			
	a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	1 a. Adanya gap (kesenjangan) signifikan antara penyerapan anggaran dan capaian output b. Penyerapan tinggi, output rendah c. Penyerapan rendah, output tinggi	1.1 a. Memastikan rencana kerja dan anggaran disusun secara realistis dan akurat sejak awal b. Melakukan penyesuaian anggaran dan kinerja c. Menyusun rencana penarikan belanja yang detail dan akurat	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
	d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	d. Ketidaktepatan perencanaan program dan penganggaran	untuk memastikan ketersediaan kas yang tepat waktu dan menghindari penumpukan pencairan di akhir tahun. d. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa e. Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan f. Penguatan monitoring dan evaluasi	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		2 Target yang ditetapkan tidak tercapai	1.2 a. Memastikan tujuan program dan anggaran selaras dengan sasaran strategis Kementerian Agama, serta dapat diukur dan realistis. b. Manfaatkan data kinerja dan realisasi anggaran periode sebelumnya sebagai dasar untuk proyeksi di masa mendatang c. Memastikan data keuangan dan operasional yang digunakan dalam perencanaan akurat, lengkap, dan mutakhir 2.1 a. Melakukan evaluasi terhadap target dan proses yang ada b. Mengidentifikasi hambatan c. Menyusun rencana perbaikan yang realistis untuk periode berikutnya	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
		3 Pembentukan opini publik yang salah	3.1 a. Kebijakan yang disampaikan harus jelas dan terukur b. Mencounter pemberitaan negative tetang Kementerian Agama	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
		4 a. Tidak semua pemangku kepen tingan (siswa, guru, orang tua dan masyarakat) dengan latar belakang kondisi yang berbeda memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan b. Informasi yang ditampilkan tidak menarik	4.1 Membuat konten layanan publik yang mudah diakses pengguna	
			4.2 Mengelola tampilan informasi yang mudah dimengerti dan indah dipandang	
		5 Belum optimalnya pengelolaan dan penyajian data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	5.1 a. Mengelola dan menyajikan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Menerbitkan publikasi Data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	
		6 Nilai Kinerja Anggaran Program Pendidikan Islam rendah	6.1 a. Melakukan analisis penyebab rendahnya nilai kinerja anggaran b. Melakukan revisi Halaman III DIP Asecara rutin (di awal triwulan	



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		INDIKASI RESIKO	INDIKASI PERLAKUAN RESIKO	INDIKASI PEJABAT PERLAKUAN RESIKO
			untuk menyelaraskan anggaran dengan realisasi. c. Menyusunproyeksi penarikan dana yang cermat, termasuk belanja pegawai, barang, dan modal, dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.Akselerasi proses pengadaan barang /jasa (PBJ) dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mempercepat realisasi. d. Memastikan "revolving" UP mencapai minimal 100% per bulan sesuai kebutuhan. Jika tidak, setor kembali ke kas negara. e. Digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi. f. Melakukan monev secara berkala	Bagian Tata Usaha dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat



BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. TARGET KINERJA

Untuk mendukung ketercapaian visi dan misi serta mendukung kebijakan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mendukung pelaksanaan 5 tujuan yang dilengkapi dengan 21 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian SK strategis diukur menggunakan IKS sebagai berikut:

1. Program Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan

- Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Sasaran Kegiatan (Output)

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
 - a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
 - b. Persentase KUA yang menyeleng garakan EWS

Kegiatan

- Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
- Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen



- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
- Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Pelayanan Haji Dalam Negeri
- Pelayanan Haji Luar Negeri
- Pembinaan Haji

Sasaran Kegiatan (Output)

1. Meningkatkan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 - b. Persentase peningkatan audiensi MTQ/ Pesparawi/ Pesparani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Trtpitika Gatha
 - c. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 - d. Persentase lembaga agama dan social keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :
 - a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 - c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
 - d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
 - e. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 - f. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
 - g. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 - h. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
 - i. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 - j. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional



- k. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 - b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) : a. Lembaga penyelenggara haji khusus; dan b. Lembaga penyelenggara umrah
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

2. Program Wajib Belajar 13 Tahun

Kegiatan

- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

Sasaran Kegiatan (Output)

8. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan: Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
9. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana



- c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
- d. Persentase Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD (TK/ RA/BA)
- e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
- f. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kegiatan

- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
- Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam

Sasaran Kegiatan (Output)

10. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: literasi membaca dan numerasi
 - b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
 - c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 - e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
 - f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 - g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
 - h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 - i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual



- j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
 - l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
11. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
- a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
 - b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
 - c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 - e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 - f. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
 - g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
 - h. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 - i. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
 - j. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - k. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

4. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan

- Pembinaan Administrasi Perencanaan
- Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
- Pembinaan Administrasi Kepegawaian
- Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
- Pembinaan Administrasi Umum
- Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik
- Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi
- Dukungan Manajemen Pendidikan



- Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
- Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
- Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
- Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Sasaran Kegiatan (Output)

12. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran
13. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 - b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
14. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - b. wwsaPersentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 - d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
15. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penem patan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 - c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif
16. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 - b. Persentase rekomendasi izin orang asing



17. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 - b. Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
18. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 - b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Indeks Pembangunan Statistik
 - b. Persentase data statistik yang dipublikasi
20. Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
 - b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
 - c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 - d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 - e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
 - f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

Target kinerja pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat hingga 2029, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1. Target Kinerja di Tahun 2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
BIDANG AGAMA						
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	Nilai	70,87	85,45
		2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	-	20,00



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
		3 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	20,85	57,25
		4 Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharmagita/ Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	14,28	75,00
		5 Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	37,58	50,35
		6 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	33,45	100
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1 Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	80,00	90,00
		2 Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Persen	1 : 8	1 : 5
		3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	54,00	2,5
		4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	35,64	25,00
		5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	45,75	25,00
		6 Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	4,58	20,00
		7 Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	2,46	2,50
		8 Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	41,91	20,00
		9 Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	15,20	20,00
		10 Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	26,55	20,20
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten/kota yang diterbitkan	Persen	12,56	1,70
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	99,85	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	52,63	-
		2 Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	75,00	-
5	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	Persen	45,80	-
		b. Lembaga penyelenggara umrah		75,00	-
6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	95,00	-
7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	90,00	-
		2 Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	99,70	-
BIDANG PENDIDIKAN					
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	75,00	80,00
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	1,15	3,40
		2 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	60,00	70,00
		3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	0,65	0,90
		4 Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalya/Nava Dhamma sekha)	Persen	12,00	18,00



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
		5 Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	10,00	35,50
		6 Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Persen	11.495	12.838
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	Nilai	68,25 64,95	70,00 66,25
		2 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	80,00	98,12
		3 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	96,00	98,99
		4 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	420	747
		5 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0,45	1,50
		6 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	90,00	98,40
		7 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	6,00	72,00
		8 Persentase satuan pendidikan unggul yang terakreditasi	Persen	12,95	250
		9 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	14,70	18,00
		10 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,5	1,0
		11 Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengeloaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	45,00	60,00
		12 Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	35,00
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1 Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persem	43,65	43,75
		2 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Persen	1: 10	1 : 8



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
		3 Persentase tenaga kepen didikan lainnya yang memenuhi kualifi kasi dan kompetensi minimal	Persen	30,25	40,75
		4 Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	60.00	46,00
		5 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompe tensi Guru (AKG) minimal predi kat terampil	Persen	40,55	46,00
		6 Persentase Kepala Satuan Pendi kan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompe tensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	65,00	70,30
		7 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mempe roleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	35,00	49,25
		8 Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	1,50	1,60
		9 Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	25,25	25,30
		10 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	43,65	45,00
		11 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemeraa taan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	12,5	20,00
BIADANG TATA KELOLA					
12	Meningkatnya kualitas perenca naan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	74,50	87,00
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	74,24	76,52
		2 Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	31.10	40,27
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksa naan Anggaran	Nilai	85,00	88,00
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	90,00	91,65
		3 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	95,25	97,50
		4 Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	80,00	91,00
		5 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	98,25	98,60



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET 2029
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Indeks Profesionalisme ASN	Persen	79,15	80,00
		2 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	85,00	90,00
		3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	Orang	7	10
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	89,50
		2 Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	90,00	98,50
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	Persen	70,86	76,20
		2 Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	82,00	85,30
		3 Nilai layanan kesehatan	Nilai	0	93,23
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1 Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Persen	89,00	90,75
		2 Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	16,00	26,00
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,50	1,95
		2 Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	58,00	66,00
20	Meningkatnya layanan prima bidang pendidikan	1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	98,00	99,00
		2 Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,80	2,45
		3 Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	0	25,00
		4 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	14,50	25,00
		5 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	70,00	90,00
		6 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	65,00	78,90
		7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bidang Pendidikan	Nilai		93,00



3.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama serta sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memerlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 : Indikasi Pendanaan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp. 000.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
025.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	45.889	47.485	43.984	46.226	48.558
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.893	1.919	2.015	2.116	2.222
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	19.374	18.392	20.343	21.361	22.430
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	997	1.097	1.152	1.210	1.271
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	12.584	4.013	13.214	13.875	14.569
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.240	1.370	2.352	2.470	2.594
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.445	1.840	1.932	2.029	2.131
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.105	1.715	2.211	2.322	2.439
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	266	180	293	323	356
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	429	363	472	520	546
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	312	16.596	-	-	-
2148	Pembinaan Haji	4.190	-	-	-	-
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	54	-	-	-	-
025-DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun	136.781	122.219	143.645	150.840	158.405
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	840	-	890	930	980
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	134.851	121.899	141.594	148.674	156.108
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	863	161	907	953	1.001
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	55	-	64	74	86
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	172	159	190	209	230
025-DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	273.562	244.438	287.290	301.680	316.810
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8.986	30.959	14.770	15.140	15.519
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	58.719	47.724	52.719	54.037	55.388
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	1.554	-	1.710	1.881	2.070
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen	283	378	416	458	504
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	237	847	890	935	982
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	150	170	187	206	227



PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp. 000.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
025-WA	Program Dukungan Manajemen	1.467.518	1.854.994	1.899.175	1.939.732	1.981.269
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	137	23	151	166	183
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	339	216	373	411	452
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	263.244	262.366	267.614	272.967	278.426
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	744	214	782	821	862
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	690	333	725	762	800
2103	Pembinaan Administrasi Umum	19.506	16.247	20.481	21.505	22.580
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	316	222	364	419	482
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	1.129.144	1.522.894	1.553.352	1.584.419	1.616.107
2125	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	8.329	10.461	10.984	11.533	12.110
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	41.212	41.202	43.273	45.436	47.708
2138	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	70	199	240	288	345
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	213	183	256	308	370
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	233	238	286	344	420
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	245	196	294	353	424
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.096	-	-	-	-
JUMLAH		1.720.117	2.104.776	2.157.496	2.209.455	2.262.922



BAB IV PENUTUP

Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 ini, merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama. 2025-2029, yang menjadi rujukan bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta bidang tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Pencapaian target kinerja, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja. Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Untuk mengimplementasikan agar tujuan, target, dan sasaran Renstra dapat dicapai, dibutuhkan komitmen kuat dan sinergitas dari seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan kinerja secara professional dan penguatan tim kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat.

Di samping itu, pengendalian dan evaluasi menjadi kunci penting untuk mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila Renstra ini dilaksanakan dengan



sungguh-sungguh, akan memberikan dampak ikutan jangka panjang yang berlipat ganda (multiplier effects) bagi pembangunan bidang agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Sumatera Barat

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita mewujudkan kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



Mustafa



Lampiran II : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN)		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT									1.720.117	2.104.776	2.157.496	2.209.455	2.262.922	KEPALA KANWIL
025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama									45.889	47.485	43.984	46.226	48.558	Bagian TU, Bidang Urais, Penais dan Penyelenggara Zawa, Bidang PHU, Bimas (Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Bara
SK-1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK1	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	20,85	47,50	50,00	52,50	55,00	57,25						
IKSK2	Persentase povinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi	Nilai	70,87	70,89	71,90	85,20	85,30	85,45						
IKSK3	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	16,00	19,00	21,00	22,00	23,00						
IKSK4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsaawa Dharmagita/ Swayam Vara Tripitaka Gatha	Persen	14,28	22,80	24,00	50,00	65,00	75,00						
IKSK5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	37,58	30,40	32,00	45,15	47,65	50,35						
IKSK6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	33,45	76,00	80,00	85,00	90,00	100,00						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK-2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (laporan harian, konten digital, kediklatan)	Persen	80	81,99	85,25	86,5	88,5	90,00						
IKSK2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Persen	1 : 8	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5						
IKSK3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	54,00	30,00	32,50	1,50	2,00	2,5						
IKSK4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	35,64	12,14	14,12	20,00	22,50	25,00						
IKSK5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	45,75	15,00	17,15	20,00	22,50	25,00						
IKSK6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	4,58	16,63	17,50	17,50	18,00	20,00						
IKSK7	Persentase masjid/ musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	2,46	2,38	2,50	2,50	2,50	2,50						
IKSK8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	41,91	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	15,2	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK10	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	26,55	14,73	15,50	18,50	19,20	20,20						
IKSK11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	12,56	18,00	20,00	1,30	1,50	1,70						
SK-3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	98,02	99,85	-	-	-	-						
SK-4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													
IKSK1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	36,84	52,63	-	-	-	-						
IKSK2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	73,40	75,00	-	-	-	-						
SK-5	Meningkatnya kualitas pembina an dan pengawasan penyeleng gara ibadah Haji Khusus dan Umrah													
IKSK	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);													



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	Persen	45,80 75,00	45,80 75,00	- -	- -	- -	- -						
SK-6	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	94.75	95,00	-	-	-	-						
SK-7	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji													
IKSK1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	85,00	90,00	-	-	-	-						
IKSK2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	99,50	100	-	-	-	-						Bagian TU dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama									1.893	1.919	2.015	2.116	2.222	
RO	5620 QDB 001 FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik													
IKRO	Jumlah FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	Provinsi	18	18	20	20	20	20						
RO	5620 QDC 002 Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional													
IKRO	Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	55	82	85	88	91	94						Bimas Kristen
IKRO	Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kerjasama kerukunan umat beragama	Orang	45	100	120	150	180	210						
2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen									1.445	1.840	1.932	2.029	2.131	
RO	2137.QDD.001- Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Kristen													
IKRO	Jumlah dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	1	1	1	1	1	1						
RO	2137.PEG.001- Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARA WI)													
IKRO	Jumlah peserta event Seni Budaya Agama Kristen	Orang	60	-	238	-	-	250						
RO	2137.QDB.001- Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen													
IKRO	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1						
RO	2137.QDC.001- Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN													
IKRO	Jumlah Penyuluh Non PNS Penerima Tunjangan	Orang	48	30	30	30	30	30						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2137.QDC.002- Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya													
IKRO	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	48	30	30	30	30	30						
IKRO	Jumlah Penyuluh Agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen	Orang	48	30	30	30	30	30						
RO	2137.QDC.003 - Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media													
IKRO	Jumlah penyuluh agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media	Orang	48	38	38	38	38	38						
IKRO	Jumlah konten digital penyuluhan agama Kristen inklusif transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten	0	1	5	10	11	12						
RO	2137.QDE.001- Bimbingan Keluarga Kristiani													
IKRO	Jumlah Keluarga Kristiani yang memperoleh Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	150	-	180	200	200	200						
IKRO	Jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan	Layanan	2	-	2	2	2	2						
RO	2137.QDE.002- Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kristiani													
IKRO	Jumlah calon pengantin Kristiani	Catin	-	69	100	100	100	100						
RO	2137.QEI.001 - Bantuan Rumah Ibadah Agama Kristen yang Difasilitasi untuk meningkatkan Layanan													
IKRO	Jumlah Rumah Ibadah Agama Kristen yang mendapat bantuan dalam pemenuhan standar sarana prasarana	Lembaga	3	-	6	10	15	20						
RO	2137.QEO.001 - Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan													
IKRO	Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang disediakan	Unit	750	0	0	15	15	15						
IKRO	Jumlah Buku Keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	0	0	0	15	15	15						
2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik									2.105	1.715	2.211	2.322	2.439	Bimas Katolik
RO	2140.PEG.001 - Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)													
IKRO	Jumlah peserta event seni budaya agama Katolik	Orang	150	150	150	150	150	150						
RO	2140.QDB.002- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik													
IKRO	Jumlah lembaga agama Katolik dan sosial keagamaan Katolik yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	5	5	5	5	5	5						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2140.QDD.002 - Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik													
IKRO	Jumlah dialog kerukunan agama Katolik difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kegiatan	1	1	1	1	1	1						
RO	2140.QDB.001- Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan													
IKRO	Jumlah Calon Penerima dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	10	10	10	10	10	10						
IKRO	Jumlah Lembaga BAKKAT yang dibina	Kegiatan												
RO	2140.QDB.003 - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Agama Katolik (KWI)													
IKRO	Jumlah lembaga agama Katolik yang profesional yang dibantu	Lembaga	5	5	5	5	5	5						
RO	2140.QDC.001 - Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan													
IKRO	Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	61	10	0	0	0	0						
RO	2140.QDC.002 - Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya													
IKRO	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan Katolik yang mendapatkan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik	Kelompok	315	315	25	25	25	25						
IKRO	Jumlah penyuluh agama Katolik yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	61	13	5	5	5	5						
RO	2140.QDC.003 - Penyuluh Agama Katolik yang dibina menjadi influencer sosial media													
IKRO	Jumlah Konten Digital Keagamaan Katolik Inklusif Transformatif yang dihasilkan	Orang	0	2	2	3	3	3						
RO	2140.QDE.001- Bimbingan Keluarga Bahagia Katolik													
IKRO	Jumlah keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Orang	4	4	4	4	4	4						
RO	2140.QDE.002- Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Katolik													
IKRO	Jumlah peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik	Orang	40	40	40	40	40	40						
IKRO	Jumlah remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbingan pemahaman perkawinan	Orang	50	40	30	30	30	30						
IKRO	Jumlah calon pengantin Katolik yang mendapatkan bimbingan perkawinan	orang	30	30	40	40	40	40						
RO	2140.QEI.009- Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan													
IKRO	Jumlah Rumah Ibadah Katolik yang Memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah	5	5	5	5	5	5						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2140.QEI.011 - Bantuan Operasional Pembinaan Bakkat Katolik													
IKRO	Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Katolik yang meningkatkan kompe tensi, tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	lembaga	1	1	1	1	1	1						
RO	2140.QEO.001 - Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Katolik yang disediakan													
IKRO	Jumlah peningkatkan Kitab Suci Katolik yang disediakan	Kitab suci	30	30	107	150	150	150						
IKRO	Jumlah buku keagamaan Katolik pendukung peribadatan sesuai kaidah	Buk liturgi	20	20	140	150	150	150						
2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu									266	180	293	323	356	Bimas Hindu
RO	2143 AEG 001 Event seni budaya dan Hari Besar Keagamaan Hindu													
IKRO	Jumlah peserta event seni budaya agama	Jumlah	0	11	0	0	15	0						
RO	2143 QDB 001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Hindu													
IKRO	Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	4	4	4	4	4	4						
RO	2143 QDD 002 Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu													
IKRO	Jumlah dialog kerukunan agama Hindu difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	0	0	1	1	1	1						
RO	2143 QDC 001 Penyuluh Agama Hindu Non ASN Penerima Tunjangan													
IKRO	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	3	3	0	3	3	3						
RO	2143 QDC 002 Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya													
IKRO	Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Orang	3	3	0	3	3	3						
RO	2143 QDC 003 Penyuluh Agama Hindu yang yang dibina menjadi influencer sosial media													
IKRO	Jumlah Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif yang dihasilkan	Konten	0	0	0	0	0	0						
RO	2143 QDE 001 Bimbingan Keluarga Sukinah													
IKRO	Jumlah keluarga mendapatkan bimbingan keluarga Sukinah	Jumlah	40	0	30	40	45	50						
RO	2143 QDE 002 Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Hindu													
IKRO	Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Jumlah	20	30	15	20	25	25						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah catin yang memperoleh bimbingan perkawinan	Jumlah	2	4	3	5	5	5						
RO	2143 QEO 001 Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan													
IKRO	Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	5	0	4	5	10	15						
IKRO	Jumlah buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	45	0	4	5	5	5						
RO	2143 QEI 003 Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan													
IKRO	Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Jumlah	1	1	1	1	1	1						
RO	2143 QDB 001 Lembaga Agama yang dibantu													
IKRO	Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	5	5	5	5	5	5						
RO	2143 QEI 002 Prasarana lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu													
IKRO	Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	4	4	4	4	4	4						
RO	2143 QDB 002 Pembinaan Lembaga Dana Punia yang diperkuat literasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan													
IKRO	Jumlah calon penerima dana Dana punia terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	0	0	1	1	1	1						
RO	2143 QEI 004 Bantuan Opera sional Badan Dharma Dana Nasional (BDDN)													
IKRO	Jumlah Lembaga Dharma Dana yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Lembaga	0	0	1	1	1	1						
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha									429	363	472	520	546	Bimas Buddha
RO	2145 PEG 001 Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayam vara Tripitaka Gatha)													
IKRO	Jumlah peserta event seni budaya agama	Orang	7	7	15	20	25	30						
RO	2145 QDD 001 Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha													
IKRO	Jumlah dialog kerukunan agama Buddha difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kelompok Masyarakat	1	1	2	3	4	5						
RO	2145 QDB 002 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha													
IKRO	Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	1	1	2	3	4	5						
RO	2145 QDC 001 Penyuluh Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan													
IKRO,	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	10	1	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2145 QDC 002 Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya													
IKRO	Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Orang	2	2	2	3	4	5						
RO	2145 QDC 003 Penyuluh Agama Buddha yang Aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif													
IKRO	Jumlah penyuluh agama Buddha yang dibina menjadi influenser sosial media	Orang	0	0	2	3	4	5						
IKRO	Jumlah Konten Digital Penyuluh Agama Buddha Inklusif Transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten Digital	10	15	20	30	35	40						
RO	2145 QDE 001 Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya													
IKRO	Jumlah layanan bimbingan keluarga Hitta Sukkhaya yang disediakan	Keluarga	1	1	2	3	4	5						
RO	2145 QDE 002 Calon Pengantin Buddha yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan													
IKRO	Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama Buddha yang tersertifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0						
IKRO	Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah agama Buddha	Remaja	0	0	0	0	0	0						
IKRO	Jumlah catin agama Buddha yang memperoleh bimbingan perkawinan	Pasangan	10	12	15	23	25	33						
RO	2145 QEO 001 Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha													
IKRO	Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	0	15	15	20	25	35						
IKRO	Jumlah buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	0	138	140	150	170	200						
IKRO	Jumlah sarana peribadatan yang disediakan	Unit												
RO	2145 QEI 003 Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan													
IKRO	Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Rumah Ibadah	1	2	4	5	6	6						
RO	2145 QEI 001 Bantuan Lembaga Agama Buddha													
IKRO	Jumlah Lembaga Agama Buddha yang Profesional	Lembaga	1	1	1	2	2	2						
RO	2145 QDD 002 Kelompok Masyarakat Buddha yang Memperoleh Penguatan Pemberdayaan Ekonomi													
IKRO	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan dikuatkan dalam pemberdayaan ekonomi	Kelompok Masyarakat	0	0	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah									19.374	18.392	20.343	21.361	22.430	Bidang Urais dan Kankemenag se Sumatera Barat
RO	2104.UAI.005 KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)													
IKRO	Jumlah KUA yang mengembangkan EWS (Early Wearing System) dalam menjaga toleransi dan cinta kemanusiaan umat Islam	Lembaga	0	28	35	35	38	38						
RO	2104.QDE.002 Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan													
IKRO	Jumlah Calon Pasangan Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Pasangan	4.860	23.704	24.889	26.133	27.440	28.812						
IKRO	Jumlah Remaja Usia Sekolah yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah	Orang	1.579	8.000	8.800	9.680	10.648	11.712						
RO	2104.QDE.001 Bimbingan Keluarga Sakinah – Maslahat													
IKRO	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Maslahat	Keluarga	270	73	73	73	74	74						
RO	2104.UAI.001 KUA Berdaya													
IKRO	Jumlah KUA yang Ditingkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Keagamaan	Lembaga	174	174	174	174	174	174						
RO	2104.UAI.002 KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana													
IKRO	Jumlah KUA yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Lembaga	23	30	31	30	30	30						
RO	2104.UAI.003 KUA yang Dibangun (SBSN)													
IKRO	Jumlah KUA yang Dibangun	Lembaga	4	4	3	8	4	4						
RO	2104.UAI.004 KUA Rusak Sedang dan Berat Direhabilitasi													
IKRO	Jumlah KUA yang Rusak Sedang dan Berat yang Direhabilitasi	Lembaga	5	5	5	5	5	5						
RO	2104.QAA.002 Layanan Nikah dan Rujuk													
IKRO	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang Dilayani	Pasangan	36.489	34.664	32.931	31.284	29.720	28.234						
RO	2104.QDC.001 Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya													
IKRO	Jumlah Penghulu yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	180	250	150	125	100	80						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf									997	1.097	1.152	1.210	1.271	Bidang Penais - Penyelenggara Zawa dan Kankemenag Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat
RO	2122.QEA.001 Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN)													
IKRO	Jumlah Data Mustahiq yang Diselaraskan dengan Data Kemiskinan Regsosek	Orang	309.043	401043	409043	501043	509043	602043						
IKRO	Jumlah Data Zakat dan Wakaf yang Selaras dengan Data Kemiskinan (DT-SEN)	Orang	309.043	401043	409043	501043	509043	602043						
RO	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF													
IKRO	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pengentasan Angka Kemiskinan	Kelompok Masyarakat	6	9	9	9	9	9						
RO	2122.QEI.001 Bantuan Operasio nal BWI													
IKRO	Jumlah Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Aset Wakaf	3	3	10	15	20	25						
RO	2122.QDB.001 Pembinaan Kelembagaan Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Program Pengentasan Kemiskinan													
IKRO	Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	36	39	42	44	51	57						
IKRO	Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Lembaga	5	3	3	4	5	6						
IKRO	Fasilitasi Kelembagaan dalam Penerbitan Akta Ikrar Wakaf	Lembaga	20	20	60	60	60	60						
RO	2122.QIC.001 Lembaga Amil Zakat yang Diaudit Syariah dan Keuangannya													
IKRO	Jumlah Lembaga Zakat yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	36	39	42	44	51	57						
IKRO	Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	20	20	60	60	60	60						
RO	2122.QIC.002 Layanan Advokasi Aset Wakaf													
IKRO	Jumlah Aset Wakaf yang Diberikan Pendampingan Advokasi dalam Penanganan Permasalahan Hukum	Lokasi	1	1	1	1	1	1						
RO	2122.QEI.001 Bantuan Operasional BWI													
IKRO	Terbinanya Lembaga Pengelola Wakaf (BWI)	Lembaga	20	20	60	60	60	60						
RO	2122.QEI.004 Bantuan Operasional BAZNAS													



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Terbinanya Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS)	Lembaga	36	39	42	44	51	57						
2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam									12.584	4.013	13.214	13.875	14.569	Bidang Penais - Penyelenggara Zawa dan Kankemenag Kabupaten/ Kta se Sumatera Barat
RO	2123.PEG.001 Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)													
IKRO	Jumlah Audiens pada Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) dalam Meningkatkan Kesalehan Umat Islam	Orang	40.000	87.719	114035	131578	140800	152.800						
RO	2123.AEG.001 Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Islam													
IKRO	Jumlah Partisipan dalam Penyelenggaraan Event Seni Budaya Islam	Orang	46	50	53	56	59	62						
RO	2123.QEI.002 Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan													
IKRO	Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Mendapatkan Pembinaan Tata Kelola Kelembagaan	Lembaga	20	20	20	20	20	20						
RO	2123.QDD.002 Majelis Taklim yang Dibina													
IKRO	Jumlah Lembaga Majelis Taklim yang Dibina dalam meningkatkan kesalehan umat Islam	Lembaga	31	30	30	30	30	30						
RO	2123.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam													
IKRO	Jumlah Dialog Internal Umat Islam dalam menciptakan kerukunan umat Islam	Kelompok Masyarakat	20	20	20	20	20	20						
RO	2123.QDC.002 Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya													
IKRO	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat	Orang	80	400	400	450	450	500						
IKRO	Jumlah Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan bimbingan	Lembaga/ Kelompok Masyarakat	11.804	5.580	6.696	6.696	7.812	8.928						
RO	2123.QDC.003 Penyuluh Agama Islam yang dibina Menjadi Influencer Sosial Media													
IKRO	Jumlah Konten Digital Penyuluhan Agama Islam Inklusif Transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Orang	5	21	50	75	100	150						
IKRO	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	0	21	50	75	100	150						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2123.QDC.001 Honorarium Penyuluh Agama Islam Non PNS													Bidang Urais dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
IKRO	Jumlah Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Memberikan Layanan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam	Orang	791	736	-	-	-	-						
2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								2.240	1.370	2.352	2.470	2.594		
RO	2124.QDD.001 Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam													
IKRO	Jumlah Rekomendasi Sistem Peringatan Dini dalam Pencegahan Konflik Keagamaan	Kelompok Masyarakat	20	28	35	35	38	38						
RO	Layanan Syariah Hisab Rukyat													
IKRO	Jumlah Pengukuran Arah Kiblat	Layanan	202	202	454	501	534	572						
IKRO	Jumlah Layanan Syariah Hisab Rukyat	Layanan	60	60	60	60	60	60						
RO	Literasi Keagamaan Islam Digital													
IKRO	Jumlah naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/ sesuai kaidah	Laporan	874	500	500	500	500	500						
RO	2124.QEI.001 Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan													
IKRO	Jumlah Rumah Ibadah yang Difasilitasi dan memenuhi standar	Lembaga	820	17	15	15	15	15						
RO	2124.QEO.U01 Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan													
IKRO	Jumlah Kitab Suci Agama Islam yang Disediakan	Unit	890	500	500	500	500	500						
RO	2124.QDB.001 Perpustakaan Masjid yang dibina													
IKRO	Jumlah Pustaka Keagamaan Islam yang Terfasilitasi	Lembaga	134	89	30	30	30	30						
2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri								312	-	-	-	-	Bidang PHU dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat	
RO	2147 QAA 001 Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri									Mulai 2026, menjadi tusi Kementerian Haji dan Umrah				
IKRO	Jumlah calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Layanan	2.543	2.207	-	-	-	-						
RO	2147 QAH 003 Revitalisasi Asrama Haji – SBSN													
IKRO	Jumlah Revitalisasi Asrama Haji – SBSN	Gedung PLHUT	7	0										



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	2147 QAH 002 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani – SBSN									Mulai 2026, menjadi tusi Kementerian Haji dan Umrah					
IKRO1	Jumlah pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Layanan	7	7											
IKRO2	Jumlah layanan pusat layanan haji dan umrah terpadu	Layanan	7	7											
2148 Pembinaan Haji								4.190							
RO	2148 QDC 001 Petugas Haji yang Profesional														
IKRO	Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Orang	0	0											
RO	2148 QDC 002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina														
IKRO	Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Orang	4.836	4.613											
025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun								136.781	122.219	143.645	150.840	158.405	Bidang Penmad, Bidang Papkis dan Bimas (Kristen, Hindu dan Buddha) dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat		
SK-8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan														
IKSK	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	70,00	76,00	73,00	75,00	76,00	77,00							
SK-9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas														
IKSK1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	3,00	2,19	2,30	5,5	6,00	7,00							
IKSK2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang mempe roleh peningkatan sarana prasarana	Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00							
IKSK3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	5,00	0,71	0,75	0,79	0,84	1,00							



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD /Adi Widyalaya/Mula Dhamma sekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Semina ri/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Persen	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	18,00						
IKSK5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	10,00	14,70	20,00	25,00	30,00	35,50						
IKSK6	Jumlah ATS yang mengikuti pendid ikan kesetaraan pada pesantren	Orang	11.495	11.700	11.934	12.196	12.500	12.838						
2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam									1.554	-	1.710	1.881	2.070	Bidang Papkis dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
RO	2128 QEN 001 Santri PPS Ula/ Paket A/Hanya Mengaji/ Muada lah Penerima PIP													
IKRO	Jumlah Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	656	668	675	685	696	705						
RO	2128 QEI 002 Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana													
IKRO	Jumlah pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memperoleh bantuan sarana dan Prasarana pembelajaran (peralatan belajar, pembangunan atau rehabilitasi rkb, laborato rium, perpustaka an, asrama, tempat ibadah, sanitasi dan penunjang digitalisasi)	Lembaga	71	85	87	90	94	97						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	9	12	15	17	18	21						
RO	2128.QEI.003 Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren													
IKRO	Jumlah Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren	Lembaga	19	21	24	26	28	30						
IKRO	Jumlah pesantren yang menyelengga rakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	Lembaga	32	54	78	104	132	162						
IKRO	Jumlah Lembaga Yang Mendapat kan Bantuan Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren (Kemandirian Pesantren)	Lembaga	19	21	24	26	28	30						
RO	2128 QEN 002 Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP													
IKRO	Jumlah Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	Orang	6.150	6.262	6.370	6.485	6.570	6.685						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2128 QEN 003 Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP													
IKRO	Jumlah Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	11.335	11.397	11.421	11.460	11.495	11.535						
RO	2128 QEN 005 Santri Tk. Ula/ Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/ Muadalah/ PPS Penerima BOS	Orang	1.011	1.027	1.040	1.062	1.075	1.090						
IKRO	Jumlah Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/ BA)	Orang	190	197	205	209	215	218						
RO	2128 QEN 006 Santri Tk. Wustha/ Diniyah Formal Muadalah/ PPS Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	5.470	5.537	5.580	5.603	5.635	5.670						
RO	2128 QEN 007 Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/ Muadalah/ PPS Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	1.880	1.942	1.965	1.986	1.999	2.023						
RO	2128 QE1 001 Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)													
IKRO	Jumlah Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Lembaga	30	34	38	42	46	50						
IKRO	Jumlah pesantren yang mendapat pendampingan teknis dalam pemanfaatan dan pelaporan dana BOP	Lembaga	15	17	19	21	23	25						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	0	0	2	4	6	8						
IKRO	Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Orang	3.046	3.534	3.045	3.430	3.568	3.650						
KRO	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan keagamaan Islam	Orang	11.495	11.700	11.934	12.196	12.500	12.838						
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah									136.781	122.219	143.645	150.840	158.405	Bidan Penmad. Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Bara
RO	2129 QEN 005 Siswa MI Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima BOS	Orang	28.009	28.259	28.542	28.827	29.115	29.319						
IKRO	Jumlah Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Orang	1.729	1.897	2.063	2.233	2.405	2.733						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN)		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2129 QEN 006 Siswa MTs Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima BOS	Orang	93.082	94.058	94.999	95.949	96.908	97.877						
RO	2129 QEN 007 Siswa MA Penerima BOS													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima BOS	Orang	37.231	37.507	37.882	38.261	38.644	39.030						
IKRO	Jumlah siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	36.300	36.374	37.037	37.706	38.381	39.061						
RO	2129 QEN 008 Siswa RA Penerima BOP													
IKRO	Jumlah Siswa RA Penerima BOP	Orang	14.408	14.591	14.737	14.884	15.033	15.183						
RO	2129.BAA.001 Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Madrasah													
IKRO	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah	Layanan	75	80	85	90	95	100						
IKRO	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Negeri	Layanan	0	1	1	1	1	1						
IKRO	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Swasta	Layanan	7	26	28	31	34	37						
IKRO	Jumlah Layanan Penegrian Madrasah	Layanan	0	5	5	5	5	5						
RO	2129 RBI 001 Prasarana Madra sah Pemenuhan SPM													
IKRO	Jumlah madrasah yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi)	Lembaga	28	153	50	50	50	50						
RO	2129 RBI 002 Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)													
IKRO	Jumlah madrasah yang ditingkatkan prasarananya melalui sumber pembiayaan SBSN	Lembaga	7	5	1	5	7	7						
IKRO	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	5	5	7	10	15	20						
RO	2129 RAA 001 Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran													
IKRO	Jumlah madrasah yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Unit	100	300	350	400	450	500						
RO	2129 QEI 003 Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif													
IKRO	Jumlah madrasah yang memperoleh pengadaan sarana untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai standar pendidikan inklusif	Lembaga	0	5	7	10	15	20						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2129 QEI 002 Bantuan Madrasah Daerah 3T													
IKRO	Jumlah Siswa Daerah 3T yang Memperoleh Bantuan Pendidikan	Lembaga	24	24	24	24	24	24						
RO	2129 QEN 001 Siswa Madrasah MI Penerima PIP													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	11.455	11.200	11.284	11.374	11.471	11.574						
RO	2129 QEN 002 Siswa Madrasah MTs Penerima PIP													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	37.585	33.105	33.353	33.620	33.908	34.196						
RO	2129 QEN 003 Siswa Madrasah MA Penerima PIP													
IKRO	Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	12.997	10.419	10.497	10.581	10.672	10.763						
RO	2129 QEI 004 Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M													
IKRO	Jumlah madrasah yang menerima bantuan sarana prasarana UKS sesuai standar layanan kesehatan dasar	Lembaga	4	5	7	10	12	15						
IKRO	Jumlah madrasah yang melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan UKS/M (puskesmas, komite sekolah, dinas kesehatan)	Lembaga	125	183	250	312	374	443						
RO	2129 SBB 001 Penyelenggaraan Madrasah Unggulan													
IKRO	Jumlah Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	Lembaga	159	159	185	200	225	250						
2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen									863	161	907	953	1.001	Bimas Kristen
RO	2136.QEN.006 - Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK													
IKRO	Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS	Orang	105	116	116	116	116	116						
RO	2136.QEI.001 - Bantuan Peralatan Sarana Penunjang Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta													
IKRO.	Jumlah lembaga pendidikan Keagamaan Kristen yang menerima Bantuan Sarana Penunjang Pembelajaran	Lembaga	1	0	0	1	1	1						
IKRO.	Jumlah Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD	Orang												
RO	2136.QEI.002- Bantuan Pengem bangan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta													
IKRO.1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang mendapatkan bantuan pengembangan prasarana	Lembaga												
RO	2136.QEN.003 - Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SDTK													
IKRO	Jumlah Siswa SDTK Penerima PIP	Orang	37	37	37	37	37	37						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu									55	0	64	74	86	Bimas Hindu
RO	2142 QEO 001 Sarana Lembaga pendidikan Widyalaya dan Penyelenggara Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu													
IKRO	Jumlah Lembaga Pendidikan Widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran	Lembaga	1	1	1	1	1	1						
RO	2142 QEI 001 Lembaga Pendi dikan Widyalaya yang diberikan bantuan													
IKRO	Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1					
4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha									172	159	190	209	230	Bimas Buddha
RO	4012 QEI 001 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional													
IKRO	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	2	2	3	3	3	4						
RO	4012 QEI 002 Lembaga Pendidikan Keagama aan Buddha yang diberikan Bantuan Prasarana													
IKRO	Jumlah satuan pendidikan agama Buddha yang memperoleh pembina an kelembagaan secara berkala	Lembaga	2	2	2	2	2	2						
RO	4012 RAA 001 Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha													
IKRO	Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan buddha yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakuri kuler dan multimedia)	Lembaga	2	1	2	2	2	2						
025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran									273.562	244.438	287.290	301.680	316.810	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Bimas (Kristen, Katolik dan Buddha), Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
SK-10	Meningkatnya layanan pendid dikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendid dikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan													
IKSK1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	Nilai	68,25 64,95	68,50 65,00	68,75 65,50	69,00 65,50	69,25 66,00	70,00 66,25						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	80,00	82,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSK3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	96,00	97,00	97,50	98,00	99,00	100,00						
IKSK4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	420	420	447	547	647	747						
IKSK5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0,45	0,45	0,50	0,75	1,00	1,25						
IKSK6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	90,00	90	93,00	95,00	97,00	99,00						
IKSK7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	60,00	63,00	65,00	68,00	70,00	72,00						
IKSK8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	1,59	1,59	1,85	2,00	2,25	2,50						
IKSK9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	14,70	14,70	15,00	16,00	17,00	18,00						
IKSK10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9	1,0						
IKSK11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	45,00	50,00	52,00	54,00	57,00	60,00						
IKSK12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	30,85	41,50	1,50	25,00	30,00	35,00						
SK-11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan													
IKSK1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	43,65	43,65	43,65	43,68	43,70	43,72						
IKSK2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Persen	01:10	1: 10	1:10	1: 10	1 : 9	1 : 8						
IKSK3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30,25	30,25	30,25	30,29	40,16	40,45						
IKSK4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	60,00	60,00	63,00	67,00	70,00	75,00						
IKSK5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	40,55	40,55	40,63	42,00	45,50	46,00						
IKSK6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	65,00	65,00	67,00	68,60	69,80	70,30						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	35,00	35,00	42,28	44,56	47,68	49,25						
IKSK8	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	1,50	1,50	1,50	1,52	1,54	1,57						
IKSK9	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	25,25	25,25	25,25	25,27	25,28	25,29						
IKSK10	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	43,65	43,65	43,65	43,75	43,85	44,50						
IKSK11	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	12,56	46,39	4	10	15	20						
4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah									-	-	-	-	-	Bidang Penmad, Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	4422 QDB 001 Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran													
IKRO	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a Literasi membaca b Numerasi	Nilai	68,25 64,95	68,50 65,00	68,75 65,50	69,00 65,50	69,25 66,00	70,00 66,25						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Lembaga	982	1.007	1.044	1.167	1.167	1.228						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Lembaga	1.179	1.191	1.197	1.203	1.216	1.228						
IKRO	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah	Orang	420	447	547	647	747	847						
IKRO	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) pada madrasah	Nilai	88,03	89,70	90,23	91,33	92,45	93,12						
RO	4422 SCI 001 Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama													
IKRO	Jumlah rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah	Nilai	87,72	88,23	89,45	90,12	91,33	92,11						
IKRO	Jumlah rata-rata Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	Nilai	86,35	87,45	88,18	89,90	90,23	91,33						





PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO-	4422.PBH.001 Model Pembe lajaran Madrasah yang Dikembangkan													Bidang Penmad Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
IKRO	Jumlah Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	Model	8	8	10	12	13	15						
IKRO	Jumlah Materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran)	Dokumen	0	90	100	110	120	125						
RO-	4422 QIC 001 Madrasah yang mendapat Supervisi Pembe lajaran													
IKRO	Jumlah PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	258	271	280	292	301	310						
IKRO	Jumlah MI yang terakreditasi minimal B	Lembaga	95	100	103	108	111	114						
IKRO	Jumlah MTs yang terakreditasi minimal B	Lembaga	250	263	271	284	292	300						
IKRO	Jumlah MA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	133	140	144	151	155	160						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Lembaga	159	159	185	200	225	250						
IKRO	Jumlah RA yang menerapkan program Holistik-Integratif	Lembaga	129	174	194	215	237	258						
IKRO	Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	553	614	638	663	700	737						
IKRO	Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Lembaga	10	12	12	12	12	12						
IKRO	Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Lembaga	10	12	12	12	12	12						
IKRO	Jumlah lulusan MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dala m waktu kurang dari 1 tahun	Orang	N/A	10	15	20	25	30						
RO	4422 QDC 001 Siswa Madrasah Berprestasi													
IKRO	Jumlah Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	94	94	96	102	109	115						
IKRO	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Orang	864	1.046	1.230	1.417	1.608	1.802						
2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah									58.719	47.724	52.719	54.037	55.388	
RO	2133 QEA 004 Guru Non-PNS Penerima Insentif													



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah Guru Non-PNS Penerima Insentif	Orang	1.657	1.657	1.665	1.688	1.746	1.861						
RO	2133 QEA 005 Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi													
IKRO	Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	Orang	2.122	2.122	4.250	6.378	8.506	9.941						
RO	2133 QEA 006 Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus													
IKRO	Jumlah Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	Orang	126	135	135	148	157	165						
RO	2133 PDG 001 Guru Madrasah yang Tersertifikasi													
IKRO	Jumlah Guru Madrasah yang Tersertifikasi	Orang	5.263	7.891	9.919	12.047	14.175	17.811						
RO	2133 SCI 001 Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi													
IKRO	Jumlah Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	7.657	7.657	9.966	10.125	10.226	10.365						
RO	2133 QDC 001 Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan RA Berprestasi													
IKRO	Jumlah guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Orang	5.263	7.891	9.919	11.047	12.175	12.175						
IKRO	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	Orang	241	257	268	274	285	302						
RO	2133 QAA 001 Pendidik dan Tenaga kependidikan Madrasah yang mendapat Pembinaan Karir													
IKRO	Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	519	635	548	559	567	576						
IKRO	Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	16	21	28	32	36	38						
RO	2133 SCI 003 Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama													Bidang Papkis dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
IKRO	Jumlah Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	7.657	9.996	10.096	10.196	10.296	10.396						
2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam									8.986	30.959	14.770	15.140	15.519	
RO	2127 SCI 003 Siswa Sekolah Umum yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama													
IKRO	Nilai survey indeks keberagamaan siswa keagamaan islam pada satuan pendidikan umum	Nilai	85,45	86,34	87,72	88,12	89,24	90,45						
IKRO	Nilai rata-rata penguatan moderasi beragama siswa keagamaan islam	Nilai	84,32	85,23	86,18	87,23	88,34	89,12						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2127 PBH 001 Model Kurikulum dan Pembe lajaran PAI yang Dikembangkan													
IKRO	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanu siaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan islam	Kurikulum	NA	0	3	5	7	9						
IKRO	Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembe lajaran pada pendidikan keagamaan islam	Dokumen	19	35	60	95	120	150						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan islam	Lembaga	20	35	45	60	75	90						
RO	2127 QEI 001 Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam													
IKRO	Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan	Lembaga	20	35	45	60	75	90						
RO	2127 PDG 001 Guru PAI yang Tersertifikasi													
IKRO	Jumlah Guru PAI yang Tersertifikasi	Orang	4.700	4.843	4.952	5.134	5.267	5.430						
RO	2127 QEA 001 Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS													
IKRO	Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	Orang	1.300	1.356	1.472	1..495	1425	1.443						
RO	2127 SCI 004 Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama													
IKRO	Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	0	422	845	1.184	1.353	1.691						
RO	2127 QEA 002 Insentif Guru PAI Non PNS													
IKRO	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Orang	0	50	338	845	1268	1691						
IKRO	Jumlah Guru PAI Non PNS yang memperoleh insentif	Orang	437	457	468	482	495	520						
RO	2127 QDC 002 Guru yang Difasilitasi dalam Penyelenggara an Ujian PAI													
IKRO	Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	0	1..600	2300	3.200	4.100	5.200						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	0	7	14	22	31	46						
RO	2127 SCI 001 Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompe tensi													
IKRO	Jumlah Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	224	327	427	556	634	732						
RO	2127 SCI 002 Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompe tensi													
IKRO	Jumlah Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	4	7	9	12	14	16						Bidang Papkis dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam									1.554	-	1.710	1.881	2.070	
RO	4433 QDB 001 Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama													
IKRO	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh nilai literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi tingkat nasional dengan kategori baik	Nilai	1.324	1.476	1.567	1.687	1.997	2.035						
IKRO	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang difasilitasi dalam survei indeks keberagamaan	Nilai	0	250	280	300	350	400						
IKRO	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh penguatan moderasi beragama	Nilai	450	480	490	500	520	550						
RO	4433 PBH 001 Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan													
IKRO	Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Dokumen	20	45	75	80	95	120						
IKRO	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Dokumen	0	2	3	5	7	9						
IKRO	Jumlah peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan	Kajian	0	20	40	60	80	100						
RO	4433 QEI 002 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren													
IKRO	Jumlah PAUDQU yang memperoleh hasil assesment minimal B	Lembaga	2	2	2	4	4	6						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Lembaga	19	38	57	76	95	114						
IKRO	Jumlah santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	27	38	45	48	52	60						
IKRO	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Lembaga	23	35	46	58	68	75						
IKRO	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	78	107	205	308	409	520						
IKRO	Jumlah satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	4	6	7	9	12	15						
RO	4433.PDG.003 Ustadz yang Tersertifikasi													
IKRO	Jumlah Ustadz yang Tersertifikasi	Orang	0	4	7	12	15	20						
RO	4433.QEA.001 Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif													
IKRO	Jumlah Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	Orang	474	518	550	575	600	625						
RO	4433.QEA.002 Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG													
IKRO	Jumlah Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	Orang	0	1	2	5	6	8						
RO	4433.SCI.001 Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya													
IKRO	Jumlah Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	145	152	161	173	184	196						
4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen									283	378	416	458	504	Bimas Kristen
RO	4434.PBH.001 Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen yang dikembangkan													
IKRO	Penyusunan dan Penyempurnaan Kuriku lum/Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kriste	Bahan Ajar	-	1	1	1	1	-						
RO	4434.QEI.001-Lembaga POKJA WAS/KKG/ MGMP Kristen Penerima Bantuan													
IKRO	Lembaga POKJWAS/ KKG/ MGMP penerima bantuan	Lembaga	6	1	6	6	6	6						
4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik									237	847	890	935	982	Bimas Katolik
RO	4435.QEI.005- POKJAWAS/KKM/KKG/ MGMP penerima bantuan													
IKRO	Jumlah POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGM Penerima bantuan	Lembaga	2	2	2	2	2	2						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	4435.QEK.003 Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profes													
IKRO	Jumah guru agama Katolik Non PNS penerima TPG	Orang	7	5	26	28	30	30						
RO	4435.QEK.005 Siswa beragama Katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan													
IKRO	Jumlah siswa beragama Katolik pada sekolah umum yang mendapatkan pembinaan keagamaan	Orang	40	30	40	40	40	40						
4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha									150	170	187	206	227	Bimas Buddha
RO	4437.PEF.001 Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan													
IKRO	Jumlah Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan		40	35	40	45	50	55						
RO	4437.QDB.001 Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya													
IKEO	Jumlah lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya		5	5	5	5	5	5						
025.WA - Program Dukungan Manajemen									1.467.518	1.854.994	1.899.175	1.939.732	1.981.269	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
SK-12	Meningkatnya kualitas perencanaan an dan anggaran													
IKSK	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	74,50	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00						
SK-13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	74,23	76,50	76,50	76,51	76,51	76,52						
IKSK2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	31,10	40,25	40,25	40,26	40,26	40,27						
SK-14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN													
IKSK1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	85,00	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00						
IKSK2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	90,00	90,00	90,00	91,00	91,50	91,65						
IKSK3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	95,25	95,25	95,25	96,05	96,55	97,50						
IKSK4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	91,00						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	98,50	98,50	98,50	98,55	98,57	98,60						
SK-15	Meningkatnya kualitas penge lolaan ASN (pengadaan, penempat an, pembinaan dan pengem bangan pegawai)													
IKSK1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79,15	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
IKSK2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	85,00	78,50	78,50	90,00	90,00	90,00						
IKSK3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	Orang	7	8	8	9	10	10						
SK-16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100	89,50	89,50	100	100	100						
IKSK2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	90,00	92,50	93,50	95,00	96,50	98,50						
SK-17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK1	Persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses	Persen	70,86	71,73	75,50	76,00	76,10	76,20						
IKSK2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	82,00	83,00	85,00	85,10	85,20	85,30						
IKSK3	Nilai layanan kesehatan	Persen	0	88,00	89,00	90,20	91,11	93,23						
SK-18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi													
IKSK1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Persen	89,00	89,48	90,00	90,25	90,50	90,75						
IKSK2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pen didikan yang dipublikasi	Persen	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00						
SK-19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,50	1,50	1,80	1,85	1,90	1,95						
IKSK2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	58,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00						
SK-20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	98,00	98,20	98,40	98,60	98,80	99,00						
IKSK2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,80	1,80	1,98	2,10	2,40	2,45						
IKSK3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	0	15,00	18,00	20,00	23,00	25,00						
IKSK4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	14,50	15,00	18,00	20,00	23,00	25,00						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00						
IKSK6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	65,00	67,76	71,33	75,00	77,85	78,90						
2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan									690	333	725	762	800	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	2102.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
IKRO	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	566	746	566	566	566	566						
	a. Rencana Strategis	Dokumen	0	180	0	0	0	0						
	• Kanwil dan Kankemenag	Dokumen	0	20	0	0	0	0						
	• MAN dan MTsN Se Sumatera Barat	Dokumen	0	160	0	0	0	0						
	b. Rencana Kerja Tahunan	Dokumen	180	180	180	180	180	180						
	• Kanwil dan Kankemenag	Dokumen	60	60	60	60	60	60						
	• MAN dan MTsN se Sumatera Barat	Dokumen	120	120	120	120	120	120						
	c. RKA-KL	Dokumen	246	246	246	246	246	246						
	• RKA-KL Kanwil	Dokumen	8	8	8	8	8	8						
	• RKA-KL Kankemenag se Sumatera Barat	Dokumen	78	78	78	78	78	78						
	• RKA-KL MAN dan MTsN se Sumatera Barat	Dokumen	160	160	160	160	160	160						
	d. Perjanjian Kinerja	Dokumen	140	140	140	140	140	140						
	• Kanwil dan Kankemenag	Dokumen	20	20	20	20	20							
	• MAN dan MTsN se Sumatera Barat	Dokumen	120	120	120	120	120	120						
RO	2102.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													Bagian TU dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
IKRO	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang ditindaklanjuti	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana									744	214	782	821	862	
RO	2101.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja													
IKRO	Jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM	Jumlah	0	1	1	1	1	1						
IKRO	Jumlah Masyarakat yang mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	50	60	65	70	75	80						
IKRO	Laporan Kinerja (Triwulan dan Tahunan)	Dokumen	100	100	100	100	100	100						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	a. Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Kanwil dan Kankemanag se Sumatera Barat	Dokumen	80	80	80	80	80	80						
	b. Laporan Tahunan Kanwil dan Kankemenag Se Sumatera Barat	Dokumen	20	20	20	20	20	20						
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN									263.244	262.366	267.614	272.967	278.426	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	2100.EBA.956 Layanan BMN													
IKRO	Jumlah Aset yang tercatat dalam SIMAK BMN	Aset	2.664.263	2664263	2664263	2664263	2664263	2664263						
IKRO	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Jumlah	160	160	160	160	160	160						
RO	2100.EBA.994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Jumlah	13.346	13.346	13.346	13.346	13.346	13.346						
RO	2100.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah	6	4	4	4	4	4						
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	490	491	492	492	492	492						
IKRO	Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah	150	160	160	160	160	160						
2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian									339	216	373	411	452	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	2099.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pen-gadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Jumlah	205	189	189	217	217	217						
	a. Kantor Kementeerian Agama		19	19	19	19	19	19						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	b. MAN/ MTsN/MIN		222	222	222	222	222	222						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Jumlah	4.590	5.101	5.500	5.600	5.700	5.800						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif	Orang	7	8	8	9	10	10						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Jumlah	1.339	0	2.927	2.927	2.927	2.927						
IKRO	Jumlah Pegawai yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Dokumen	13.346	13.346	13.346	13.346	13.346	13.346						
2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN									137	23	151	166	183	Bagian TU dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
RO	2098.AEC.964 Hasil Kesepakatan Kerja Sama Internasional													
IKRO	Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar yang diterbitkan	Jumlah	4	5	5	5	6	7						
RO	2098.EBA.957 Layanan Hukum													
IKRO	Jumlah harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum	Jumlah	10	10	11	12	13	15						
IKRO	Jumlah rancangan peraturan yang diterbitkan sesuai perencanaan	Jumlah	2	2	2	2	2	2						
2103 Pembinaan Administrasi Umum									19.506	16.247	20.481	21.505	22.580	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	2103.CAN.001 Sarana Bidang TIK													
IKRO	Jumlah Arsip yang terdigitalisasi	Dokumen	5.570	6.097	6.417	6.460	6.468	6.477						
RO	2103.EBA.962 Layanan Umum													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Layanan Kesehatan	Orang	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330						
IKRO	Jumlah sarana dan prasarana layanan umum yang disediakan	Jumlah	237	239	240	241	242	245						
RO	2103.EBA.994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan	Layanan	125	125	126	128	130	135						
RO	2103.EBB.951 Layanan Sarana Internal													



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	246	246	246	246	246	246						
RO	2103.EBB.971 Layanan Prasarana Internal													
IKRO	Jumlah Layanan Prasarana Internal	Jumlah	129	130	145	147	148	150						
2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan									316	222	364	419	482	Bagian TU dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
RO	2106.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal													
IKRO	Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Layanan	240	258	310	344	396	430						
IKRO	Layanan data dan informasi	Layanan	240	258	310	344	396	430						
IKRO	Layanan perkantoran	Layanan	165	166	167	168	169	170						
6708 Dukungan Manajemen Pendidikan									1.129.144	1.522.894	1.553.352	1.584.419	1.616.107	Bagian TU Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	6708 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memiliki realisasi anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Jumlah	160	160	160	160	160	160						
RO	6708 EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai peningkatan kinerja	Jumlah	160	160	160	160	160	160						
RO	6708 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
IKRO	Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Jumlah	0	450	540	600	690	750						
RO	6708 EBA 963 Layanan Data dan Informasi													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memperoleh layanan peningkatan akses informasi dan publikasi program	Jumlah	160	160	160	160	160	160						
RO	6708 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Persentase Jabatan Fungsional Keuangan Negara yang memenuhi standar	Jumlah	75	75	80	80	80	80						
RO	6708.EBA.994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan	Jumlah	20	20	20	20	20	20						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2125 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam									8.329	10.461	10.984	11.533	12.110	Bidang Urusan Agama Islam dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
RO	2125.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90	Satuan Kerja	20	20	20	20	20	20						
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	20	20	20	20	20	20						
IKRO	Jumlah Penerimaan PNBP	Jumlah	17.605	14.413	16.619	16.701	16.784	14.413						
RO	2125.EBC.954 Layanan Manajemen SDM													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN	Orang												
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	2	3	3	4	4	5						
RO	2125.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
IKRO	Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
RO	2125.EBA.962 Layanan Umum													
IKRO	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Layanan												
RO	2125.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
IKRO	Jumlah ` yang dipublikasi	Layanan	5	5	5	5	5	5						
IKRO	Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID		5	5	5	5	5	5						
RO	2125.EBA.963 Layanan Data dan Informasi													
IKRO	Jumlah Data Statistik yang di publikasi	Layanan	5	5	5	5	5	5						
IKRO	Jumlah Layanan Keagamaan Berbasis Transformasi IT	Layanan	5	5	5	5	5	5						
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam									41.212	41.202	43.273	45.436	47.708	Bidang Penmad, Bidang Papkis, Kankemenag Kabupaten Kota dan MAN/ MTsN se Sumatera Barat
RO	2135 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	161	161	161	161	161	161						
RO	2135 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
IKRO	Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran	Kegiatan	5	5	5	5	5	5						
RO	2135 EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
IKRO	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Dokumen	161	161	161	161	161	161						
IKRO	Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV MAN dan MTsN se Sumatera Barat	Dokumen	600	600	600	600	600	600						
IKRO	Laporan Tahunan MAN/ dan MTsN se Sumatera Barat	Dokumen	160	160	160	160	160	160						
RO	2135 EBD 961 Layanan Reformasi Kinerja													
IKRO	Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
RO	2135 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	161	161	161	161	161	161						
IKRO	Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindak lanjut	Jumlah	1	1	1	1	1	1						
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	161	161	161	161	161	161						
RO	2135 EBA 956 Layanan BMN													
IKRO	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Lembaga	161	161	161	161	161	161						
RO	2135 EBC 954 Layanan Manajemen SDM													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN	Orang	4.547	5.769	5.824	5.903	6.139	6.296						
IKRO	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Lembaga	144	145	150	153	157	161						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif	Orang	46	112	150	175	200	250						
RO	2135 EBC 996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	124	135	145	155	165	175						
RO	2135 EBA 957 Layanan Hukum													
IKRO	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO	Jumlah rekomendasi izin orang asing	Dokumen	0	1	1	1	1	1						
RO	2135 EBA 969 Layanan Bantuan Hukum													
IKRO	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Layanan	7	5	5	5	5	5						
RO	2135 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
IKRO	Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	50	70	75	80	90	100						
IKRO	Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID	Lembaga	0	90	99	108	117	126						Bimas Kristen
2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen									70	199	240	288	345	
RO	2138.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
IKRO	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO	2138 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
IKRO	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	Dokumen	1	1	1	1	1	1						Bimas Katolik
RO	2138 EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
IKRO	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO	2138 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO	Layanan BMN													
IKRO	Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	1	1	1	1	1	1						
RO	2138 EBA 994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1						
2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik									213	183	256	308	370	
RO	2141 EBA 957 - Layanan Hukum													
IKRO	Jumlah rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan	Jumlah	2	2	5	3	3	3						
RO	2141 EBA 962 - Layanan Umum													
IKRO	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Paket	0	0	1	1	1	1						
RO	2141 EBA 963 - Layanan Data dan Informasi													
IKRO	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	5	5	5	5	5	5						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2141 EBA 994 - Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	15	15	15	15	15	15						
RO	2141 EBB 951 - Layanan Sarana Internal													
IKRO	Jumlah sarana internal yang disediakan	Unit	3	3	10	10	10	10						
RO	2141 EBC 954 - Layanan Manajemen SDM													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN	Orang	15	15	15	15	15	15						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	2	5	5	5	5	5						
RO	2141.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
IKRO	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
RO	2141 EBD 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
IKRO	Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
RO	2141 EBD 955 - Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	0	0	0	0						
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
RO	2141 EBD 961 - Layanan Reformasi Kinerja													
IKRO	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai standar (SKP)	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu									233	238	286	344	420	Bimas Hindu
RO	2144 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0	0						
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
RO	2144 EBC 954 Layanan Manajemen SDM													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori minimal sedang	Orang	2	2	4	4	4	4						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	0	0	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2144 EBC 996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan													
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	1	1	1	1	1	1						
RO	2144 EBA 963 Layanan Data dan Informasi													
IKRO	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO	2144 CAN 951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan													
IKRO	Jumlah Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	3	3	2	2	2	2						
RO	2144 EBA 962 Layanan Umum													
IKRO	Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Unit	2	1	2	2	2	2						
RO	2144 EBA 994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	3	2	4	4	4	4						
RO	2144 EBB 951 Layanan Sarana Internal													
IKRO	Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	11	4	3	3	3	3						
RO	2144 EBB 971 Layanan Prasarana Internal													
IKRO	Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	2	2	2	2	2	2						
RO	2144 EBD 974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													
IKRO	Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
2146 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha									245	196	294	353	424	Bimas Buddha
RO	2146 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
IKRO	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO	2146 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
IKRO	Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan													
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ / INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (Rp.000.000)					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO	2146 EBC 954 Layanan Manajemen SDM													Bidang PHU dan Kankemenag Kabupaten Kota se Sumatera Barat
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN minimal kategori sedang	Orang	1	1	1	1	1	1						
IKRO	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	1	1	1	1	1	1						
RO	2146 EBA 963 Layanan Data dan Informasi													
IKRO	Jumlah data statistik yang dipublikasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
IKRO	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO	2146 EBA 994 Layanan Perkantoran													
IKRO	Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	3	5	5	6	6	7						
2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah									3.096	-	-	-	-	
RO	2150 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Kementerian Haji dan Umrah									
IKRO	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	86.50	92,00										
RO	2150 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
IKRO	Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran	Kegiatan	17	18										
RO	2150 EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
IKRO	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Jumlah	1	1										
RO	2150 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan													
IKRO	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Satker	78,06	90,74										
IKRO	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Satker	20	20										



Lampiran III : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029
PEMBIAYAAN NON APBN

KEGIATAN PRIORITAS DAN PENUGASAN INDIKATOR		TARGET					ALOKASI APBN (Rp. 000.000)					ALOKASI NON APBN (Rp. 000.000)					TOTAL (Rp. 000.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusi																				
	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	3,00	2,19	2,30	5,5	6,00	706.797	712.482	719.658	726.887	734.108	30.488	30.793	31.409	32.037	32.678	737.285	743.275	751.067	758.924	766.786
KP	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MI/Ula/ MTs/Wustha/ MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widyalya/Utama Dhammasekha																				
RO	2129QEN008 Siswa RA Penerima BOP	14.408	14.591	14.737	14.884	15.033	8.645	8.755	8.842	8.930	9.020						8.645	8.755	8.842	8.930	9.020
RO	2129QEN005 Siswa MI Penerima BOS	28.009	28.259	28.542	28.827	29.115	25.208	25.433	25.688	25.944	26.204						25.208	25.433	25.688	25.944	26.204
RO	2129QEN006 Siswa MTs Penerima BOS	93.082	94.058	94.999	95.949	96.908	111.698	112.870	113.999	115.139	116.290						111.698	112.870	113.999	115.139	116.290
RO	2129QEN007 Siswa MA Penerima BOS	37.231	37.507	37.882	38.261	38.644	558.465	562.605	568.230	573.915	579.660						558.465	562.605	568.230	573.915	579.660
RO	2128QEN005 Santri Tk. Ula/ Diniyah Formal/ Muadalah/ PPS Penerima BOS	1.011	1.027	1.040	1.062	227,48	231,08	234,00	238,95	241,88	227,48						231,08	234,00	238,95	241,88	227,48
RO	2128QEN006 Santri Tk. Wustha/ Diniyah Formal Muadalah/ PPS Penerima BOS	5.470	5.537	5.580	5.603	1.504,2	1.522,6	1.534,5	1.540,8	1.549,6	1.504,2						1.522,6	1.534,5	1.540,8	1.549,6	1.504,2





KEGIATAN PRIORITAS DAN PENUGASAN INDIKATOR		TARGET					ALOKASI APBN (Rp. 000.000)					ALOKASI NON APBN (Rp. .000.000)					TOTAL (Rp. 000.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	2128QEN007-Santri Tk. Ulya /Diniyah Formal/ Muada lah/ PPS Penerima BOS	1.880	1.942	1.965	1.986	1.999	705,00	728,25	736,88	744,75	749,63						705,00	728,25	736,88	744,75	749,63
RO	2128QEI001-Pesanan Penerima Bantuan Opera sional Pendidikan (BOP)	30	34	38	42	46	225	225	285	315	345						225	225	285	315	345
RO	2136QEN006 – Ban tuan Opera sional Siswa (BOS) SDTK	108	108	108	120	120	97,2	97,2	97,2	108	108	-	-	-	-	-	97,2	97,2	97,2	108	108
KP	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): • Layanan haji dalam negeri; • Layanan haji luar negeri																				
RO	2148.QDC.002 Je maah Haji Reguler yang Terbina	4.643	-	-	-	-							-	-	-	-					
RO	2148.QDC.001 Pe tugas Haji yang Profesional	74	-	-	-	-							-	-	-	-					
KP	Penyelenggaraan Event dan Layan an Keagamaan																				
RO	2123.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	40	40	40	40	40	250	250	250	250	250	10.000	1.000	11.000	1.000	12.000	10.250	1.250	11.250	12.500	12.250
RO	2122.QEA.002 – Kelompok Rumah Tangga Miskin diberdaya kan melalui Kampung ZISWAF	1	1	1	1	1	15	15	15	15	15	350	350	440	480	480	365	365	455	495	495



Lampiran IV : Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Nomor 690 Tahun 2025
Tentang
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

A. Pengukuran IKSK Bidang Agama

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama.
2	Nama Indikator	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi diatas 83,00
3	Konsep/Definisi	IKUB merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian IKUB, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKUB = (\text{Nilai Dim.Toleransi} + \text{Nilai Dim.Kesetaraan} + \text{Nilai Dim.Kerjasama}) / 3$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelesaian kasus sosial keagamaan 2. Pelaksanaan cegah konflik 3. Penguatan FKUB 4. Peningkatan frkuensi dialog keagamaan 5. Pendataan atas pengaduan kasus konflik melalui EWS
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 00-20 = Rukun Sangat Rendah 2. 20,1-40 = Rukun Rendah 3. 40,1-60 = Rukun Sedang 4. 60.1-80 = Rukun Tinggi 5. 80,1-100 = Rukun Sangat Tinggi



11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b. Jumlah total KUA
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase KUA penyelenggara EWS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha serta FKUB
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah dialog kerukunan menurut agama yang difasilitasi pada tahun berjalan b. Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan menurut agama tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan menurut agama tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat Provinsi 2. Tingkat Kota/ Kabupaten
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha



2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/ Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus $=((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/ Pesparani/Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swaya mvara Tripitaka Gatha Tingkat Provinsi
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring) 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha



2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $[(a-b) / b] \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah peserta tahun ini b. Jumlah peserta tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan 3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)



3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b. Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: a. Islam, b. Kristen, c. Katolik, d. Hindu, dan e. Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penais dan Penyelenggara Zawa, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama



3	Konsep/Definisi	Pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus : $x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x <u>Keterangan</u> a. Jumlah penyuluh agama yang aktif b. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
3	Konsep/Definisi	Penghulu/ fasilitator bimbingan perkawinan adalah seseorang yang memandu, mendampingi, dan membangun kesadaran calon pengantin agar mereka siap menjalani kehidupan rumah tangga yang kokoh dan sejahtera
4	Interpretasi	
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah penghulu/ fasilitator yang bersertifikat b. Total jumlah penghulu/ fasilitator yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Layanan BP4 2. Layanan keagamaan lainnya



7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun di Sumatera Barat adalah 49.287.000 jiwa.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b. Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS Provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/ sekolah 3. Model bimbingan bekerjasama dengan madrasah/ sekolah /pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase



9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Layanan yang diberikan pada keluarga Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, i dapat berupa konseling individu untuk anggota keluarga, konseling kelompok, lokakarya, atau program-program yang melibatkan seluruh keluarga sebagai sistem yang tidak terpisahkan dalam penyelesaian masalah.
4	Interpretasi	Semakin banyak layanan diberikan, akan dapat membantu keluarga dalam berbagai bidang, seperti pribadi, belajar, sosial, dan karir, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan mengoptimalkan potensi masing-masing anggota keluarga.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = [(a-b) / b] x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan keluarga tahun berjalan b. Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan keluarga tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga 3. Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan keagamaan 4. Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan 5. Penyediaan sarana dan media edukasi keagamaan bagi keluarga
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	



11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
3	Konsep/Definisi	Bantuan yang diberikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada rumah ibadah
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur seberapa banyak rumah ibadah dari total jumlah rumah ibadah yang ada telah menerima bantuan untuk pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana ibadahnya, seperti bangunan, fasilitas, dan perlengkapan yang menunjang kegiatan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana b. Jumlah rumah ibadah yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah rumah ibadah berdasarkan agama yang mendapat bantuan 2. Jumlah total rumah ibadah yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat



3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b. Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat



		mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf - Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai nilai moderasi,



		serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b)) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar sesuai kaidah b. Jumlah naskah/buku keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Urusan Agama Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi



5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b. jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b. Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia 2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia 3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia 4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia



		5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas) 2. Lansia dengan Pendamping 3. Lansia Mandiri 4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
3	Konsep/Definisi	Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b. Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT



		4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap 2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar 3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital 4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
3	Konsep/Definisi	Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b. Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survey
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT 2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kecepatan Layanan 2. Ketepatan Layanan 3. Kenyamanan Layanan 4. Kemudahan Akses Layanan



11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus b. Lembaga penyelenggara umrah
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a/b)×100 <u>Keterangan</u> a. Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b. Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A 2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	--	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b. Jumlah total unit layanan yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	- Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar - Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji - Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji - Pemeriksaan Kelaikan Transportasi Jemaah Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Pelayanan Akomodasi - Pelayanan Konsumsi - Pelayanan Transportasi
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
3	Konsep/Definisi	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b. Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji 2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI) 2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) 3. Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji



4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = (a / b) x 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b. Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jemaah Haji Reguler 2. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

B. Pengukuran IKS Bidang Pendidikan

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep/Definisi	Ukuran proporsi siswa/santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan predikat " sangat baik " di tiga jenis satuan pendidikan yang berbeda: pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan, dan pesantren.
4	Interpretasi	Persentase kelulusan "sangat baik" pada satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan pesantren menunjukkan kinerja akademik dan poten



		potensi lulusan dari masing-masing lembaga pendidikan dalam mencapai standar tertinggi, namun memerlukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong keberhasilan ini
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa/ santri yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan predikat sangat baik b. Total jumlah santri/ siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan 2. Jumlah siswa/ santri 3. Rekapitulasi hasil belajar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.



		Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggara kan pendidikan inklusif b. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan atau survei penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Pemenuhan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.



4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan lainnya. Persentase yang tinggi mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b. Jumlah total madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan.



		Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Anak Kelas 1 MI/Ula yang Pernah Mengikuti TK/ RA
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI/ Ula, yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula yang pernah mengikuti PAUD b. Total jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI/ Ula
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru 2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dhammasekha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah



		b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/ lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
3	Konsep/Definisi	Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya 2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara



8	Ukuran/Satuan	Orang
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota



12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidik
		an melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b. Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
3	Konsep/Definisi	Jumlah prestasi yang diraih siswa madrasah/ satri pesantren dari kegiatan ekstrakurikuler merujuk pada total hasil atau pencapaian yang diperoleh



		siswa melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan di luar kurikulum formal, seperti kemenangan dalam kompetisi, meraih penghargaan, atau mencapai tingkat keterampilan tertentu di bidang minat mereka, yang kemudian dicatat dan diakui sebagai bukti usaha dan kemampuan mereka di luar akademik.
4	Interpretasi	Prestasi adalah hasil akhir dari suatu kegiatan yang telah dilakukan secara sungguh-sungguh.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikannya: ...
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b. Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan b. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan



7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b. Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	



8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b. Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan pesantren menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah dan pondok pesantren yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah dan pondok pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual b. Total jumlah madrasah dan pesantren
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah madrasah dan pesantren dengan program pendidikan bilingual
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah dan Pesantren
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di



		tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b. Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b. Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai



7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b. Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal atas kompetensi dan profesionalisme guru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa guru tersebut memenuhi standar untuk menjalankan tugasnya.
4	Interpretasi	Menggambarkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan guru terhadap standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru madrasah dan GPAI yang memiliki sertifikat pendidik b. Total jumlah guru madrasah dan GPAI
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total Jumlah Guru: .
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah guru yang belum mengikuti PPG
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang: MI, MTs dan MA
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani



		siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b. Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten / Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal atas kompetensi dan profesionalisme guru agama yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa guru tersebut memenuhi standar untuk menjalankan tugasnya.
4	Interpretasi	Menggambarkan tingkat profesionalisme dan kepatuhan guru terhadap standar kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b. Total jumlah guru agama yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang Memiliki Sertifikat Pendidik 2. Total Jumlah Guru Agama: .
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah guru agama yang belum mengikuti PPG
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang: SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat
11	Level Estimasi	- Provinsi - Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil



		b. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/ Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK



6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	3. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/ Sekolah (AKK) oleh kementerian/ lembaga terkait 4. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan a. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama



		minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.



		Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit.



		Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/ jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b. Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b. Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/ lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas



		pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b. Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindak lanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/ lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

C. Pengukuran IKS Tata Kelola

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



6	Nama Variabel Pembangun	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Perencanaan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	▪ NKA > 90% (Sangat Baik); ▪ NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); ▪ NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); ▪ NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); ▪ NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	



	(Disebutkan nama publikasinya)	
--	--------------------------------	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3	Konsep/Definisi	IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran



4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan



6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti, 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti, 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN



6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. Pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan



10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. Pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan



10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara/Tata Kelola Aset/Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkatkan Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasar kan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota



12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi



4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kementerian Agama
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah 288ndicator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) * 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum



7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1. Kasus Sengketa tanah 2. Kasus hukum ASN 3. Dll
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	▪ Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ▪ Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) ▪ Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) ▪ Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ▪ Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA ▪ Rekomendasi Izin Tinggal Dinas ▪ Izin Penelitian ▪ Izin Studi ▪ Izin Penelitian ▪ Izin Studi



7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: • Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) • Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) • Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) • Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) • Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA • Rekomendasi Izin Tinggal Dinas • Izin Penelitian • Izin Studi • Izin Penelitian • Studi
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi



		3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan ttingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Sarana dan prasaran 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Laporan pembangunan, 2. Roadmap pengembangan, data aset perkantoran 3. Sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase



9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1. $\geq 80\%$ Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2. 60% - 79% Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3. 40% - 59% Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4. 20% - 39% Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5. $< 20\%$ Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik



		4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan



4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data



		3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase data statistik yang dipublikasikan
3	Konsep/Definisi	Proporsi data statistik yang memenuhi standar akurasi dan kualitas tertentu yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan
4	Interpretasi	Data yang dipublikasikan adalah data yang akurat dengan kualitas tertentu dan memenuhi syarat sebagai dasar untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah data statistik pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangunan	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menyatakan berapa banyak perubahan yang terjadi pada suatu nilai statistik antara dua titik waktu yang berbeda.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	



13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	--	--

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	



No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> c. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan d. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.



4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Diseminasi dan Publikasi Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.



5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Diseminasi dan Publikasi Program/Kebijakan Prioritas Bidang Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: • Komunikasi Publik • Pendidikan • Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ <u>Keterangan</u> a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi



		b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) × 100% <u>Keterangan</u> a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai



		3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten/ Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

No	ATRIBUT	KETERANGAN
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Bagian Tata Usaha
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangunan	Berdasarkan aspek penilaian: • Perencanaan Anggaran, • Pelaksanaan Anggaran, • Efektivitas, Efisiensi, dan • Kepatuhan terhadap Regulasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Provinsi dan Kabupaten / Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak



13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
----	---	--